



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024



SAIFUL, S.Pd., M.Si
BUPATI KATINGAN

FIRDAUS, ST
WAKIL BUPATI KATINGAN





KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LPPD ini disusun sebagai kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah memberikan laporan akhir atas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakannya kepada masyarakat dalam kurun satu tahun anggaran kepada Pemerintah. Laporan ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Sesuai pedoman tersebut, LPPD Tahun Anggaran 2024 berisi informasi tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Sebagai dokumen informasi pembangunan, LPPD Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai ringkasan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat disajikan landasan untuk merencanakan pembangunan Kabupaten Katingan yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder Pemerintah Kabupaten Katingan dapat memanfaatkan laporan ini sebagai bahan untuk memberikan masukan, kritik dan saran bagi perencanaan pembangunan yang akan datang, sehingga ke depan perencanaan pembangunan akan semakin baik dengan memperbaiki segala kekurangan yang telah ada.

Kasongan, Maret 2025

BUPATI KATINGAN



SAIFUL



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I
1.1.1 Penjelasan Umum	I
a. Undang – Undang Pembentukan Daerah.....	2
b. Data Geografis Wilayah.....	2
c. Jumlah Penduduk	4
d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan.....	6
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	12
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	30
a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	30
b. Visi dan Misi	45
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	50
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	54
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	66
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	2
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	3
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	47
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	54
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	1
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4.1 Urusan Pendidikan	1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	2
4.1.3 Realisasi	2
4.1.4 Alokasi Anggaran	3
4.1.5 Dukungan Personil	4
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	4
4.2 Urusan Kesehatan	7
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	7
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	7



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

4.2.3	Realisasi	9
4.2.4	Alokasi Anggaran	10
4.2.5	Dukungan Personil	11
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	13
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	22
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	22
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	22
4.3.3	Realisasi	23
4.3.4	Alokasi Anggaran	23
4.3.5	Dukungan Personil	23
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	24
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	25
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	25
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	25
4.4.3	Realisasi	26
4.4.4	Alokasi Anggaran	26
4.4.5	Dukungan Personil	27
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	27
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	28
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.....	28
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	28
4.5.3	Realisasi	29
4.5.4	Alokasi Anggaran	30
4.5.5	Dukungan Personil	31
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	31
4.6	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	34
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan.....	34
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	34
4.6.3	Realisasi	35
4.6.4	Alokasi Anggaran	37
4.6.5	Dukungan Personil	39
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	39
4.7	Urusan Sosial	40
4.7.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	40
4.7.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	41
4.7.3	Realisasi	41
4.7.4	Alokasi Anggaran	42
4.7.5	Dukungan Personil.....	42
4.7.6	Permasalahan dan Solusi	43

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Katingan Per Kecamatan.....	4
Tabel 1.2	Jumlah penduduk Kabupaten Katingan berdasarkan Luas Wilayah, Laju Pertumbuhan dan Persentase Penduduk Tahun 2024	5
Tabel 1.3	Jumlah penduduk Kabupaten Katingan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	5
Tabel 1.4	Daftar Nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan se Kabupaten Katingan.....	6
Tabel 1.5	Perangkat Daerah Kabupaten Katingan	12
Tabel 1.6	Deskripsi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Pembentukannya	13
Tabel 1.7	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan Berdasarkan Unit Organisasi dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024.....	15
Tabel 1.8	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024	17
Tabel 1.9	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan Berdasarkan Tingkat Golongan Ruang dan Eselon Per 31 Desember 2024.....	18
Tabel 1.10	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024	21
Tabel 1.11	Rincian Pengeluaran Keuangan Daerah Kabupaten Katingan TA. 2024.....	23
Tabel 1.12	Rincian Belanja Urusan Wajib Kabupaten Katingan Tahun 2024.....	25
Tabel 1.13	Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024	30
Tabel 1.14	Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	50
Tabel 1.15	Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2024.....	55
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Menggunakan Indikator Kinerja makro	1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	3
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	44
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2024	55
Tabel 2.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Satu	60
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah	61
Tabel 2.7	Perbandingan Indikator Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah	62
Tabel 2.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Kedua	68



Tabel 2.9	Target dan Realisasi Indikator Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing tahun 2022-2024.....	69
Tabel 2.10	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026.....	70
Tabel 2.11	Pembangunan dan Renovasi Sekolah.....	72
Tabel 2.12	Beasiswa Atau Bantuan Biaya Pendidikan.....	73
Tabel 2.13	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Ketiga.....	80
Tabel 2.14	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar yang Merata untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dari tahun 2022-2024	81
Tabel 2.15	Perbandingan Kinerja Realisasi Indikator Indikator Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar yang Merata untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar terhadap Target Akhir RPD 2024-2026	82
Tabel 2.16	Perbandingan dengan Kabupaten Katingan dengan Nasional	83
Tabel 2.17	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Keempat.....	87
Tabel 2.18	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bermasyarakat Melalui Pendekatan Sosial Budaya Lokal 2024-2026	88
Tabel 2.19	Perbandingan Indikator Sasaran Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bermasyarakat Melalui Pendekatan Sosial Budaya Lokal Target Akhir RPD 2024-2026	89
Tabel 2.20	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Kelima	92
Tabel 2.21	Target Dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Tahun 2022-2024	93
Tabel 2.22	Perbandingan Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026	93
Tabel 2.23	Perbandingan Realisasi Indikator Kabupaten Dengan Provinsi dan Nasional.....	94
Tabel 2.24	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Kelima	96
Tabel 2.25	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana Daerah Tahun 2022-2024.....	97
Tabel 2.26	Perbandingan Indeks Risiko Bencana (IRB) terhadap Target Akhir RPD 2024-2026.....	97



Tabel 2.27	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Ketujuh.....	99
Tabel 2.28	Realisasi Komponen Penilaian SAKIP dari Tahun 2022-2023	100
Tabel 2.29	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2022-2024	100
Tabel 2.30	Perbandingan Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Akuntabel Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026	101
Tabel 2.31	Reformasi Birokrasi tahun 2023	103
Tabel 2.32	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Kedelapan	110
Tabel 2.33	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat Tahun 2022-2024	111
Tabel 2.34	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat terhadap Target Akhir RPD 2024-2026.....	112
Tabel 2.35	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2024.....	119
Tabel 3.1	Laporan Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR) Kabupaten Katingan.....	1
Tabel 4.1	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.....	2
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	2
Tabel 4.3	Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	3
Tabel 4.4	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	7
Tabel 4.5	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	9
Tabel 4.6	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	9
Tabel 4.7	Jumlah Pegawai Menurut Tugas Pokok dan Fungsi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2024.....	11
Tabel 4.8	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2024.....	12
Tabel 4.9	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	22
Tabel 4.10	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	23
Tabel 4.11	Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum.....	23



Tabel 4.12	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	25
Tabel 4.13	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	26
Tabel 4.14	Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	26
Tabel 4.15	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan	28
Tabel 4.16	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	29
Tabel 4.17	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	30
Tabel 4.18	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana.....	34
Tabel 4.19	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana.....	35
Tabel 4.20	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana.....	37
Tabel 4.21	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	41
Tabel 4.22	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	41
Tabel 4.23	Alokasi Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.....	42



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indikator Angka Harapan Hidup dan Persentase Penduduk miskin.....	71
Grafik 2.2	Persentase penduduk miskin	72
Grafik 2.3	Nilai SAKIP Kabupaten Katingan dan rata-rata nasional	102





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional Bupati Katingan selaku Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan kata lain, LPPD merupakan gambaran kinerja tahunan yang merupakan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD), dan pengendaliannya yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD



tersebut akan menjadi umpan balik utama yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintah daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menegaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan pencapaian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 ini, merupakan hasil dari kinerja masing-masing Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Katingan. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 ini memberikan penegasan atas pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 terhadap Indikator yang termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dan rencana kerja dari masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024.

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Katingan merupakan salah satu Kabupaten dari 13 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Katingan beribukota di Kasongan dan merayakan Hari Jadi setiap tanggal 20 Juli dan Kabupaten Katingan terdiri atas 13 kecamatan, 7 kelurahan dan 154 desa.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Katingan terletak diantara $112^{\circ}00'$ BT – $0^{\circ} 20'$ LS dan $113^{\circ} 45'$ BT – $3^{\circ} 30'$ LS, secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Gunung Mas; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.



Wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi strategis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yaitu:

- Terletak di jalan trans Kalimantan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Katingan pada masa yang akan datang.
- Kabupaten Katingan yang secara geografis berbatasan dengan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah penyangga atau hinterland bagi pengembangan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
- Implikasi tidak langsung mengakibatkan Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan, menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi pola dan jalur pergerakan kegiatan penduduk menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan dilihat secara topografi Kabupaten Katingan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

- Bagian Selatan merupakan daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian 0 - 50 m dari permukaan laut;
- Bagian Tengah merupakan dataran dengan ketinggian 50 – 200 m dari permukaan laut; dan
- Bagian Utara merupakan perbukitan dengan ketinggian 200 – 1.500 m dari permukaan laut.

Secara hidrologi Kabupaten Katingan dialiri oleh sungai besar yang membentang dan mengalir dari Utara ke Selatan yang berakhir di laut Jawa dengan panjang yang dapat dilayari ± 650 Km dengan anak-anak Sungai Katingan yang dapat dilayari adalah:

- Sungai Kalanaman, dengan panjang ± 35 Km;
- Sungai Samba, dengan panjang ± 100 Km;
- Sungai Hiran, dengan panjang ± 75 Km;
- Sungai Bemban, dengan panjang ± 18 Km;
- Sungai Sanamang, dengan panjang ± 23 Km;
- Sungai Mahop, dengan panjang ± 13 Km;
- Sungai Bulan, dengan panjang ± 29 Km;
- Sungai Kamipang, dengan panjang ± 12 Km; dan

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Katingan terbagi menjadi 13 Kecamatan, 154 Desa dan 7 Kelurahan dengan luas wilayah Kabupaten Katingan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

berdasarkan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 sebesar 17.500 km² atau 1.750.000 ha**, sedangkan berdasarkan perkembangan tata batas wilayah sampai Tahun 2023 luas Kabupaten Katingan menjadi **20.393,69 km² atau 20.393.690 ha** dengan luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Katingan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kel	Luas wilayah	
					Km2	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Katingan Kuala	Pegatan	14	2	1.483,71	7,28
2	Mendawai	Mendawai	7	-	2.392,06	11,73
3	Kamipang	Baun Bango	9	-	2.854,34	14,00
4	Tasik Payawan	Petak Bahandang	8	-	808,26	3,96
5	Katingan Hilir	Kasongan	6	2	665,80	3,62
6	Tewang S. Garing	Pendahara	9	1	900,34	4,41
7	Pulau Malan	Buntut Bali	14	-	649,30	3,18
8	Katingan Tengah	Tumbang Samba	15	1	1.635,47	8,02
9	Sanaman Mantikei	Tumbang Kaman	14	-	1.413,48	6,93
10	Petak Malai	Tumbang Baraoi	7	-	2.997,93	14,70
11	Marikit	Tumbang Hiran	18	-	2.123,48	10,41
12	Katingan Hulu	Tumbang Sanamang	22	1	1.475,30	7,23
13	Bukit Raya	Tumbang Kajamei	11	-	994,22	4,88
TOTAL			154	7	20.393,69	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Katingan, Tahun 2024

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Katingan Tahun 2024 berjumlah 181.963 jiwa. Distribusi penduduk per kecamatan pada Tahun 2024, Kecamatan Katingan Hilir, Katingan Tengah, dan Katingan Kuala merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak. Sementara Kecamatan Petak Malai, Bukit Raya, dan Mendawai merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Secara umum di semua Kecamatan, jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berikut gambaran jumlah penduduk Kabupaten Katingan berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk orang/Km².



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jumlah penduduk berdasarkan luas wilayah, laju pertumbuhan dan persentase penduduk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah penduduk Kabupaten Katingan
berdasarkan luas wilayah, laju pertumbuhan dan persentase penduduk Tahun 2024

Kecamatan	Luas wilayah		Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2023	Persentase Penduduk
	Km2	%			
1	2	3	4	5	6
KAMIPANG	2.854,34	14,00	7.721	0,4	4,24
KATINGAN HILIR	665,8	3,26	44.790	0,86	24,61
TEWANG SANGALANG GARING	900,34	4,41	15.059	0,51	8,28
PULAU MALAN	649,3	3,18	11.612	0,33	6,38
KATINGAN TENGAH	1.635,47	8,02	31.094	0,4	17,09
SANAMAN MANTIKEI	1.413,48	6,93	12.328	1,03	6,78
MARIKIT	2.123,48	10,41	7.891	0,54	4,34
KATINGAN HULU	1.475,30	7,23	9.367	0,77	5,15
MENDAWAI	2.392,06	11,73	4.732	0,39	2,6
KATINGAN KUALA	1.483,71	7,28	20.303	0,05	11,16
TASIK PAYAWAN	808,26	3,96	8.992	0,45	4,94
PETAK MALAI	2.997,93	14,70	4.012	0,6	2,2
BUKIT RAYA	994,22	4,88	4.062	0,54	2,23
Jumlah	20.393,69	100,00	181.963	0,56	100

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Sedangkan bila dilihat dari komposisi penduduk dan jenis kelamin per kecamatan pada akhir Tahun 2024 penduduk laki-laki berjumlah 94.401 orang dan perempuan berjumlah 87.562 orang dengan struktur usia sebagai berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	0-4	6.322	5.755	12.077
2	5-9	8.833	8.274	17.107
3	10-14	9.299	8.654	17.953



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
4	15-19	8.358	8.204	16.562
5	20-24	8.315	8.012	16.327
6	25-29	7.497	6.905	14.402
7	30-34	7.416	7.001	14.417
8	35-39	7.472	7.016	14.488
9	40-44	7.654	6.956	14.610
10	45-49	6.668	5.870	12.538
11	50-54	5.520	4.706	10.226
12	55-59	4.253	3.619	7.872
13	60-64	2.802	2.467	5.269
14	65-69	1.742	1.761	3.503
15	70-74	1.140	1.164	2.304
16	>=75	1.110	1.198	2.308
	JUMLAH	94.401	87.562	181.963

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Katingan, Tahun 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Kabupaten Katingan terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, 154 desa dan 7 kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Daftar Nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan se Kabupaten Katingan

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	2	3	4
1	Kecamatan Katingan Kuala	1. Pegatan Hilir	1. Jaya Makmur
		2. Pegatan Hulu	2. Subur Indah
			3. Kampung Keramat
			4. Singam Raya
			5. Bangun Jaya
			6. Kampung Tengah
			7. Kampung Baru



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

			8. Setia Mulia
			9. Sebangau Jaya
			10. Sungai Kaki
			11. Selat Banning
			12. Makmur Utama
			13. Bumi Subur
			14. Bakung Raya
2.	Kecamatan Mendawai	-	1. Telok Sebulu
			2. Mendawai
			3. Kampung Melayu
			4. Tewang Kampung
			5. Mekar Tani
			6. Parigi
			7. Tumbang Bulan
3.	Kecamatan Kamipang	-	1. Galinggang
			2. Tampelas
			3. Telaga
			4. Perupuk
			5. Karuing
			6. Jahanjang
			7. Tumbang Runen
			8. Baun Bango
			9. Asem Kumbang
4.	Kecamatan Tasik Payawan	-	1. Talingke
			2. Hiyang Bana
			3. Petak Bahandang
			4. Handiwung



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

			5. Tumbang Panggo
			6. Tewang Tampang
			7. Luwuk Kanan
			8. Luwuk Kiri
5.	Kecamatan Katingan Hilir	1. Kasongan Baru	1. Tewang Kadamba
		2. Kasongan Lama	2. Tumbang Liting
			3. Talian Kereng
			4. Banut Kalanaman
			5. Telangkah
			6. Hampalit
6.	Kecamatan T. Sangalang Garing	1. Pendahara	1. Tewang Beringin
			2. Hapalam
			3. Tewang Rangas
			4. Bangkuang
			5. Tarusan Danum
			6. Tumbang Tarusan
			7. Tewang Rangkang
			8. Tewang Menyangen
			9. Karya Unggang
7.	Kecamatan Pulau Malan	-	1. Tewang Papari
			2. Tewang Derayu
			3. Buntut Bali
			4. Kuluk Bali
			5. Manduing Taheta
			6. Manduing Lama
			7. Tumbang Banjang
			8. Tumbang Lawang



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

			9. Dahian Tunggal
			10. Tewang Karangan
			11. Tumbang Tungku
			12. Geragu
			13. Tumbang Tanjung
			14. Tura
8.	Kecamatan Katingan Tengah	1. Samba Kahayan	1. Mirah Kalanaman
			2. Tumbang Lahang
			3. Tewang Panjang
			4. Petak Puti
			5. Telok
			6. Samba Danum
			7. Samba Bakumpai
			8. Samba Katung
			9. Napu Sahur
			10. Batu Badinding
			11. Rantau Asem
			12. Tumbang Kalemei
			13. Tumbang Marak
			14. Tumbang Hangei
			15. Tumbang Pariyei
9.	Kecamatan Sanaman Mantikei	-	1. Dehes
			2. Tumbang Labehu
			3. Tumbang Kaman
			4. Tumbang Manggu
			5. Kamanto
			6. Kuluk Habuhus



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

			7. Tumbang Kanei
			8. Tumbang Taranei
			9. Tumbang Kawei
			10. Tumbang Manggara
			11. Tumbang Pangka
			12. Tumbang Atei
			13. Daya Manunggal
			14. Rantau Bangkian
10.	Kecamatan Marikit	-	1. Rantau Mandurei
			2. Tumbang Paku
			3. Buntut Leleng
			4. Kuluk Leleng
			5. Rangan Surai
			6. Tumbang Hiran
			7. Tumbang Pahanei
			8. Tumbang Dakei
			9. Rangan Burih
			10. Tumbang Bemban
			11. Tumbang Lambi
			12. Rangan Tangko
			13. Tumbang Taei
			14. Tumbang Malawan
			15. Sabaung
			16. Tumbang Tundu
			17. Tumbang Tabulus
			18. Batu Panahan
11.	Kecamatan Katingan Hulu	1. Tumbang Sanamang	1. Rangan Ranjing



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

			2. Tumbang Labaning
			3. Batu Bango
			4. Penda Tanggaring Lama
			5. Penda Tanggaring baru
			6. Tumbang Hangei II
			7. Tumbang Jiga
			8. Tumbang Kabayan
			9. Sei Nanjan
			10. Rantau Bahai
			11. Rantau Puka
			12. Teluk Tampang
			13. Tumbang Salaman
			14. Tumbang Kuai
			15. Kuluk Sapangi
			16. Dehes Asem
			17. Rangan Kawit
			18. Kiham Batang
			19. Tumbang Mangketai
			20. Tumbang Manangei
			21. Tumbang Mahop
			22. Tumbang Sabetung
12.	Kecamatan Petak Malai	-	1. Tumbang Baraoi
			2. Batu Tukan
			3. Tumbang Tangoi
			4. Tumbang Jala
			5. Batu Badak
			6. Nusa Kutau



			7. Tumbang Habangoi
13.	Kecamatan Bukit Raya		1. Tumbang Kataei
			2. Tumbang Dahuei
			3. Rantau Pandan
			4. Tumbang Gaei
			5. Penda Nange
			6. Rangan Rondan
			7. Rangan Bahekan
			8. Tumbang Kajamei
			9. Tumbang Karuei
			10. Tanjung Batik
			11. Tumbang Kaburai

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan, Tahun 2024

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Katingan melaksanakan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tahun 2019, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, baik yang menyangkut tipologi maupun adanya penggabungan terhadap beberapa Perangkat Daerah. Adanya perubahan tersebut berdampak pula pada perubahan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Staf ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan:

Tabel 1.5
Perangkat Daerah Kabupaten Katingan

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
Sekretariat	2
Dinas	16
Badan	6
Inspektorat	1



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1
UPT RSUD	2
Kecamatan	13
Total	41

Sumber : BKPSDM Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No. 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Daerah pembentukannya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6

Deskripsi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Pembentukannya

NO	SEKRETARIAT / DINAS / BADAN / KANTOR / UPT	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL PENETAPAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT :		
	1. Sekretariat Daerah	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
2.	DINAS :		
	1. Dinas Pendidikan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	2. Dinas Kesehatan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	5. Dinas Sosial	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	6. Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	7. Dinas Lingkungan Hidup	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SEKRETARIAT / DINAS / BADAN / KANTOR / UPT	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL PENETAPAN
1	2	3	4
	9. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	10. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	11. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	13. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	14. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	16. Dinas Perhubungan dan Perikanan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
3.	INSPEKTORAT DAN BADAN :		
	1. Inspektorat	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	3. Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	4. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	6. Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	7. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
6.	KECAMATAN		
	1. Kecamatan Katingan Kuala	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	2. Kecamatan Mendawai	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	3. Kecamatan Kamipang	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	4. Kecamatan Tasik Payawan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	5. Kecamatan Katingan Hilir	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	6. Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	7. Kecamatan Pulau Malan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	8. Kecamatan Katingan Tengah	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SEKRETARIAT / DINAS / BADAN / KANTOR / UPT	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	TANGGAL PENETAPAN
1	2	3	4
	9. Kecamatan Sanaman Mantikei	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	10. Kecamatan Marikit	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	11. Kecamatan Katingan Hulu	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	12. Kecamatan Petak Malai	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	13. Kecamatan Bukit Raya	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
7.	KELURAHAN		
	1. Kelurahan Pegatan Hilir	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	2. Kelurahan Pegatan Hulu	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	3. Kelurahan Kasongan Baru	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	4. Kelurahan Kasongan Lama	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	5. Kelurahan Pendahara	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	6. Kelurahan Samba Kahayan	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023
	7. Kelurahan Tumbang Sanamang	Perda No. 1 Tahun 2023	3 – 1 – 2023

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Sedangkan untuk data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan berdasarkan Unit Organisasi dan Jenis Kelamin serta Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan
Berdasarkan Unit Organisasi dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat Daerah	51	49	100
2	Sekretariat DPRD	12	10	22
3	Inspektorat	31	10	41
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	9	22
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	3	12
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21	16	37
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	3	21
8	Badan Pendapatan Daerah	17	8	25



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17	11	28
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	14	11	25
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	11	20
12	Dinas Kesehatan	158	415	573
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59	37	96
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	16	8	24
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	18	3	21
16	Dinas Lingkungan Hidup	20	12	32
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36	6	42
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16	10	26
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	27	37
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	4	17
21	Dinas Pendidikan	638	974	1612
22	Dinas Perhubungan dan Perikanan	20	5	25
23	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13	9	22
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	22	6	28
25	Dinas Sosial	9	8	17
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	43	4	47
27	UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan	46	125	171
28	UPT RSUD Pratama	5	14	19
29	Kecamatan Bukit Raya	9	0	9
30	Kecamatan Kamipang	12	4	16
31	Kecamatan Katingan Hilir	21	11	32
32	Kecamatan Katingan Hulu	18	4	22
33	Kecamatan Katingan Kuala	12	4	16
34	Kecamatan Katingan Tengah	16	3	19
35	Kecamatan Marikit	11	2	13
36	Kecamatan Mendawai	9	3	12



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
37	Kecamatan Petak Malai	6	0	6
38	Kecamatan Pulau Malan	11	5	16
39	Kecamatan Sanaman Mantikei	10	5	15
40	Kecamatan Tasik Payawan	8	4	12
41	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	13	8	21
TOTAL		TOTAL	1510	1861

Sumber : BKPSDM Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Untuk data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.8
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024

PENDIDIKAN		JENIS KELAMIN		GRAND TOTAL	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
SARJANA	S.3	1	0	1	2468
	S.2	61	62	122	
	S.1	1028	1255	2284	
	D.4	12	49	61	
DIPLOMA / SARJANA MUDA	D.3	158	404	562	587
	D.2	9	13	22	
	D.1	0	3	3	
	SLTA	230	74	304	304
	SLTP	7	1	8	8
	SD	4	0	4	4
Grand Total		1510	1861	3371	

Sumber : BKPSDM Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Untuk data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan eselon dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.9
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan
Berdasarkan Tingkat Golongan Ruang dan Eselon Per 31 Desember 2024

Gol Ruang		Jabatan Eselon / Pejabat Struktural						Fungsional Tertentu	Pelaksana (Fungsional Umum)	Grand Total
		Eselon II.a	Eselon II.b	Eselon III.a	Eselon III.b	Eselon IV.a	Eselon IV.b			
GOL. IV	IV/d	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	IV/c	0	19	0	0	0	0	9	0	28
	IV/b	0	8	23	1	0	0	300	0	332
	IV/a	0	0	21	59	4	0	274	7	365
GOL. III	III/d	0	0	0	34	103	1	646	58	842
	III/c	0	0	0	1	64	18	361	91	535
	III/b	0	0	0	0	8	17	520	81	626
	III/a	0	0	0	0	0	2	131	148	281
GOL. II	II/d	0	0	0	0	0	0	145	66	211
	II/c	0	0	0	0	0	0	29	62	91
	II/b	0	0	0	0	0	0	11	18	29
	II/a	0	0	0	0	0	0	17	8	25
GOL. I	I/d	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	I/c	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grand Total		1	27	44	95	179	38	2443	544	3371

Sumber : BKPSDM Kabupaten Katingan, Tahun 2024

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Katingan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Daerah (APBD) Tahun 2024 ini dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sehingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024.

Komposisi APBD 2024 diproyeksikan sebagai satu kesatuan format sebagai berikut:

1. **Pendapatan Daerah**, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pendapatan Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi : Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan Pendapatan Lainnya.
2. **Belanja Daerah**, terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai (termasuk Tambahan Penghasilan); Belanja Subsidi, Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintahan Desa dan Partai Politik; Belanja Tak Terduga.
 - b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Modal.
3. **Pembiayaan**, terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).
 - b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Sebagaimana penyajian tahun sebelumnya, penyajian realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 masih berupa laporan pertanggungjawaban APBD yang belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).



a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Gambaran umum pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2018-2023, sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Katingan diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru, kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Katingan untuk periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada peraturan daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud dengan arah pengelolaan pendapatan daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah berikut :

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
 - 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 - 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
 - 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
 - 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien
 - 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
 - 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah
 - 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik.
 - 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi terkait.
- 2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil adalah :

- 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam hal pelaksanaan pendapatan daerah sebagai sarana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara kumulatif Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp.1.670.124.076.534,00** terealisasi sebesar **Rp.1.585.130.487.628,46** atau **94,91%**. Selengkapnya rincian target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.10
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	1.670.124.076.534,00	1.585.130.487.628,46	94,91
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.959.495.534,00	68.100.042.488,46	57,73
	Pendapatan Pajak Daerah	49.876.586.982,00	22.060.219.369,80	44,23
	Pendapatan Retribusi Daerah	6.556.973.058,00	8.131.580.489,00	124,01
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.192.215.980,00	4.579.510.360,83	22,68
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.333.719.514,00	33.328.732.268,83	80,63
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.552.114.581.000,00	1.508.968.514.600,00	97,22
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	1.488.910.581.000,00	1.456.801.628.468,00	97,84
	Dana Perimbangan	1.350.006.016.000,00	1.317.897.063.468,00	97,62



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal	5.890.545.000,00	5.890.545.000,00	100,00
	Dana Desa (DD)	133.014.020.000,00	133.014.020.000,00	100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah :	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54
	Pendapatan Bagi Hasil	63.204.000.000,00	52.166.886.132,00	82,54
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	50.000.000,00	8.061.930.540,00	16.123,86
	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	378.281.230,00	756,56
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.683.649.310,00	0,00

Sumber : BAPENDA Kabupaten Katingan, Tahun 2024 (Data sementara / unaudited)

b. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efesiensi, transparan dan akuntabel, selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Arah pengelolaan belanja daerah sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Katingan tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- Efisiensi dan efektivitas anggaran;
- Prioritas;
- Tolak ukur dan target kinerja;
- Optimalisasi belanja langsung;
- Transparan dan Akuntabel.



Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/ instansi terkait didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan sarana dan infrastruktur yang terus menerus dilaksanakan diharapkan semakin dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Katingan sudah mulai meningkat dan diapresiasi oleh investor yang terlihat dari semakin besarnya investasi yang ditanamkan di Kabupaten Katingan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan kondisi riil, baik dari sisi pendapatan (pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah), sisi belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) dan sisi pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan). Disamping itu, juga memperhatikan perkembangan dari tahun ke tahun besaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan maupun dana yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan pengeluaran keuangan daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024, dimana rencana anggaran belanja daerah dialokasikan sebesar **Rp.1.726.720.071.534,00** terealisasi sebesar **Rp. 1.398.955.542.636,69** atau sebesar **81,02%**. Target anggaran dan realisasi belanja daerah sebagai berikut :

Tabel 1.11
Rincian Pengeluaran Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	1,726,720,071,534.00	1,398,955,542,636.69	81.02
BELANJA OPERASI	1,103,509,571,207.18	929,461,197,192.75	84.23



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian		Anggaran	Realisasi	(%)
1		2	3	4
	Belanja Pegawai	579,390,704,751.00	505,590,161,230.58	87.26
	Belanja Barang dan Jasa	412,475,281,252.78	349,966,084,925.17	84.85
	Belanja Subsidi	2,680,150,000.00	2,536,412,800.00	94.64
	Belanja Hibah	105,685,085,505.40	68,842,688,548.00	65.14
	Belanja Bantuan Sosial	3,278,349,698.00	2,525,849,689.00	77.05
BELANJA MODAL		387,781,730,490.82	373,741,292,966.24	96.38
	Belanja Modal Tanah	1,500,000,000.00	1,478,500,000.00	70.86
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112,913,340,540.54	106,160,523,574.80	94.02
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162,045,369,748.00	160,277,154,014.83	98.91
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	110,735,899,202.28	105,242,194,176.61	95.04
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	236,331,000.00	235,131,200.00	99.49
	Belanja Modal Aset Lainnya	350,790,000.00	347,790,000.00	99.14
BELANJA TIDAK TERDUGA		8,232,227,250.00	1,605,409,963.00	19.50
	Belanja Tidak Terduga	8,232,227,250.00	1,605,409,963.00	19.50
BELANJA TRANSFER		227,196,542,586.00	94,147,642,514.70	41.44
	Belanja Bagi Hasil	6,481,006,786.00	6,446,126,714.70	96.46
	Belanja Bantuan Keuangan	220,715,535,800.00	87,701,515,800.00	39.74
SURPLUS / (DEFISIT)		(56,595,995,000.00)	73,848,965,556.18	(130.48)
PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56,595,995,000.00	0.00	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO		56,595,995,000.00	0.00	0.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0.00	73,848,965,556.18	0.00

Sumber : BKAD Kabupaten Katingan, Tahun 2024 (data sementara / unaudited)

Ringkasan anggaran, realisasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan fungsi Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 1.726.720.071.534,00** realisasi sebesar **Rp. 1.398.949.757.838,69** atau **81,02 %** dengan uraian belanja masing-masing pelaksanaan urusan pemerintahan dan fungsi sebagai berikut :



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 1.12
Rincian Belanja Urusan Wajib Kabupaten Katingan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
TOTAL BELANJA DAERAH		1.726.720.071.534	1.398.949.757.838,69	81,02
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.034.221.616.429	893.267.976.135,39	86,37
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	443.128.029.132	347.267.212.477,51	78,37
	Dinas Pendidikan	443.128.029.132	347.267.212.477,51	78,37
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	369.060.754.700	336.667.932.262,97	91,22
	Dinas Kesehatan	258.324.067.117	255.143.124.813,00	98,77
	RSUD Mas Amsyar	49.357.051.399	47.033.699.564,00	95,29
	BLUD RSUD Mas Amsyar	27.988.268.537	27.038.671.451,96	96,61
	UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan I	1.767.502.100	167.057.077,00	9,45
	UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan II	1.666.009.655	155.525.638,00	9,34
	UPTD Kecamatan Mendawai Puskesmas Mendawai	1.508.270.000,00	153.282.054,00	10,16
	UPTD Kecamatan Kamipang Puskesmas Baun Bango	1.488.244.497	169.322.536,00	11,38
	UPTD Kecamatan Tasik Payawan Puskesmas Petak Bahandang	1.360.478.644	160.588.464,00	11,80
	UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan	1.528.219.202	160.664.350,00	10,51
	UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan II	1.443.839.952	137.873.784,00	9,55
	UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kereng Pangi	1.865.462.450	134.974.432,00	7,24
	UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing Puskesmas Pendahara	1.637.600.000	167.312.946,00	10,22
	UPTD Kecamatan Pulau Malan Puskesmas Buntut Bali	1.671.856.974	187.819.044,00	11,23
	UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba	2.346.597.002	236.600.640,00	10,08
	UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei Puskesmas Tumbang Kaman	2.027.305.728	173.736.234,00	8,57
	UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran	1.726.231.100	176.915.008,00	10,25
	UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi	1.437.000.000	158.796.935,00	11,05
	UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang	1.650.171.098	191.769.650,00	11,62
	UPTD Kecamatan Bukit Raya Puskesmas Tumbang Kajamei	1.094.198.999	167.399.859,00	15,30
	RSUD Pratama Tumbang Samba	7.172.380.239	4.752.797.783,00	66,27



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	134.565.352.446	127.691.397.298,91	94,89
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.565.352.446	127.691.397.298,91	94,89
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.317.272.736	32.473.452.752,00	94,63
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	34.317.272.736	32.473.452.752,00	94,63
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	43.587.271.215	41.310.748.356,00	94,78
	Satuan Polisi Pamong Praja	33.818.703.808	33.109.895.323,00	97,90
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.768.567.407	8.200.853.033,00	83,95
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	9.562.936.200	7.857.232.988,00	82,16
	Dinas Sosial	9.562.936.200	7.857.232.988,00	82,16
B.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	112.801.960.475	104.127.599.682,97	92,31
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	8.775.486.656,00	7.636.901.854,00	87,03
	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8.775.486.656,00	7.636.901.854,00	87,03
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.280.662.824	7.958.240.784,00	96,11
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.280.662.824	7.958.240.784,00	96,11
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	694.792.474	560.993.139,00	80,74
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	694.792.474	560.993.139,00	80,74
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1.135.000.000	1.056.739.659,00	93,10
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.135.000.000	1.056.739.659,00	93,10
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	18.542.066.160	17.655.044.143,00	95,22
	Dinas Lingkungan Hidup	18.542.066.160	17.655.044.143,00	95,22
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.567.942.527	7.383.448.057,00	97,56
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.567.942.527	7.383.448.057,00	97,56
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.581.780.376	8.274.767.939,97	96,42
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.581.780.376	8.274.767.939,97	96,42



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.973.303.000	3.527.913.036,00	70,94
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.973.303.000	3.527.913.036,00	70,94
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	8.053.944.112	7.594.012.014,00	94,29
	Dinas Perhubungan dan Perikanan	8.053.944.112	7.594.012.014,00	94,29
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	11.149.168.095	10.876.625.558,00	97,56
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11.149.168.095	10.876.625.558,00	97,56
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.437.236.257	6.214.288.842,00	83,56
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	7.437.236.257	6.214.288.842,00	83,56
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	9.928.313.412	8.914.102.264,00	89,78
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.928.313.412	8.914.102.264,00	89,78
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.116.220.000	6.902.740.184,00	97,00
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.116.220.000	6.902.740.184,00	97,00
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	142.570.664	139.080.610,00	97,55
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	142.570.664	139.080.610,00	97,55
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	128.940.000	124.504.420,00	96,56
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	128.940.000	124.504.420,00	96,56
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	8.996.501.104	8.261.713.642,00	91,83
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.996.501.104	8.261.713.642,00	91,83
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	897.370.588	716.116.739,00	79,80
	Sekretariat Daerah	897.370.588	716.116.739,00	79,80
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	400.662.226	330.366.798,00	82,46
	Sekretariat daerah	400.662.226	330.366.798,00	82,46
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31.714.436.110	27.087.985.398,00	85,41
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	5.366.998.518	5.241.607.206,00	97,66



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Dinas Perhubungan dan Perikanan	5.366.998.518	5.241.607.206,00	97,66
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	2.067.053.338	2.060.954.500,00	99,70
	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	2.067.053.338	2.060.954.500,00	99,70
28	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	18.590.354.318	14.342.537.774,00	77,15
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.590.354.318	14.342.537.774,00	77,15
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.733.199.420	1.731.320.747,00	99,89
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.733.199.420	1.731.320.747,00	99,89
30	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.803.830.516	3.558.576.083,0	93,55
	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.398.120.588	3.208.605.961,00	94,42
	UPT. Industri Rotan Hampangen	405.709.928	349.970.122,00	86,26
31	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	153.000.000	152.989.088,00	99,99
	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	153.000.000	152.989.088,00	99,99
D.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	120.073.783.185	105.141.546.494,00	87,56
32	Sekretariat Daerah	63.973.313.932	59.901.948.938,00	93,64
33	Sekretariat DPRD	56.100.469.253	45.239.597.556,00	80,64
E.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	325.923.825.987	173.422.123.290,83	53,21
34	PERENCANAAN	11.855.038.562	10.158.729.279,00	85,69
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	11.855.038.562	10.158.729.279,00	85,69
35	KEUANGAN	301.822.827.946	152.167.393.273,83	50,42
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	290.457.249.537	141.502.825.980,58	48,72
	Badan Pendapatan Daerah	11.365.578.409	10.664.567.293,25	93,83
36	KEPEGAWAIAN	10.416.267.079	9.589.172.034,00	92,06
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.416.267.079	9.589.172.034,00	92,06
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	628.316.000	328.047.860,00	52,21
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	628.316.000	328.047.860,00	52,21
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.201.376.400	1.178.780.844,00	98,12
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.201.376.400	1.178.780.844,00	98,12



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
39	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.939.895.457	12.373.797.618,00	88,77
	Inspektorat Daerah	13.939.895.457	12.373.797.618,00	88,77
40	UNSUR KEWILAYAHAN	52.667.030.923	49.359.799.929,50	93,72
	KECAMATAN	52.667.030.923	49.359.799.929,50	93,72
	Kecamatan Petak Malai	2.754.665.616	2.343.577.777,00	85,08
	Kecamatan Kamipang	3.829.449.331	3.802.580.656,00	99,30
	Kecamatan Tasik Payawan	3.290.941.019	3.121.165.327,00	94,84
	Kecamatan Katingan Hilir	5.793.115.124	5.516.989.137,00	95,23
	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	5.113.087.318	4.865.761.868,00	95,16
	Kecamatan Pulau Malan	3.775.506.047	3.553.729.345,00	94,13
	Kecamatan Sanaman Mantikei	3.618.048.323	3.503.444.121,00	96,83
	Kecamatan Marikit	2.839.558.215	2.660.424.321,00	93,69
	Kecamatan Katingan Hulu	3.912.551.323	3.782.915.282,00	96,69
	Kecamatan Mendawai	2.869.084.655	2.684.883.318,00	93,58
	Kecamatan Bukit Raya	2.882.070.627	2.511.190.273,00	87,13
	Kecamatan Katingan Kuala	4.126.615.443	3.765.217.469,00	91,24
	Kecamatan Katingan Tengah	5.185.908.662	4.678.706.181,00	90,22
	Kelurahan Kasongan Lama	421.302.370	387.251.176,00	91,92
	Kelurahan Kasongan Baru	648.615.000	599.765.247,00	92,47
	Kelurahan Pegatan Hilir	321.302.370	312.298.000,00	97,20
	Kelurahan Pegatan Hulu	321.302.370	312.290.000,00	97,20
	Kelurahan Pendahara	321.302.370	319.835.457,00	99,54
	Kelurahan Samba Kahayan	321.302.370	317.596.230,00	98,85
	Kelurahan Tumbang Sanamang	321.302.370	320.178.744,50	99,65
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	35.377.522.968	34.168.929.290,00	96,58
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.377.522.968	34.168.929.290,00	96,58
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.377.522.968	34.168.929.290,00	96,58

Sumber : BKAD Kabupaten Katingan, Tahun 2024 (Data Audited)

Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan, **Pembiayaan**, terdiri dari :

- Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).
- Pengeluaran Pembiayaan, mencakup Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.



Tabel 1.13

Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024

Uraian		Anggaran	Realisasi	(%)
1		2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH		56,595,995,000.00	0.00	0.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		56,595,995,000.00	0.00	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	56,595,995,000.00	0.00	0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	100,00

Sumber : BKAD Kabupaten Katingan, Tahun 2024 (Data Audited)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

Pemetaan permasalahan pembangunan menjadi sangat strategis sebab menjadi agenda pembangunan yang harus dicari penyelesaiannya. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Katingan 5 (lima) tahun kedepan.

1) Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan



yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun permasalahan pembangunan dimaksud, sebagai berikut:

A. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)

a) Pendidikan

Untuk memahami sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Katingan yang optimal, maka kesenjangan pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Bila dikaitkan dengan kedua indikator tersebut, maka secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Katingan yang dapat mempengaruhinya dapat dilihat dari hal-hal berikut :

1. Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;
2. Rasio murid terhadap guru sudah terpenuhi akan tetapi sebaran tenaga pengajar di semua jenjang tidak merata, kebanyakan menumpuk di daerah perkotaan dan tempat-tempat tertentu;
3. Masih kurangnya ketersediaan fasilitas dan perlengkapan belajar siswa dan sarana pendidikan;
4. Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

b) Kesehatan

Untuk permasalahan kesehatan sendiri, dapat diukur dengan dua indikator yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan derajat kesehatan masyarakat Katingan, yakni:

1. Masih Tingginya Angka Kematian Balita
2. Masih tingginya Angka Kematian Ibu



B. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Katingan. Berdasarkan data BPS dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Katingan 4,99% pada Tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,26.%, penanggulangan masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi prioritas. Untuk itu perlu dilakukan penanganan yang paripurna bagi penanganan kemiskinan di Kabupaten Katingan. Hal yang penting untuk penanganan masalah tersebut, yaitu menemukan dan mengenali apa penyebab dari kemiskinan tersebut. Berikut ini beberapa hal masalah dan akar masalah yang memberi kontribusi bagi masalah pokok kemiskinan.

a) Pendidikan

Pendidikan masyarakat Kabupaten Katingan kebanyakan tamat SD dan tidak tamat SMP sehingga peluang masuk pada pasar tenaga kerja menjadi kecil. Bangunan SMP rata – rata berada di ibukota Kecamatan dan Sekolah Satu Atap SD-SMP hanya ada di desa-desa relatif besar. Begitu pula dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK hanya ada di ibukota Kecamatan dan terbanyak di Kota Kasongan.

b) Sosial

- 1) Masih rendahnya kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan, data tahun 2017 menunjukkan bahwa permasalahan KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan baru mencapai 14,3 persen .
- 2) Tidak adanya penambahan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

c) Ketenagakerjaan

Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka pada Tahun 2020 yaitu 5,69% akan tetapi pada Tahun 2021 terjadi penurunan yaitu 5,50% sehingga tidak berpengaruh untuk persentase tingkat kemiskinan.



C. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong perekonomian

Pertanian Kabupaten Katingan merupakan daerah penyangga atau hinterland bagi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai gerbang dari dan menuju ibukota provinsi, Katingan memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan dan memasarkan potensi dan hasil kekayaan alam yang dimilikinya. Pengembangan dan pemasaran potensi ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Katingan. Data LPE Kabupaten Katingan pada selama 6 (enam) tahun terakhir umumnya paling tinggi atau kedua lebih tinggi bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Katingan mengalami kontraksi hingga 3,25 persen, yang berarti jauh lebih dalam dibanding provinsi maupun nasional. Kontraksi perekonomian nasional, provinsi dan Kabupaten Katingan merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020.

Meski demikian, Gini Ratio Katingan termasuk yang paling rendah di Provinsi Kalimantan Tengah yang menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan relatif baik. Demikian pula dengan pendapatan perkapita penduduk Katingan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Semua ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan ke depannya.

Memperhatikan data-data yang ada, berikut potensi kekayaan alam Katingan yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan dikelola secara optimal dan lestari, sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Katingan. Beberapa masalah yang melatarbelakangi belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam tersebut dijelaskan berikut ini.

a) Pertanian

Salah satu sumber daya alam yang potensial dikembangkan yaitu pertanian dalam arti luas, termasuk pula pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor ini selain menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak, juga memberikan



kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Katingan. Meski kontribusi lapangan usaha sektor ini besar terhadap PDRB, namun pada sektor pertanian berdasarkan data pada Tabel 2.131, diketahui bahwa Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 produksi nya mencapai 71.443 Ton, namun pada tahun 2020 turun menjadi 48.459 Ton. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh menurunnya juga Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya, dimana pada tahun 2020 luas areal tanaman padi hanya mencapai 17.741 ha.

Selain itu, terjadi penurunan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Katingan, dimana pada tahun 2017 Skor Pola Pangan Harapan mencapai 85,500, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi hanya 81,860.

Dari segi infrastruktur pendukung, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pertanian di pedesaan masih rendah. Data pada Tabel 2.84 menunjukkan sudah ada upaya untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah, namun persentasenya belum mencapai seluruh areal sawah yang ada. Selain itu, terbatasnya ketersediaan jalan yang baik pada daerah-daerah sentra pertanian juga menjadi kendala. Permasalahan ini menyebabkan petani kesulitan membawa hasil pertaniannya dan cenderung berbiaya tinggi saat memproduksi hasil panennya. Peluang ini sering dimanfaatkan para tengkulak dan pedagang dari luar daerah untuk mengambil keuntungan dari keterbatasan ini. Gambaran kondisi ini nampak ada di wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dilihat dari aspek ekonomi, secara umum ada beberapa penyebab produk pertanian tanaman pangan, palawija dan hortikultura mengalami penurunan antara lain:



- Kurangnya upaya untuk pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan hortikultura lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing.
- Lemahnya kelembagaan pertanian.
- Kurangnya bantuan permodalan untuk usaha tani.
- Masih rendahnya aktivitas penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan baru dalam budidaya pertanian.
- Kurangnya kemampuan mengolah lahan dengan teknologi pertanian yang baik.

Selain pertanian, sektor perikanan merupakan bagian atau sub sektor dari pertanian yang mempunyai potensi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Potensi perikanan tangkap sungai, darat dan laut di Kabupaten Katingan memiliki peluang usaha bagi masyarakat terutama dalam budidaya perikanan tambak pada perairan umum dan laut. Besarnya potensi pengembangan sektor perikanan secara umum dalam lima tahun terakhir justru mengalami kecenderungan penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Munculnya permasalahan dalam upaya peningkatan sektor perikanan antara lain:

- Kurangnya pemanfaatan sumber daya perikanan tambak, kolam dan keramba.
- Masih kurangnya produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- Keterbatasan tenaga penyuluh dan penyuluhan perikanan.
- Kurangnya pengelolaan hasil produksi perikanan.
- Terbatasnya permodalan dan akses perbankan.
- Terbatasnya ketersediaan bibit ikan yang dikembangkan oleh UPT. Pembibitan Ikan Hampalit.



a. Kehutanan

Katingan masih memiliki kawasan hutan yang luas dengan berbagai keanekaragamahayatnya. Namun dengan semakin banyaknya aktivitas manusia menyebabkan luas tutupan lahan dan hutan di Katingan semakin tahun semakin berkurang, seperti penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan lahan pertanian, serta bencana kebakaran hutan/lahan. Untuk menyelamatkan potensi hutan di Katingan, perlu diadakan tinjauan terhadap permasalahan yang ada, yakni:

1) Kewenangan pengelolaan hutan Sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan hutan diserahkan ke pemerintah Provinsi. Selain itu terbitnya PP No.18 Tahun 2016 mempertegas aturan tersebut yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan kehutanan sebab tidak memiliki tanaman hutan raya. Akibatnya, pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten.

2) Semakin luasnya lahan kritis di kawasan hutan

Kehutanan saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Katingan, dimana wilayah yang ada hampir sebagian besar merupakan wilayah hutan. Namun permasalahan yang dihadapi adalah semakin meluasnya kawasan hutan dengan lahan kritis, dimana pada tahun 2015 luas total hutan dan lahan kritis mencapai 546.351,16 ha, sementara itu tahun 2016 meningkat menjadi 1.991.696,14 Ha. Jumlah ini sangat mengkhawatirkan karena peningkatan lahan kritis tersebut hampir mencapai 50%.

3) Masih tingginya kawasan kerusakan hutan

Berdasarkan data pada BAB II, dapat dilihat bahwa Luas Kerusakan Kawasan Hutan pada tahun 2016 masih sangat tinggi yaitu mencapai 500.372,35 dengan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan mencapai 27,22 persen.



- 4) Menurunnya kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB
Berdasarkan Sektor kehutanan mengalami peningkatan, tetapi secara umum besarnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir ini justru mengalami perlambatan dari angka 4,75% di tahun 2015 menjadi 3,32% di tahun 2020. Artinya peran sub sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diprediksi juga semakin menurun berbanding lurus dengan hilangnya kewenangan daerah dalam mengelola perijinan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten Katingan karena sejak tahun 2017 diambil alih oleh pemerintah provinsi.

b. Energi dan Sumber Daya Mineral

Katingan juga memiliki potensi energi dan kandungan mineral yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi, seperti bahan tambang batubara, emas (dan mineral pengikut seperti perak), bijih besi, pasir zircón (termasuk ilmenit dan rutil), galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Potensi ini hanya sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan dan dikelola. Adapun permasalahan dalam mengelola potensi energi dan sumber daya mineral Katingan, yakni:

- 1) Kewenangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral Sama seperti kehutanan, kewenangan mengenai energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan Pemda Katingan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan mengenai energi dan sumber daya mineral sebab tidak memiliki panas bumi. Sehingga pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan.
- 2) Masih tingginya luas area penambangan Liar Pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan sekaligus memunculkan permasalahan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat



pemanfaatan bahan tambang yang tidak terkendali menyebabkan areal pertambangan tanpa liar di Kabupaten Katingan yang masih tinggi, baik itu disepanjang bantaransungai maupun di tempat lainnya. Aksi tambang tanpa izin ini menyebabkan sungai dan tanah tercemar limbah merkuri serta banyak hutan dan lahan yang hilang dan berganti menjadi kawasan tandus. Luas wilayah pertambangan tanpa izin pada tahun 2017 yaitu 1.700 Ha.

- 3) Menurunnya Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Jika dilihat dari Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB, tahun 2016 kontribusinya mencapai 8,60%, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi hanya 5,32. Hal ini dipengaruhi oleh banyak lahan yang sudah mendapatkan izin tambang namun sampai saat ini masih belum beroperasi.

D. Rendahnya upaya pengembangan sektor pariwisata

Secara umum, Kabupaten Katingan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya, terutama bila dikaitkan dengan posisi dan kondisi alamnya. Namun potensi tersebut belum didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana wisata, SDM pengelola pariwisata, perlindungan situs dan pelestarian budaya lokal, serta inventarisasi data potensi wisata yang potensial dikembangkan, maka hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Katingan, baik nusantara maupun mancanegara.

Kondisi demikian juga diakibatkan oleh jumlah hunian wisawatan di Katingan yang masih sangat minim. Hanya terdata di lokasi tertentu seperti TN. Sebangau di Punggualas dan objek wisata Danau Bulat, tetapi hunian kamar hotel di Kota Kasongan dan sekitarnya tidak ada. Adapun kawasan pemukiman warga seperti di Desa Keruing sebagai bagian dari atraksi wisata juga belum layak untuk dijadikan tempat inap karena prasarana pendukungnya terbatas, seperti air bersih dan kamar mandi yang terstandar.



Konsisi demikian diakibatkan oleh jumlah hunian wisawatan di Katingan masih minim. Hanya terdata di lokasi tertentu seperti TN. Sebangau di Punggualas dan objek wisata Danau Bulat, tetapi hunian kamar hotel di Kota Kasongan dan sekitarnya tidak ada. Adapun kawasan pemukiman warga seperti di Desa Keruing sebagai bagian dari atraksi wisata juga belum layak untuk dijadikan tempat inap karena prasarana pendukungnya terbatas, seperti air bersih dan kamar mandi yang terstandar.

E. Masih rendahnya daya saing dan investasi daerah

Salah satu ukuran untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah adalah jumlah dan nilai investasi skala nasional/asing yang masuk di daerah tersebut. Keterbukaan daerah dan pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu kunci bagi pihak swasta untuk berinvestasi di Katingan.

Perkembangan pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi seperti koperasi aktif, UMKM dan UKM cukup memprihatinkan. Rendahnya kualitas pengelolaan koperasi terlihat dari masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak ada aktivitasnya.

Adapun produktivitas tenaga kerja di Katingan trendnya terus meningkat, dan capaian tertinggi berada pada lapangan usaha Sektor Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan. Namun sektor ini hanya menyerap tenaga kerja dengan angka di bawah 1% karena sektor ini memerlukan kapasitas dan keterampilan tertentu. Sebaliknya, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak tetapi dari segi produktivitas berada di urutan ke-8 terkecil dari sembilan sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Katingan.

F. Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan

Berbagai aktivitas pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur. Infrastruktur di suatu daerah diyakini merupakan komponen pendukung pembangunan yang tidak dapat diabaikan. Tak dapat dipungkiri, seringkali keberhasilan pembangunan suatu wilayah



ditandai dengan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang baik dan cakupan yang luas dan merata.

Posisi Kabupaten Katingan yang sangat strategis sebab dekat dengan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, sudah selayaknya memiliki infrastruktur yang baik. Namun kondisi yang ada, masih ditemui keterbatasan penyediaan infrastruktur wilayah. Masalah dan akar masalah yang menyebabkan kondisi ini, antara lain:

a. Pekerjaan Umum

1) Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik.

Permasalahan yang muncul dalam aspek pekerjaan umum adalah 74,16 persen kondisi jalan yang ada pada Kabupaten Katingan masih dalam kondisi tidak baik. Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik ini disebabkan oleh minimnya pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan

2) Masih Tingginya Panjang Jalan dilalui Roda Empat yang berupa Permukaan Tanah

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kabupaten Katingan hingga pada tahun 2024 yang berupa permukaan aspal sepanjang 279,941 km dan permukaan tanah sepanjang 483,682 km. Penjelasan mengenai kondisi ini oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, yaitu apabila dana terbatas dan skala prioritas adalah menambah panjang jalan, maka tidak diprioritaskan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan. Kondisi jalan tanah dapat diabaikan, yang ingin dicapai adalah jalan fungsional. Apabila beban jalan meningkat, maka kondisi jalan sebaiknya ditingkatkan. Namun bila kondisi jalan tanah masih dilalui oleh kendaraan dengan beban yang tidak besar, maka masih bisa dalam bentuk pemeliharaan, tidak dalam bentuk peningkatan, terutama bila pendanaan terbatas

3) Cenderung menurunnya persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

4) Masih rendahnya pelayanan air bersih dan air minum layak.



b. Perumahan dan Pemukiman

1) Masih rendahnya Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio Permukiman Layak Huni tersebut masih terbilang sangat rendah

2) Belum meratanya penataan kawasan permukiman dan perumahan

Kualitas penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan menjadi salah satu permasalahan dalam penataan kawasan permukiman dan perumahan sehat di Katingan. Saat ini, sudah mulai tumbuh keinginan masyarakat Katingan untuk hidup sehat bahkan sampai ke pedesaan. Sampai akhir tahun 2017 tercatat dari 154 desa dan 7 kelurahan yang ada, baru 114 desa/kelurahan atau 70,81% yang melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Adapun total jumlah pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal yang sudah terbangun baru 315 unit. Jumlah ini masih belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat mengingat dengan semakin bakyat tumbuh kawasan pemukiman baru atau perluasan kawasan yang ada, akan meningkatkan kebutuhan akan pengolahan limbah dan sanitasi yang layak.

Dari data yang ada infrastruktur yang tersedia untuk pembuangan sampah ternyata masih sangat kurang. Baru 42,14% tempat pembuangan sampah yang mampu dilayani, dimana dari total volume produksi sampah yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 47.457 m³/hari yang dihasilkan, baru sekitar 20.000 m³/hari yang mampu ditangani. Hal ini pula yang menyebabkan Kabupaten Katingan dalam periode lima tahun ini belum memperoleh penghargaan bidang kebersihan kota atau Kalpataru

3) Masih rendahnya Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN

Hal yang menyulitkan untuk melaksanakan pemantauan pelayanan listrik ini, sebab tidak ada lagi kewenangan Kabupaten Katingan dalam hal energi sejak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18



Tahun 2016

c. Perhubungan

1) Menurunnya Jumlah Terminal Angkutan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perhubungan adalah masih belum terdapatnya terminal Kelas A dan B, saat ini di Kabupaten Katingan baru terdapat terminal Kelas C

2) Tidak tersedianya Pelabuhan Laut yang memadai

Kabupaten Katingan memiliki aliran sungai yang membentang dari ujung wilayah utara dan bermuara langsung ke Laut Jawa di wilayah selatan. Artinya, dengan topografi wilayah seperti ini, Katingan potensial memiliki pelabuhan laut yang dapat digunakan untuk bongkar muat barang dan lalu lintas antar pulau. Kondisi yang ideal dikembangkan berada di sekitar Pulau Damar atau Bajungkal di daerah Sei Kaki. Namun akses jalan darat menuju wilayah ini belum ada, mengakibatkan rencana pengembangan Pelabuhan Pegatan-Mendawai belum bisa dilaksanakan. Selain terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD Katingan, juga rencana pembangunan jalan dan pelabuhan ini memerlukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak

d. Komunikasi dan Informatika

Penyediaan sarana layanan komunikasi dan jaringan internet saat ini dirasakan semakin penting. Namun keterbatasan ketersediaan layanan ini menjadi kendala ketersediaan informasi dan layanan elektronik bagi masyarakat. Kondisi geografi Katingan yang sangat luas dan banyaknya posisi desa/kelurahan yang terpencil menjadi faktor utama terbatasnya layanan komunikasi di Katingan. Lambatnya perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Katingan

G. Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Pemerintah Kabupaten menunjukkan peningkatan, Pada tahun 2024 nilai SAKIP Kabupaten



Katingan mencapai predikat B. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Katingan diperbaiki dan ditingkatkan. Salah satu penyebab masih rendahnya kinerja tersebut adalah belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi dan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada beberapa faktor, yakni :

- a. Terbatasnya kapasitas ASN Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jumlah ASN Kabupaten Katingan sampai akhir tahun 2024 tercatat berjumlah 3.371 orang. Bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Katingan, jumlah ini tidaklah berimbang. Belum lagi adanya ketidakseimbangan antara penambahan dengan pengurangan pegawai menjadi penyebab munculnya permasalahan ini. Pengadaan CPNS sebagai jalur utama dalam menambahkan pegawai tidak efektif dikarenakan adanya kebijakan moratorium CPNS. Penambahan pegawai yang dimungkinkan melalui penerimaan mutasi pegawai dari luar daerah dan pengangkatan pegawai non PNS. Penerimaan mutasi dari luar daerah tidak bisa ditentukan targetnya karena Pemerintah Daerah yang sebatas pasif menerima secara selektif atas permohonan mutasi yang masuk. Sedangkan pengangkatan pegawai non PNS terkendala oleh belum adanya regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai salah satu kategori Aparatur Sipil Negara selain PNS. Disisi lain masih terdapat pegawai yang belum memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan. Data menunjukkan masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. Dengan diambil alihnya kewenangan melaksanakan diklat penjenjangan oleh Provinsi mengakibatkan kesempatan mengikuti diklat kepemimpinan terbatas. Selain itu, terbatasnya pendanaan bagi ASN mengikuti diklatdiklat teknis menyebabkan banyak ASN Katingan yang tidak bisa mencapai minimal 30 jam pelatihan dalam setahun.

Belum optimalnya kualitas perencanaan



Sampai saat ini e-planning belum dapat diintegrasikan dengan ebudgeting. Permasalahan yang dihadapi karena aplikasi dalam mengintegrasikan kedua sistem ini memerlukan dukungan input data dan informasi seperti dokumen RPJMD, RKPD, dan RENSTRA perangkat daerah. ASN disemua perangkat daerah masih belum semuanya mampu menyusun program dan kegiatan yang signifikan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kelemahan dalam kondisi ini adalah belum tersedianya tenaga ASN yang menjadi fungsional perencana

- b. Belum memadai antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja pembangunan.

Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah (sebagaimana tabel 3.1) ditunjukkan dari persentase realisasi peningkatan daerah terutama dari pos PAD yang rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun ini mencapai 1,2%. Demikian pula di pos Dana Perimbangan rata-rata pertumbuhannya mencapai 8,7%, bahkan untuk item DAU justru mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata hingga -3,6%. Disisi lain, nilai belanja daerah dan ratio peningkatannya terus mengalami kenaikan (sebagaimana Tabel 3.2). Yang paling signifikan terlihat pada belanja tidak langsung, rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir mencapai 15,9% dan untuk belanja langsung bagi pembangunan mencapai 6,1%. Kondisi ini bila dibiarkan akan menimbulkan limitasi dalam kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan

- c. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.

Pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah juga belum optimal. Indikasi dari masalah ini adalah masih banyak temuan hasil pemeriksaan BPK sampai 2016 baik yang belum ditindaklanjuti maupun temuan baru. Kondisi ini dimungkinkan karena faktor implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum optimal, terkelola dan terukur. Kedepan pelaksanaan atas praktik pengendalian intern perlu dilakukan dengan baik melibatkan seluruh unit organisasi dan



efektivitas pengendalian perlu dievaluasi untuk memetakan penanganan atas kelemahan yang ada

d. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

Saat ini tuntutan masyarakat untuk adanya peningkatan layanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari aparat pemerintah sebagai pelayan publik semakin tinggi. Apalagi bila kondisi ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh beberapa OPD Kabupaten Katingan masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan belum terpenuhinya serta masih rendah kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

b. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Katingan periode tahun 2024-2026 merupakan bagian dari pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 pada periode/tahap keempat dan pedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap keempat RPJPD tersebut, maka akan disusun tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.

Adapun visi pembangunan daerah sesuai RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah :

“KABUPATEN KATINGAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA”

Dimaksudkan dengan Kabupaten Katingan yang maju, didasarkan beberapa ukuran, yaitu:



1. Ditinjau dari aspek ekonomi, kemajuan dapat diukur dari:
 - a) Tingkat pendapatan yang tinggi dan pembagiannya yang relative merata.
 - b) Peran sektor industri pengolahan terutama pengolahan hasil-hasil pertanian sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja.
 - c) Dalam proses produksi, berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa;
 - d) Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi;
 - e) Perekonomiannya stabil sehingga gejolak yang berasal dari dalam maupun luar dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.
2. Tingkat kemajuan masyarakat Kabupaten Katingan juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial dan politik, yaitu:
 - a) Makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.
 - b) Laju pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya dukung wilayah.
 - c) Angka harapan hidup yang lebih tinggi;
 - d) Kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.
 - e) Memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.
 - f) Peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan.
 - g) Tersedianya infrastruktur dasar dan fisik yang semakin maju.

Kabupaten Katingan yang dibangun bukan hanya yang maju, tetapi juga mandiri. Langkah awal kemandirian dalam konteks Kabupaten Katingan dapat diterjemahkan sebagai keberhasilan pemekaran wilayah. Oleh karena itu, pembangunan sebagai upaya mengisi pemekaran haruslah merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian merupakan



konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Karena itu membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi dan pemerataannya. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

3. Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada :

- a) Ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; Masyarakat yang maju, mandiri berarti juga masyarakat yang produktif dan inovatif, yang tercermin dalam sikap profesional, disiplin, etos kerja tinggi, serta mampu menyesuaikan diri secara bertahap terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai budaya setempat.
- b) Pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah semakin meningkat, sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar menjadi cenderung semakin berkurang;
- c) Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
- d) Apabila karena SDA tidak lagi memungkinkan, telah dipersiapkan keunggulan lain, sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan.
- e) Daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial ekonomi nasional maupun global.

Pembangunan Kabupaten Katingan tidak cukup hanya menuju masyarakat yang mandiri dan maju, melainkan juga masyarakat yang Adil dan Sejahtera.

Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan dan pemerataan merupakan ciri yang harus ditonjolkan dalam pembangunan



Kabupaten Katingan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; peduli terhadap keamanan masyarakat dan lingkungan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, masyarakat yang berkeadilan berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Dimaksud dengan “Sejahtera” yaitu secara materil terpenuhi melalui pertumbuhan (ekonomi) yang terus meningkat diikuti peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, rasa aman masyarakat serta diimbangi dengan pemerataan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan, maka telah ditetapkan 6 (enam) misi sebagaimana di dalam RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pendidikan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan yang semakin meningkat. Pembangunan Sumber Daya Manusia disamping meningkatkan kompetensi (knowledge, skill, attitude) juga meningkatkan derajat kesehatan, dan pendapatan per kapita riil. Adanya peningkatan kualitas SDM sebagai cerminan kemampuan penguasaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Membuka isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten



Katingan secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur: jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dan permukiman, listrik dan air bersih, penerbangan perintis (baik untuk pertahanan/keamanan dan umum/bisnis), akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Katingan.

4. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya (termasuk kemitraan sosial dan kesetia-kawanan sosial), Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin) dan menekan gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui Penegakkan Hukum, Keamanan dan Ketertiban menuju tercipta Kabupaten Katingan yang aman damai dan bersatu, sesuai motto Penyang Hinje Simpei.
5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara bijaksana, menstabilkan keseimbangan ekosistem, menghemat penggunaan SDA, menghentikan pemborosan penggunaan berbagai sumber daya, menghentikan kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan.
6. Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih.



c. Program Pembangunan Daerah

Untuk pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.14
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
1	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan					
1.1	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan	1. Penguatan ekonomi lokal (pertanian, perdagangan, industri kecil dan pariwisata) untuk mendorong keberdayaan masyarakat dan kemandirian ekonomi	<div></div> <div>1. Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan.</div> <div>2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok</div> <div>3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha</div> <div>4. Peningkatan daya tarik pariwisata</div> <div>5. Peningkatan kapasitas kewirausahaan, UMKM dan koperasi</div>	<div>■</div>	<div>■</div>	<div>■</div>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
			6. Peningkatan daya tarik dan iklim investasi yang kondusif serta industrialisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	■	■	■
2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing					
2.1	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	2. Penguatan Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif dan terampil	7. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka Belajar.	■	■	■
			8. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	■	■	■
			9. Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan pelaksanaan perlindungan sosial	■	■	■
			10. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan pemberdayaan tenaga kerja	■	■	■
			11. Peningkatan kualitas anak dan peran perempuan dalam pembangunan	■	■	■
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata					
3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan	3. Penguatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur daerah yang menjangkau seluruh wilayah	12. Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten	■	■	■
			13. Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan	■	■	■




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
	ekonomi dan pelayanan dasar		air minum			
			14. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan	■	■	■
			15. Peningkatan kualitas dan cakupan irigasi daerah	■	■	■
			16. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui penyediaan akses perumahan dan permukiman layak	■	■	■
4	Terwujudnya kondisifitas wilayah dan masyarakat yang berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan)					
4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal.	4. Pemantapan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui upaya pendekatan sosial budaya dan moderasi beragama	17. Pengembangan wawasan kebangsaan dan peningkatan fasilitasi kerukunan umat beragama	■	■	■
			18. Peningkatan koordinasi dan pengawasan trantibumlinmas dalam penegakan peraturan daerah	■	■	■
			19. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan ekspresi kebudayaan dan kearifan lokal	■	■	■
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan					
5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	5. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana	20. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3	■	■	■
			21. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	■	■	■



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
				2024	2024	2026
			22. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	■	■	■
5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah.		23. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	■	■	■
			24. Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana	■	■	■
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel					
6.1	Meningkatnya kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	6. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel	25. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	■	■	■
			26. Penguatan implementasi manajemen ASN	■	■	■
			27. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah	■	■	■
6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		28. Penguatan implementasi SPBE dan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	■	■	■
			29. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	■	■	■
			30. Penguatan pembinaan dan pengawasan desa	■	■	■

Sumber: RPD Kabupaten Katingan 2024-2026



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pada tahun 2024 program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024. Selanjutnya, seluruh program dan kegiatan diupayakan untuk mengakomodir amanat undang-undang dengan fokus pada aspek perencanaan maupun aspek pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dan aspek-aspek pendukung lainnya, seperti penyiapan, pengolahan serta penyajian data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan.

Adapun Rencana kerja Bappedalitbang tahun 2024 mencakup 4 program terdiri 17 kegiatan yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)



- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan-kegiatan :

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Adapun program dan kegiatan kerja pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.15
Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daeah
		Program Pengelolaan Daerah
		Program Pendidkan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3	BLUD Mas Amsyar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Penyelenggaraan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Kawasan Permukiman Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah ha Sub Kegiatan Kerjasama Perbaikan RTLH beserta PSU
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
		Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

		<p>Maksimum dan Tanah Absentee</p> <p>Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</p>
		<p>Program Penatagunaan Tanah</p> <p>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.</p>
		<p>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p> <p>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</p>
		<p>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).</p>
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</p>
		<p>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>
		<p>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p>
		<p>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.</p>
		<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya.</p>
		<p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.</p>
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>
		<p>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>
		<p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p>
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>
		<p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>
		<p>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>
		<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>
		<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>
		<p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>
		<p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>
		<p>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p>
		<p>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan</p>
		<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Program Penanggulangan Bencana
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
9	Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
10	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Program Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai keahripan budaya



		lokal, Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
		Program Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB Petugas Lapangan KB PKB dan PLKB, Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP
		Program Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Program Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB
		Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota, Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

13	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
		Program Pendaftaran Penduduk.
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kerjasama Desa.
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
16	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi



		Program Aplikasi Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
20	Sekretariat Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Penataan Organisasi
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
21	Dinas Perhubungan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
22	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
23	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
24	Kecamatan Marikit	Pgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
25	Kecamatan Sanaman Mantikei	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26	Kecamatan Katingan Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
27	Kecamatan Katingan Hulu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
28	Kecamatan Tasik Payawan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
29	Kecamatan Katingan Kuala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
30	Kecamatan Kamipang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
31	Kecamatan Katingan Hilir	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
32	Kecamatan Pulau Malan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
33	Kecamatan Mendawai	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
34	Kecamatan Bukit Raya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
35	Kecamatan Petak Malai	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
36	Inspektorat Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
		Program Penyelenggaraan Pengawasan.



		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber : Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (diolah), Tahun 2024

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan

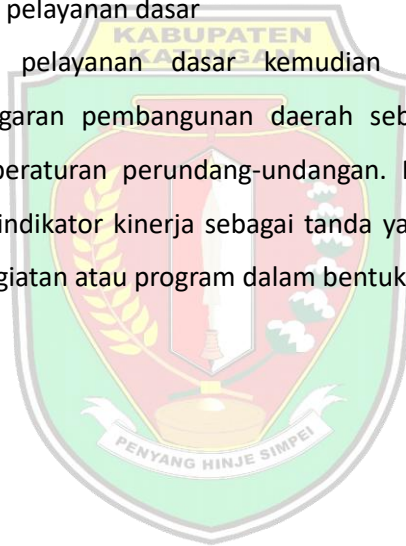


2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

1. Pengumpulan data
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Rencana pemenuhan pelayanan dasar kemudian ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam indikator kinerja sebagai tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.





BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro disini menggunakan indikator kinerja makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) tahun 2024.

Tabel 2.1

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,90	74,37	0,47 poin
2	Angka Kemiskinan	4,99	5,26	0,27 Persen poin
3	Angka Pengangguran	4,96	4,88	-0,12 Persen poin
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,98	4,67	-1.31 Persen poin
5	Pendapatan per Kapita	63.511*	67.939**	4.428 ribu rupiah
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,261	0,253	0,008 poin

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2025



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.





**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDIDIKAN	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{5654}{6658} \times 100\% = 84,92\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 5654</i> <i>B = Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 6658</i></p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	Data Dukung Berupa 1. Tarikan Data Dapodik 2. Tarikan Data Emis 3. Data Disdukcapil
		2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{19612}{21148} \times 100\% = 92,74\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 19.612</i> <i>B = Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 21.148</i></p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	Data Dukung Berupa 1. Tarikan Data Dapodik 2. Tarikan Data Emis 3. Data Disdukcapil
		3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-	$\frac{9128}{10427} \times 100\% = 87,54\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah</i></p>	Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	Data Dukung Berupa 1. Tarikan Data



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 9128 B = Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 10.427		Dapodik 2. Tarikan Data Emis 3. Data Disdukcapil
		4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{2060}{2830} \times 100\% = 72,79\%$ A = Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 2060 B = Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan = 2830	Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	
2.	KESEHATAN	1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{157}{181863} \times 1000 = 0,86$ A = Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 157	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$B = \text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota} = 181963$		
		2) Persentase RS Rujukan Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi} = 2$ $B = \text{Jumlah RS di kabupaten/kota} = 2$	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
		3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{2742}{3226} \times 100\% = 84,99\%$ $A = \text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan} = 2.742$ $B = \text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota} = 3.226$	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
		4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{2109}{3226} \times 100\% = 65,37\%$ $A = \text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan} = 2.109$ $B = \text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota} = 3.226$	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
		5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	$\frac{2416}{3072} \times 100\% = 78,6\%$ $A = \text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar} = 2.416$	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		baru lahir	$B = \text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota} = 3.072$		
		6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{13494}{15502} \times 100\% = 87,0\%$ <p>$A = \text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar} = 13494$ $B = \text{Jumlah balita di kabupaten/kota} = 15502$</p>	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
		7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{26378}{27308} \times 100\% = 96,6\%$ <p>$A = \text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar} = 26378$ $B = \text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota} = 27308$</p>	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
		8) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{100305}{125246} \times 100\% = 80,1\%$ <p>$A = \text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = 100.305$ $B = \text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota} = 125.246$</p>	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{23.355}{24.670} \times 100\% = 94,7\%$ <p><i>A = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 23.355</i> <i>B = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota = 24.670</i></p>	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
		10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{33.457}{36.117} \times 100\% = 92,6\%$ <p><i>A = Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 33.457</i> <i>B = Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 36.117</i></p>	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
		11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{1699}{1706} \times 100\% = 99,6\%$ <p><i>A = Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 1699</i> <i>B = Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 1706</i></p>	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{274}{274} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 274</i> <i>B = Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 274</i>	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
		13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{2023}{2279} \times 100\% = 88,8\%$ <i>A = Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2023</i> <i>B = Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 2279</i>	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
		14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{2942}{3379} \times 100\% = 87,1\%$ <i>A = Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 2942</i> <i>B = Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 3379</i>	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	
3.	PEKERJAAN UMUM	1) Rasio luas kawasan permukiman	$\frac{2.076,20}{22.524,01} \times 100\% = 9,22\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$A = \text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)} = 2.076,20$ $B = \text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)} = 22.524,01$	Kabupaten Katingan	
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ $A = \text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)} = 0 \text{ Ha}$ $B = \text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)} = 0 \text{ Ha}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	Surat Pernyataan
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan	$\frac{14.979}{23.452} \times 100\% = 63,87\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$A = \text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)} = 14.979 \text{ Ha}$ $B = \text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota} = 23.452 \text{ Ha}$	Kabupaten Katingan	
		4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{29.935}{57.985} \times 100\% = 51,62\%$ $A = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota} = 29.935$ $B = \text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut} = 57.985$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	
		5) Persentase jumlah rumah	$\frac{33.923}{43.693} \times 100\% = 77,64\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$A = \text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD} = 33.923$ $B = \text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota} = 43.693$	Dan Pertanahan Kabupaten Katingan	
		6) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{965}{966} \times 100\% = 99,89\%$ $A = \text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya} = 965$ $B = \text{Jumlah IMB yang berlaku} = 966$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	
		7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{301,426 + 18,731}{845,113} \times 100\% = 37,88\%$ $A = \text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap} = 320,157$ $B = \text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota} = 845,113$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	
		8) Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki	$\frac{88}{563} \times 100\% = 15,63\%$ $A = \text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan}$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sertifikat kompetensi	<i>sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</i> = 88 <i>B = Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 563</i>		
		9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{597}{597} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi = 597</i> <i>B = Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 597</i>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan	
4.	PERUMAHAN RAKYAT	1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{0}{431} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0</i> <i>B = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 431</i>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	
		2) Fasilitas penyediaan rumah layak huni	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Rumah Tangga Penerima Fasilitas</i>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bagi masyarakat terdampak relokasi program	<i>Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0</i> <i>B = Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0</i>	Pertanahan Kabupaten Katingan	
		3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{215,79}{273,21} \times 100\% = 78,98\%$ <i>A = Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 215,79 ha</i> <i>B = Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 273,21 ha</i>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Data Dukung Berupa SK Bup. Katingan No 323 Tahun 2019
		4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{4826}{43693} \times 100\% = 11,05\%$ <i>A = Jumlah unit rumah tidak layak huni = 4826</i> <i>B = Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 43693</i>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Data RTLH di Kab. Katingan dan Kajian Pemetaan Kawasan Permukiman
		5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi	$\frac{367}{43693} \times 100\% = 0,84\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$A = \text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU} = 367$ $B = \text{Jumlah unit rumah kab/kota} = 43693$	Pertanahan Kabupaten Katingan	
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah pengaduan yang ditangani} = 4$ $B = \text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk} = 4$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan	
		2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan} = 6$ $B = \text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi} = 6$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan	
		3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{181.963}{181.963} \times 100\% = 100\%$ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 181.963 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 181.963	BPBD Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{181.963}{181.963} \times 100\% = 100\%$ <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 181.963</p> <p>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 181.963</p>	BPBD Kabupaten Katingan	
		5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{1066}{181.963} \times 100\% = 0,59\%$ <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 1066</p> <p>Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana Jumlah = 181.963 jiwa</p>	BPBD Kabupaten Katingan	
		6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{202}{208} \times 100\% = 97,11\%$ <p><i>A = Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan</i></p>	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p><i>Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah = 202</i></p> <p><i>B = Jumlah kejadian kebak ran di kabupaten/kota = 208</i></p>		
		7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap = 11,54 menit	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan	
6.	SOSIAL	1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	<p>$\frac{185}{185} \times 100\% = 100\%$</p> <p><i>A = Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 185</i></p> <p><i>B = Populasi penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 185</i></p>	Dinas Sosial Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		panti (indikator SPM)			
		2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 24 KK</i> <i>B = Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota = 24 KK</i></p>	Dinas Sosial Kabupaten Katingan	
7.	TENAGA KERJA	1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{14}{17} \times 100\% = 82,35\%$ <p><i>A = Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 14</i> <i>B = jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota = 17</i></p>	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	1. Data Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Ta 2022 s.d 2027 2. DPA Perubahan Ta 2024
		2) Persentase Tenaga Kerja	$\frac{129}{11.406} \times 100\% = 1,13\%$	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan	Data Dukung Berupa

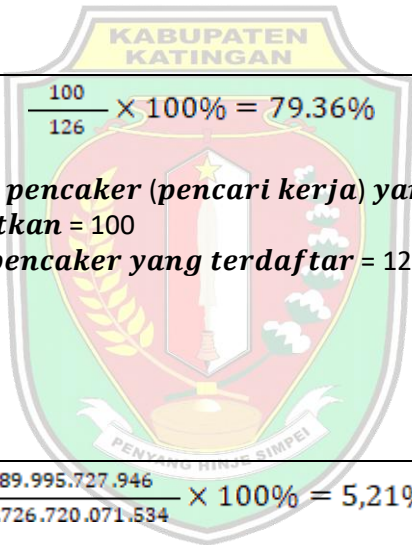


**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bersertifikat Kompetensi	$A = \text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi} = 129$ $B = \text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan} = 11.406$	Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	1. Laporan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Dari Perusahaan 2. Data Tenaga Kerja Keseluruhan Dari Perusahaan
		3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{11.675,8}{11.406} \times 100\% = 102,36\%$ $A = \text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)} = 11.675,8$ $B = \text{Jumlah tenaga kerja} = 11.406$	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	
		4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	$\frac{27}{38} \times 100\% = 71,05\%$ $A = \text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak} = 27$ $B = \text{Jumlah perusahaan} = 38$	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Data Dukung Berupa 1. Jumlah Perusahaan yg telah menerapkan tata kelola



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			kerja yg layak 2. Data Jumlah Perusahaan Ta 2024
		5) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	 $\frac{100}{126} \times 100\% = 79.36\%$ <p><i>A = Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan = 100</i> <i>B = Jumlah pencari yang terdaftar = 126</i></p>	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Data Dukung berupa 1. Jumlah Pencari Kerja yg di tempatkan 2. Data Jumlah Pencari Kerja AK.I ta 2024
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{89.995.727.946}{1.726.720.071.534} \times 100\% = 5,21\%$ <p><i>A = Jumlah ARG pada belanja langsung Operasional dan Modal APBD = Rp. 89.995.727.946</i> <i>B = Jumlah seluruh belanja Operasional dan Modal di APBD = Rp. 1.726.720.071.534</i></p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Dukung Berupa Anggaran Responsif Gender Kab. Katingan Tahun 2024



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 24</i> <i>B = Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 24</i></p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta DataPengendali Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Dukung Berupa Data Tabel Kecamatan Terhadap Kasus Anak
		3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{11}{87.562} \times 100\% = 0,1\%$ <p><i>A = Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 11</i> <i>B = Jumlah penduduk perempuan = 87.562</i></p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Data Jumlah Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Dukung Berupa Tabel Data Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan/anak dan data Dari Disdukcapil Jumlah penduduk Perempuan
9	PANGAN	1) Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/	$\frac{13,01 \text{ Ton}}{28,93 \text{ Ton}} \times 100\% = 44,97\%$ <p><i>A</i> <i>A = Jumlah cadangan pangan = 13,01 Ton</i> <i>B = Jumlah kebutuhan pangan = 28,93 Ton</i></p>	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Katingan	Data Dukung Berupa Berita Acara Rekonsiliasi Stock Beras




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		jagung sesuai kebutuhan)			
10.	PERTANAHAN	1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{130.792.259,35}{130.792.259,35} \times 100\% = 100\%$ <p> A = Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi = 130.792.259,35 B = Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi = 130.792.259,35 </p>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Data DukungKKPR Sumber data dari Dinas PTSP
		2) Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$ <p> A = Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 8 B = Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 8 </p>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	1. Sk Bupati No 590/553 Ta 2023 tentang penetapan lokasi tanah untuk pembangunan rumah sakit Pratama di desa Bagun

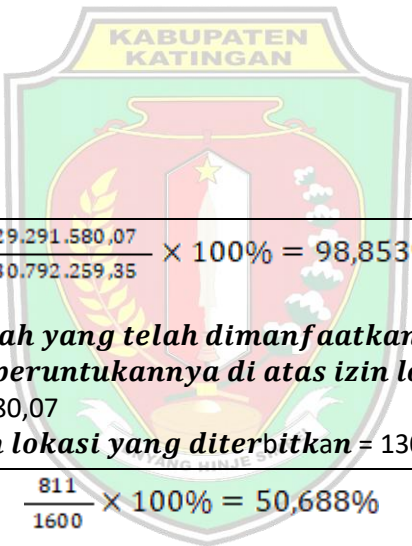


**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>Jaya</p> <p>2. Sk Bupati No 590/455 Ta 2023 tentang penetapan lokasi tanah untuk pembangunan Pasar Tbg Samba di Desa Samba Danum</p> <p>3. Sk Bupati No 590/410 Ta 2023 tentang penetapan lokasi tanah untuk pembangunan SMP N 6 Kat. Hilir di Desa Tbg Liting</p> <p>4. Sk Bupati No 590/432 Ta</p>




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2023 tentang penetapan tanah untuk pembangunan Tanah SDN 3 Samba Danum di Desa Samba Danum.
		3) Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{129.291.580,07}{130.792.259,35} \times 100\% = 98,853\%$ <p><i>A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi = 129.291.580,07</i> <i>B = Luas izin lokasi yang diterbitkan = 130.792.259,35</i></p>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Data Dukung Dari Dinas PTSP/data KKPR Kab. Katingan
		4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan	$\frac{811}{1600} \times 100\% = 50,688\%$ <p><i>A = Jumlah penerima tanah objek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha = 811</i> <i>B = Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1600</i></p>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Data Dukung Berupa 1. SK Bupati No. 590/581 Ta. 2023 Desa Bangkuang 2. SK Bupati No. 590/495 Ta

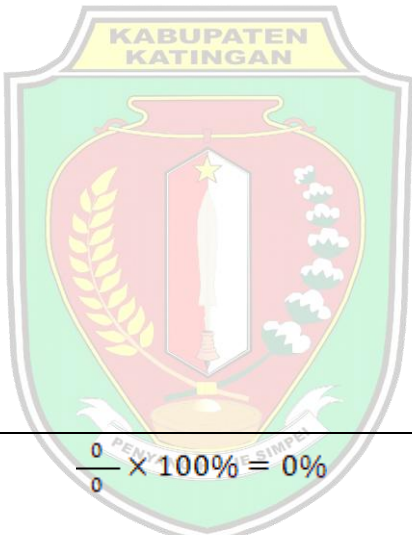


**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tanah Absentee			2023 Kelurahan Pendahara, Desa Twg Rangkang, Tbg Terusan dan Tarusan Danum 3. SK Bupati No. 590/582 Ta. 2023 Desa Kampung Baru 4. SK Bupati No. 590/583 Ta 2023 Desa Sungai Kaki 5. SK Bupati No. 590/523 Ta 2023 Desa Kampung Baru, Sugai Kaki, Selat Baning & Pegatan Hulu 6. SK Bupati No. 590/522 Ta



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2023 Desa Mendawai, Teluik Sebuluh, Kampung melayu & Tewang Kampung 7. SK Bupati No. 475/578 Ta 2023 Desa Kampung Baru/Eks unit Permukiman Kampung Baru
		5) Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p> <i>A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah = 0</i> <i>B = Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah = 0</i> </p>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	Surat Peryataan
		6) Penanganan sengketa tanah	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	Data Dukung Berupa



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		garapan yang dilakukan melalui mediasi	$A = \text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangan} = 2$ $B = \text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan} = 2$	Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan	1. Berita acara Mediasi Sengketa Tanah An. Sinceasi dan Debora
11.	LINGKUNGAN HIDUP	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	$\text{IKLH Prov} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{ITH} \times 0,219).$ IKA = Indeks Kualitas Air = 50.74 Poin IKU = Indeks Kualitas Udara = 95.20 Poin ITH = Indeks Tutupan Hutan = 87.54 Poin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota= 76.81 Poin	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan	
		2) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{20.380,53 \text{ m}^3}{28.534,36 \text{ m}^3} \times 100\% = 71,42\%$ $A = \text{Total volume sampah yang dapat ditangani} = 20.380,53 \text{ m}^3$ $B = \text{total volume timbunan sampah kabupaten/kota} = 28.534,36 \text{ m}^3$	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan	
		3) Ketaatan penanggung jawab usaha	$\frac{11}{55} \times 100\% = 20,00\%$ $A = \text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau}$	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	<p><i>kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota = 11</i></p> <p><i>B = usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 55</i></p>		
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1) Perekaman KTP Elektronik	$\frac{125.773}{127.899} \times 100\% = 98,337\%$ <p><i>A = Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 125.773</i></p> <p><i>B = Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 127.899</i></p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	
		2) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{33.963}{54.074} \times 100\% = 62,81\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 33.963</i></p> <p><i>B = Jumlah anak usia 0-17 tahun = 54.064</i></p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	
		3) Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{56.559}{57.357} \times 100\% = 98,61\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah</i></p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p><i>memiliki akta lahir</i> = 56.559 <i>B = Jumlah anak usia 0-18 tahun</i> = 57.357</p>		
		4) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	<p>$\frac{3}{24} \times 100\% = 12,50\%$</p> <p><i>A = Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</i> = 3 <i>B = Jumlah OPD</i> = 24</p>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	<p>$\frac{7}{32} \times 100\% = 21,87\%$</p> <p><i>A = Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2023</i> = 7 <i>B = Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun - n) 2024</i> = 32</p>	Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan	
		2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	<p>$\frac{6}{92} \times 100\% = 6,52\%$</p> <p><i>A = Jumlah desa berkembang yang memenuhi</i></p>	Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			ktiteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 6 B = Jumlah desa berkembang (per-awal tahun - n) = 92		
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1) TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR = Angka Kelahiran Total = 2,41 ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur = 55,2 bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu = 87.562 pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama = 87.562 i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19=8204 untuk kelompok umur 20-24, i=8012 untuk kelompok Umur 45-49) = 587 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000 = 100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan	Data Dukung Berupa Tabel TFR dan ASFR 15-19 Tahun Kab. Katingan
		2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{25.564}{32.345} \times 100\% = 79,04\%$ A = Jumlah peserta KB aktif modern = 25.564 B = Jumlah Pasangan Usia Subur = 32.345	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{1649}{32.345} \times 100\% = 5,104\%$ <p><i>A = Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani, = 1649</i> <i>B = Jumlah Pasangan Usia Subur = 32.345</i></p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan	
15.	PERHUBUNGAN	1) Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	<p>Rasio Konektivitas = 0 + 100 IK2 X Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>Rasio konektivitas kabupaten/kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) 0 + 100 = 100</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p>	Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan	Surat Pernyataan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>		
		2) V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota = 0	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Katingan	Surat Keterangan
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	$\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo =</i></p>	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	26 $B = \text{Jumlah OPD} = 26$		
		2) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi} = 9$ $B = \text{Jumlah layanan publik} = 9$	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Katingan	
		3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{122.505}{181.963} \times 100\% = 67,32\%$ $A = \text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota} = 122.505$ $B = \text{Jumlah penduduk} = 181.963$	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{96}{299} \times 100\% = 32,10\%$ <p><i>A = Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset = 96</i> <i>B = Jumlah seluruh koperasi = 299</i></p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan	
		2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{864}{4283} \times 100\% = 20,17\%$ <p><i>A = Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 864</i> <i>B = Jumlah usaha mikro keseluruhan = 4.283</i></p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan	
18.	PENANAMAN MODAL	1) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{7.889.311.019.639,10 - 7.560.236.239.639,10}{329.074.780.000,00} \times 100\% = 4,35\%$ <p><i>A = (Jumlah inevtasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 329.074.780.000,00</i> <i>B = Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi = 7.560.236.239.639,10</i></p>	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan	
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1) Tingkat partisipasi pemuda dalam	$\frac{6350}{46.102} \times 100\% = 13,77\%$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kegiatan ekonomi mandiri	$A = (\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota} = 6350$ $B = \text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota} = 46.102$	Katingan	
		2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{4091}{46.102} \times 100\% = 8,87\%$ $A = (\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota} = 4091$ $B = \text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota} = 46.102$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Katingan	
		3) Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional = 10 mendali	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Katingan	
20.	STATISTIK	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan	$\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah} = 40$	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Katingan	




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$B = \text{Jumlah OPD} = 40$		
		2) Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$ $A = (\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah} = 40$ $B = \text{Jumlah OPD} = 40$	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Katingan	
21.	PERSANDIAN	1) Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{347}{645} \times 100\% = 53,79\%$ $A = (\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi} = 347$ $B = \text{Jumlah area penilaian} = 645$	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Katingan	
22.	KEBUDAYAAN	1) Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$ $A = (\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan} = 7$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata	Data Dukung Berupa SK Bupati No.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$B = \text{Jumlah cagar budaya yang terdata} = 7$ 	Kabupaten Katingan	430/22 Ta 2024 Tentang Pengangkatan Juru Bicara Cagar Budaya Sk Bupati No. 430/178 Ta 2022 Tentang Penetapan Cagar Budaya Kab. Katingan
23.	PERPUSTAKAAN	1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai TGM = 65.69% Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Bagian Perpustakaan Dan Arsip Setda Kabupaten Katingan	
		2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks = 62,21%	Bagian Perpustakaan Dan Arsip Setda Kabupaten Katingan	
24.	KEARSIPAN	1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai	$T = (100 + 100 + 100 + 0)/4 = 75$	Bagian Perpustakaan Dan Arsip Setda Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>T = Tingkat ketersediaan arsip : 75%</p> <p>a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip : 100</p> <p>i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip : 100</p> <p>s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik : 100</p> <p>j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN : 0</p>		
		2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	<p>$T = (m\ 0 + b\ 0 + g\ 100 + a\ 0 + c\ 0 + i\ 0) / 6 = 16,6\%$</p> <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban 16,6%</p> <p>m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK = 0</p> <p>b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK = 0</p> <p>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK = 100</p>	Bagian Perpustakaan Dan Arsip Setda Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK = 0</p> <p>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK = 0</p> <p>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK = 0</p>		
25	PERHUBUNGAN DAN PERIKANAN	1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	<p>Jumlah = 83.650 (Ton) + 4.280,320+ 2.250,470= 90.180,790</p> <p>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota = 83.650 (Ton)</p> <p>Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 4.280,320</p>	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Katingan	
26.	PARIWISATA	1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{89 - 92}{92} \times 100\% = -3,26\%$ <p>A = Jumlah wisatawan tahun n-Jumlah wisatawan tahun n-1 = 89 - 92 = -3</p> <p>B = Jumlah wisatawan tahun n-1 = 92</p>	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{48.421 - 45.745 = 2676}{45.745} \times 100\% = 5,85\%$ <p> A = Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 = 48.421 - 45.745 = 2676 B = Jumlah wisatawan tahun n-1 = 45.745 </p>	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan	
		3) Tingkat hunian akomodasi	$\frac{38.858}{522 \times 365} \times 100\% = 20,39\%$ <p> A = Jumlah kamar yang terjual = 38.858 B = Jumlah kamar yang tersedia = 190.530 </p>	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan	
		4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	PDRB Sektor Pariwisata = Rp 244.000.000.000,10 PDRB Kabupaten = Rp 10.755.000.000.000,90	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan	
		5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	PAD Sektor Pariwisata = Rp 2.480.093.712,80 PAD Kabupaten = Rp 75.970.893.013,46	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	PERTANIAN	1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{58.047 \text{ Ton}}{14.047 \text{ Hektar}} \times 100\% = 4,13\%$ <p>A = Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 58.047 Ton B = Luas panen = 14.047 Hektar</p>	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Katingan	
		2) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{0-0=0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya = 0 B = Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 0</p>	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Katingan	
28.	KEHUTANAN				
		1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Katingan	Surat Keterangan
		2) Pemberdayaan masyarakat di daerah	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi = 0	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten	Surat Keterangan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penyangga		Katingan	
		3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi = 0 hektar	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Katingan	Surat Keterangan
		4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun = 0	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Katingan	Surat Keterangan
29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p> <i>A = Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0</i> <i>B = perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0</i> </p>	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Katingan	Surat Keterangan
30.	PERDAGANGAN	1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	$\frac{2416}{4283} \times 100\% = 56,41\%$ <p> <i>A = Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 2416</i> <i>B = Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota = 4283</i> </p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)			
		2) Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{2.395}{2.607} \times 100\% = 91,86\%$ <p> <i>A = Realisasi = 2.395</i> <i>B = RDKK = 2.607</i> </p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan	
		3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{523}{746} \times 100\% = 70\%$ <p> <i>A = Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan = 523</i> <i>B = Jumlah potensi UTTP yang wajib dite a dan tera ulang di wilayah kab/kota = 746</i> </p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan	BIDANG KEMETROLOGIAN & PERDAGANGAN
31.	PERINDUSTRIAN	1) Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{189 - 836}{836} \times 100\% = -77,39\%$ <p> <i>A = Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 189 - 836 = - 647</i> <i>B = Jumlah indutri kecil dan menengah tahun n-1 =</i> </p>	Dinas Perindustrian Trasmingrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			836		
		2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	<p>Nilai = 0%</p> <p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$</p> <p>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p>	Dinas Perindustrian Trasmingrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Surat Pernyataan
		3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh	<p>$\frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$</p> <p>$A = \text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan} = 2$</p> <p>$B = \text{Jumlah izin yang dikeluarkan} = 5$</p>	Dinas Perindustrian Trasmingrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		instansi terkait			
		4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 B = Jumlah izin yang dikeluarkan = 0</p>	Dinas Perindustrian Trasmingrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Surat Keterangan
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 B = Jumlah izin yang dikeluarkan = 0</p>	Dinas Perindustrian Trasmingrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Surat Keterangan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Daerah Kabupaten/Kota			
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>Nilai = $25\% + 10\% + 10\% + 10\% + 10\% = 65\%$</p> <p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)- Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Katingan	
32.	TRANSMIGRASI				

Sumber : Perangkat Daerah se-Kabupaten Katingan, Tahun 2024



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Inakudikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan Dan Keuangan	1) Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{156.128.295.846,58}{1.398.955.542.636,69} \times 100\% = 11,16\%$ <p> <i>A = Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan</i> = Rp. 156.128.295.846,58 <i>B = Jumlah APBD</i> = Rp. 1.398.955.542,636,69 </p>	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	
		2) Rasio PAD	$\frac{68,287,243,703.46}{1,585,317,688,843.46} \times 100\% = 4,31\%$ <p> <i>A = Jumlah PAD</i> = Rp. 68,287,243,703.46 <i>B = Jumlah Pendapatan Dalam APBD</i> = Rp. 1,585,317,688,843.46 </p>	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	
		3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP (adalevel 2 "Berkembang) (2,94 %)	INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN	
		4) Peningkatan Kapabilitas Aparat	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level	INSPEKTORAT	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2/level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP (ada level 3)	KABUPATEN KATINGAN	
		5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{833,708,144,715.05}{1,398,955,542,636.69} \times 100\% = 59,60\%$ <p> <i>A = Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures</i> = Rp 833,708,144,715.05 <i>B = Jumlah belanja APBD</i> = Rp. 1,398,955,542,636.69 </p>	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	
		6) Opini Laporan Keuangan	WTP = 9 kali WDP = 1 kali Disclamer = 0 kali	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2.	PENGADAAN	1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke	$\frac{0}{521} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah kontrak infrastuktur dengan</i></p>	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN	LPSE KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	<i>nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n : 0</i> <i>B = Jumlah kontrak keseluruhan tahun n : 521</i>	KATINGAN	
		2) Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{526}{2.911} \times 100\% = 18,07\%$ <i>A = Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif : 526</i> <i>B = Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif : 2.911</i>	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN KATINGAN	LPSE KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024
		3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{791.603.278.195}{1.303.202.490.158,99} \times 100\% = 60,74\%$ <i>A = Jumlah nilai belanja Operasional dan Modal melalui pengadaan : 791.603.278.195</i> <i>B = Total belanja Operasional dan Modal : 1.303.202.490.158,99</i>	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN KATINGAN	SIRUP KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RINGKASAN APBD TAHUN 2024
		4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan	$\frac{738.900.061.982 - 405.092.304.890}{405.092.304.890} \times 100\% = 8,35\%$	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN KATINGAN	SIRUP KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN SIRUP KABUPATEN



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	<p>A = Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) : 33.807.757.092</p> <p>B = Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) : 405.092.304.890</p>		KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024
3.	KEPEGAWAIAN	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{961}{1232} \times 100\% = 78,00\%$ <p>A = Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) : 961</p> <p>B = jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) : 1232</p>	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KATINGAN	
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{300}{1232} \times 100\% = 24,35\%$ <p>A = <i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) : 300</i></p>	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KATINGAN	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesehatan)	<i>B = Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) : 1232</i>		
		3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{43}{300} \times 100\% = 14,33\%$ <i>A = Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) : 43</i> <i>B = Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) : 300</i>	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KATINGAN	
4.	MANAJEMEN KEUANGAN	1) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\frac{1,398,955,542,636.69}{1,592,124,885,638.00} - 1 \right] \times 100\% = 12,13\%$ <i>A = Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = 1,398,955,542,636.69</i> <i>B = total belanja APBD = 1,592,124,885,638.00</i>	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	
		2) Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[\frac{68,287,243,703.46}{117,959,495,534.00} - 1 \right] \times 100\% = 42,11\%$ <i>A = Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi = 68,287,243,703.46</i>	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$B = \text{Total PAD dalam APBD} = 117,959,495,534.00$		
		3) Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (ada) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (ada) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (ada) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ada)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	
		4) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{186,362,146,206.76}{1,592,124,885,638.00} \times 100\% = 11,71\%$ $A = \text{Nilai realisasi SiLPA} = 186,362,146,206.76$ $B = \text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya} = 1,592,124,885,638.00$	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN	
5.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$ $A = \text{Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda} = 7$ $B = \text{Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda} = 7$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Katingan	
		2) Akses publik	$\frac{28}{28} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi	



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terhadap informasi keuangan daerah	$A = \text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda} = 28$ $B = \text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci} = 28$	Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Katingan	

Sumber : Perangkat Daerah se-Kabupaten Katingan, Tahun 2024





2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan 3 (tiga) tahun, mengingat Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023 yang telah berakhir di tahun 2023. Selanjutnya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara sistematis penyusunan mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan dilakukan secara berkala dan pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Satuan	Target RPD	Target Perkin	Relisasi	Capaian Kinerja	Sumber Data
1 Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,84	-	4,67		Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		PDRB per Kapita	Juta Rp.	57.2	-	67,9		Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
	1.1 Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.36	2,36	3.32	140,68	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		Persentase Kecamatan Rawan Pangan	Persen	7,7	7,7	23,08	33,37	Hasil Perhitungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	1,20	1,20	5,86	488	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	3,12	3,12	0,78	25	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	2,28	2,28	5,83	261,16	Laporan buku tamu objek wisata
		Persentase pertumbuhan nilai investasi	Pesen	0,6	0,6	0,46	76,6	LKPM



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,09	-	74,37		Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	85,80	-	89,31		Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
		2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.80	8,86	8,95	101	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,99	12,99	12,99	100	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
				Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,16	74	74,14	100	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
				Prevalensi Stunting	Persen	14	14	10,5	133	Dinas Kesehatan (Bidang Kesehatan Masyarakat)
				Persentase penduduk miskin	Persen	4,95	4,95	5,26	94	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.90	4,90	4,88	100,40	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	86,20	86,20	89.31	103,608	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata			Indeks Infrastruktur	Persen	29,54	-	72,02		Hasil Perhitungan Mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
				Persentase kecamatan yang terhubung	Persen	81,00	-	76,07		Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

				dengan poros kabupaten						Penataan Ruang Kabupaten Katingan
		3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	40,33	40,33	37,88	87,42	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
				Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Persen	75,31	75,33	61,75	81,97	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
				Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	Persen	20	20	16,24	81	Hasil perhitungan mandiri Dinas Perhubungan dan Perikanan
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Persen	34,57	62	61,62	99,38	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	34,78	75	76,66	102	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	Persen	43,17	43,17	43,17	100	Hasil perhitungan mandiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase permukiman kumuh yang ditangani	Persen	70	70	78,98	112,82	SK Kawasan Kumuh
4	Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	77,07	-	76,47		Hasil penilaian Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

	semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).								Ormas	
				Persentase penyelesaian kasus SARA	Persen	100	-	100		Hasil penilaian Bidang Kewaspadaan Nasional
		4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal	Persentase penurunan kasus kriminal	Persen	50	50	73	68,49	Polres Katingan
				Persentase penanganan kasus K3	Persen	100	100	100	100	Hasil perhitungan mandiri Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	Hasil perhitungan Bidang Kewaspadaan Nasional
				Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	60	60	46,67	77,78	Keputusan Bupati tentang penetapan Cagar Budaya Kabupaten
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74.62	-	76,81		Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup
		5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	52.50	52.50	50,74	96,65	Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	89.00	89.00	95,20	106,97	Hasil perhitungan mandiri Dinas Lingkungan Hidup
				Indek Kualitas	Poin	86.00	86.00	87,54	101,79	Hasil perhitungan



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

				Tutupan Lahan (IKTL)						mandiri Dinas Lingkungan Hidup
		5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	144,40	144,40	140,74	102,60	Laporan Hasil Evaluasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel			Indeks RB	Predikat	CC		BB		Laporan Hasil Evaluasi Kemen PANRB
		6.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB
				Nilai LPPD	Kriteria	Tinggi	Tinggi	Masih Prose penilaian	-	Peringkat dalam Laporan EKPPD dari Kemendagri
				Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	Masih Prose penilaian	-	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
				Nilai MCP	Poin	84	84	87	103,57	Website : jaga.id
		6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	85,00	85,00	84,77	99,72	Laporan Hasil SKM
				Indeks Pelayanan Publik	Nilai	-	3,01	3,60	119	Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB
				Indeks SPBE	Predikat huruf	B	B	B	100	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
				Persentase desa berkembang	Persen	63	63	60,39	95,85	Hasil Penghitungan Tingkat Perkembangan Desa
Jumlah capaian kinerja									111,58	

Sumber : Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, Tahun 2024



Analisis per sasaran Rancangan Pembangunan Daerah RPD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Satu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,36	3,32	140,68
2	Persentase Kecamatan Rawan Pangan	Persen	7,7	23,08	33,37
3	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	1,20	5,86	488
4	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	3,12	0,78	25
5	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	2,28	5,83	261,16
6	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Persen	0,6	0,46	80
Capaian sasaran satu					171

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, LKPM, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata

LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dilihat dari realisasi mengalami peningkatan yang signifikan dari target 2,36 realisasi 3,32 dari perhitungan/rilis BPS atau Katingan Dalam Angka. Persentase Kecamatan Rawan Pangan merupakan indikator negatif, di mana nilai yang semakin rendah menunjukkan hasil yang baik. Dalam hal ini persentase Kecamatan Rawan Pangan tidak mencapai target 7,7 realisasi 23,08. LPE Kategori Industri Pengolahan tidak mencapai target dari 3,12 realisasi 0,7. LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor realisasinya jauh melampaui dari target 1,20 realisasi 5,86. Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan adalah perhitungan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan, dimana capaian kunjungan wisatawan tahun sebelumnya (Tahun 2023) akan disandingkan dengan capaian tahun 2024. Untuk tahun 2024 Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan dapat direalisasikan sebesar 5,83% dapat melampaui



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

dari yang ditargetkan sebesar 2,28%. Formulasi dari perhitungan tersebut didapatkan karena capaian tahun 2024 dapat melampaui capaian tahun 2023 dimana jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata meningkat dengan sangat baik. Tahun 2024 target Realisasi PM Kabupaten Katingan (Rp. Juta)* Rp. 263.544,00 Realisasinya (Rp.Juta)* Rp.329.074,78 mencapai target dari nilai investasi namun dari persentase target indikator sasaran daerah. Target dengan formulasi perhitungan/penjelasan persentase pertumbuhan nilai investasi adalah nilai investasi tahun n dikurangi nilai investasi tahun n-1 dibagi nilai investasi tahun n-1 di kali 100 persen. Nilai Realisasi investasi tahun 2024 Rp. 329.074.338.597 (laporan per triwulan IV tahun 2024) nilai realisasi investasi tahun 2023 Rp. 222.558,48. $Rp. 329.074,78 - 222.558,43 = 106.514,9 : 222.558,48 \times 100 \% = 0,46 \%$. Dari penjelasan tersebut menunjukkan belum tercapai persentase yang diperjanjikan di perjanjian kinerja

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan Tahun 2022-2024

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	-	2,36	-	-	2,36	-	-	3,32
Persentase Kecamatan Rawan Pangan	-	-	7,7	-	-	7,7	-	-	23,08
LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	-	1,20			1,20			5,86
LPE Kategori Industri Pengolahan			3,12			3,12			0,78
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	-	-	2,28	-	-	2,28	-	-	5,83
Persentase pertumbuhan nilai investasi			0,6			0,46			76,6

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, LKPM, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata



Keenam indikator Sasaran meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan di atas tidak ada di indikator sasaran daerah periode RPJMD tahun 2018 dan 2023.

Tabel 2.7

Perbandingan Indikator Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan terhadap Target Akhir RPD 2024-2026

Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja	2024		Target 2026
	Target	Realisasi	
LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,36	3,32	2,50
Persentase Kecamatan Rawan Pangan	7,7	23,08	7,7
LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,20	5,86	1,30
LPE Kategori Industri Pengolahan	3,12	0,78	65
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	2,28	5,83	2,77
Persentase pertumbuhan nilai investasi	0,6	0,46	1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, LKPM, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata

LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sudah melewati target akhir RPD target 2,50 sedangkan realisasi tahun 2024 yaitu 3,32. Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan dan LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga melebihi target tahun 2026. Sementara untuk tiga indikator yang lainnya masih belum melewati target dari akhir RPD. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan 3,32 persen, lebih lambat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan kondisi ekonomi global. Penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Katingan pada Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa diantaranya adalah :

- Perubahan Iklim: Kondisi cuaca yang ekstrem seperti banjir atau kekeringan mempengaruhi hasil pertanian. Pergeseran musim tanam padi akibat perubahan iklim khususnya dikarenakan



fenomena banjir sehingga terjadi pergeseran musim panen di beberapa wilayah, atau penurunan luas baku sawah.

- b. Penurunan Harga Komoditas: Fluktuasi harga komoditas pertanian di pasar global dapat berdampak pada pendapatan sektor pertanian.
- c. Kebijakan Pemerintah: Perubahan kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian, seperti pembatasan ekspor atau perubahan subsidi, dapat mempengaruhi pertumbuhan pada sektor pertanian.
- d. Kerusakan Lingkungan: Aktivitas seperti penebangan hutan yang tidak terkendali atau pencemaran air dapat merusak ekosistem dan mengurangi produktivitas sektor ini.
- e. Pandemi atau Wabah Penyakit: Penyebaran penyakit pada tanaman dan hewan ternak sehingga dapat mengurangi hasil produksi.

Ancaman perubahan iklim ini perlu perhatian khusus mengingat kategori ini merupakan penyumbang PDRB Kabupaten Katingan terbesar dan sangat bergantung pada kondisi cuaca yang stabil, oleh karena itu perlu adanya langkah mitigasi untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim ini. Dalam upaya meningkatkan LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Katingan. Solusi yang dilakukan dengan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Katingan dapat lebih *resilient* terhadap tantangan cuaca di masa mendatang. Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 melaksanakan berbagai program strategis yang berkontribusi pada pencapaian target LPE di sektor pertanian. Beberapa kegiatan konkret yang mempengaruhi keberhasilan ini meliputi:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian dengan memberikan bantuan bibit unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani.
- b. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan untuk pengadopsian teknologi pertanian modern yang dilaksanakan pada Balai Penyuluhan Pertanian.
- c. Pengembangan Infrastruktur Pertanian melalui Pembangunan atau perbaikan irigasi di wilayah selatan (Kecamatan Katingan Kuala) melalui Program SIMURP untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dan juga membangun jalan Usaha Tani Guna kelancaran petani dalam melakukan kegiatan pertanian
- d. Stabilisasi pasokan dan harga pangan mengatur distribusi hasil pertanian agar lebih efisien serta menjalankan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.
- e. Program cetak sawah dan optimalisasi lahan.

Persentase kecamatan rawan pangan merupakan Indikator negatif, dimana nilai yang semakin rendah menunjukkan hasil yang baik, sedangkan nilai yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kecamatan rawan pangan yang tinggi pula. Yang diharapkan adalah nilai kecamatan rawan pangan



yang semakin rendah bahkan 0. Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan di tingkat kecamatan adalah proses penting untuk memahami dan mengatasi masalah pangan di wilayah Kabupaten Katingan. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) di tingkat kecamatan pada Kabupaten Katingan adalah upaya untuk menggambarkan visualisasi geografis wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA ini disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan: ketersediaan, keterjangkauan/akses, dan pemanfaatan pangan. Peta-peta FSVA menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau yang dikelompokkan menjadi 6 warna untuk menunjukkan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan. Hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 62 desa dari 161 desa (38,5%) yang terdiri dari : 3 desa (1,9 %) Prioritas 1; 28 desa (17,4%) Prioritas 2; dan 31 desa (19,3 %) Prioritas 3. Desa prioritas 1 (3 desa) terdapat di Kecamatan Tasik Payawan (Desa Talingke); di Kecamatan Petak Malai (Desa Batu Badak) dan di Kecamatan Marikit (Desa Tumbang Tabulus). Desa prioritas 2 (28 desa) tersebar 7 desa di Kecamatan Marikit; 6 desa di Kecamatan Kamipang; 4 desa di Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Senaman Mantikei; 3 desa di Kecamatan Katingan Hulu; dan masing-masing 1 desa di Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Petak Malai. Desa prioritas 3 (31 desa) tersebar 7 desa di Kecamatan Katingan Kuala, 6 desa di Kecamatan Marikit; 4 desa di Katingan Hulu; masing-masing 3 desa di Kecamatan Tasik Sanaman Mantikei, Petak Malai; masing-masing 2 desa di Kecamatan Kamipang dan Katingan Tengah; masing-masing 1 desa di Kecamatan Mendawai, Tasik Payawan, Pulau Malan dan Bukit Raya. Karakteristik kabupaten rentan pangan ditandai dengan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan tinggi, persentase balita stunting tinggi, serta angka kemiskinan yang tinggi. Upaya yang telah dilaksanakan untuk menangani dan mengantisipasi kerawanan pangan di Kabupaten Katingan pada tahun 2024 adalah dengan memberikan bantuan berupa sarana prasarana produksi pertanian kepada kelompok-kelompok tani yang aktif dalam usaha pertanian hal tersebut dalam Upaya untuk meningkatkan usaha pertanian yang dilakukan masyarakat. Selain itu dilakukan juga pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan mengenai manajemen kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi untuk meningkatkan kualitas manajerial kelompok tani sehingga sistem usaha tani dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, yang diharapkan dapat mengantisipasi kerawanan pangan di daerahnya. Penurunan kinerja dalam pencapaian kinerja persentase daerah rawan pangan disebabkan karena



berbagai faktor diantaranya adalah kenaikan harga pangan di mana fluktuasi harga pangan global dapat mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tingkat lokal sehingga masih terdapat beberapa daerah yang memiliki keterbatasan pada aspek ketersediaan pangan, selain itu juga kemiskinan yang tinggi, serta akses listrik dan air bersih yang rendah. Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah dengan mengupayakan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang tidak hanya dilakukan di ibukota kabupaten saja, namun juga sampai kecamatan-kecamatan lain yang masih dapat dijangkau melalui jalan darat. Selain itu pembangunan jalan dan upaya untuk membuka akses listrik dan air bersih juga tetap dilakukan oleh instansi terkait.

LPE Kategori Industri Pengolahan tahun 2024 dengan target sebesar 3,12 dengan realiasi 0,78% dengan capaian kinerja sebesar 25%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (sumber data BPS) maka terjadi penurunan sebesar 1,93 persen. Dalam upaya meningkatkan LPE Kategori Industri Pengolahan pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yaitu melakukan intervensi kegiatan melalui 2 program pembangunan sarana dan prasarana industri (bantuan peralatan) sehingga produktivitas meningkat serta harapannya ekonomi semakin berkembang, kedua melalui program pembangunan sumber daya industri (pelatihan) memunculkan pelaku industri pengolahan baru. Tetapi dari kegiatan itu tidak mendongkrak nilai LPE Industri Pengolahan. Faktor penghambat yaitu tantangan teknologi dan inovasi keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan kurangnya inovasi dalam proses produksi dapat membuat industri tidak efisien dan sulit untuk bersaing di pasar, kesulitan dalam memperoleh modal atau pembiayaan yang cukup untuk investasi dan pengembangan, keterbatasan dalam keterampilan atau pendidikan tenaga kerja dapat membatasi kemampuan industri untuk mengadopsi teknologi baru atau meningkatkan efisiensi, terbatasnya akses ke pasar domestik. Jadi alternatif solusi yang dilakukan menyediakan pelatihan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri secara masif, memberikan kemudahan bagi perusahaan, terutama UMKM, untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel, meningkatkan kualitas produk, promosi dan dukungan untuk produk-produk industri dalam pasar.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tidak lepas dari program pemerintah daerah yaitu membangun atau memperbaiki pusat perbelanjaan, pasar, dan fasilitas distribusi barang, membuka program pelatihan atau kursus kewirausahaan bagi masyarakat untuk membuka usaha di bidang perdagangan besar dan



eceran, menyelenggarakan pameran atau bazar untuk mempromosikan produk-produk lokal dan usaha perdagangan, sehingga produk tersebut dapat dijangkau oleh pasar yang lebih luas. Kunjungan wisatawan pada saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan khususnya tahun 2020 dan 2021, namun setelah pandemi Covid-19 berlalu jumlah kunjungan sudah dapat meningkat, akan tetapi masih fluktuatif hal ini disebabkan kondisi perekonomian yang belum membaik, namun untuk capaian tahun 2024 sudah mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini disebabkan cukup giatnya promosi pariwisata melalui media sosial, baik oleh masyarakat maupun oleh perangkat daerah di Kabupaten Katingan.

Dalam upaya meningkatkan iklim investasi pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan yaitu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif terhadap 340 pelaku usaha, melaksanakan kegiatan Identifikasi, penyelesaian dan evaluasi permasalahan terhadap 7 pelaku usaha, melaksanakan pengawasan penanaman modal sesuai dengan kewenangan kabupaten, mempromosikan dan menginformasikan potensi industri daerah melalui forum dan kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian, memberikan bantuan hibah perahu beserta alat tangkap, melaksanakan pembangunan sarana prasarana pariwisata, melaksanakan promosi seni dan budaya di luar daerah, penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kab. Katingan tahun 2024, pembuatan box container kawasan sport center, program optimasi lahan, pengembangan lahan pertanian satu peta berbasis GIS (LAHSATAGIS).

Dalam rangka tetap menjaga dan meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Katingan untuk tahun 2025 di lakukan langkah-langkah antara lain :

- a. Melakukan kegiatan pengawasan penanaman modal secara berkala terhadap realisasi investasi kegiatan usaha sesuai klasifikasi lapangan usaha;
- b. Melakukan fasilitasi kegiatan penanaman modal atas perizinan berusaha berbasis risiko yang mengalami kendala baik segi perizinan maupun yang berkendala di lapangan;
- c. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif terhadap perusahaan yang belum mendapat hak akses LKPM *online* maupun belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Memberikan sanksi administrasi baik teguran tertulis, penghentian kegiatan sampai pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang tidak patuh menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;



- e. Memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai potensi dan peluang usaha di Kabupaten Katingan dengan menggunakan teknologi informasi yang ditetapkan;
- f. Memberikan berbagai bentuk fasilitas kemudahan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Memberikan surat teguran / surat peringatan bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Memberikan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada keraguan bagi pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Katingan;
- i. Sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko yang dilakukan melalui aplikasi OSS dan aplikasi mandiri lainnya;
- j. Adanya Mall Pelayanan Publik sebagai pelayanan publik secara terpadu untuk upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan serta dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Katingan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan yaitu program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluh pertanian, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri, program pengelolaan sistem informasi industri nasional, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program



pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

2. Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Kedua

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Persen	8,86	8,95	101
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Persen	12,99	12,99	100
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74	74,14	100
4	Prevalensi Stunting	Persen	14	10,5	133
5	Persentase penduduk miskin	Persen	4,95	5,26	94
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,90	4,88	100,40
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	86,20	89,31	103,608
Capaian sasaran 2					104,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan dan Dinas Kesehatan

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan realisasi, rata-rata lama sekolah ini meningkat sebesar 0,1 dari tahun 2023 yaitu sebesar 8,85 tahun dan tahun 2024 sebesar 8,95 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk tahun 2024 mencapai target yang ditentukan dan mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu 12,98 menjadi 12,99 untuk tahun 2024. Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan realisasi sebesar 74,14% dibandingkan tahun 2023 sebesar 73,98%. Meskipun kenaikan tidak terlalu signifikan namun mencapai target. Adapun variabel yang memberikan pengaruh signifikan adalah angka kelahiran, angka kematian bayi, angka kesakitan, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan, dan variabel persentase Balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap. Dinas Kesehatan secara terus menerus melaksanakan program inovasi maupun program rutin untuk mengatasi permasalahan rendahnya Angka Harapan Hidup.



Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat terjadi karena kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan anak saat masa pertumbuhan, Pola asuh yang salah, sanitasi lingkungan yang buruk, keterbatasan akses fasilitas kesehatan. Pada Tahun 2024, Prevalensi Stunting Kabupaten Katingan sebesar 10,5% (Data e-PPGM), bila dilihat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 34% (Data SKI 2023). Jika melihat realisasi persentase penduduk miskin tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 4,95 dan terealisasi 5,26 tidak mencapai target. Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Katingan sesuai RPD dan Perjanjian Kinerja 2024 adalah 4.90 dan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Katingan pada Tahun 2024 adalah 4,88 % dan capaian kinerja sebesar 100,40. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2024 sudah menunjukkan kenaikan serta memenuhi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 yaitu 86.20 realisasi 89,31. Jadi capaian kinerja sasaran dua yaitu 104,57.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Indikator Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing tahun 2022-2024

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,96	8,97	8,80	9,17	9,28	8,86	8,78	8,85	8,95
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,13	13,38	12,99	13,36	13,61	12,99	12,97	12,98	12,99
Angka Harapan Hidup	66,58	66,66	67,16	67,18	67,52	74	66,16	66,43	74,14
Prevalensi Stunting	-	-	14	-	-	14	20	34	10,5
Persentase penduduk miskin	5,19	4,95	4,95	5,19	4,95	4,95	5,50	4,99	5,26
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,40	5,30	4,90	5,40	5,30	4,90	5,33	4,96	4,88
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,81	86,03	86,20	85,81	86,03	86,20	85,72	86,17	89,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan dan Dinas Kesehatan

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) target tahun 2024 RPD dan Perjanjian Kinerja berbeda karena menyesuaikan realisasi terakhir tahun 2023 yang melebihi target 2024. Untuk indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan trend bagus karena setiap tahun mengalami peningkatan.



Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa trend Angka Harapan Hidup dari tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir. Target Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2024 RPD dan Perjanjian Kinerja berbeda karena menyesuaikan realisasi terakhir tahun 2023 yang melebihi target 2024. Prevalensi Stunting juga mengalami fluktuatif, di mana tahun 2022 realisasi sebesar 20%, lalu tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 34 (berdasarkan data SKI 2023) dan mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 10,5%. Dari realisasi tiga tahun terakhir cenderung naik namun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang 4,99 menjadi 5,26. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tiga tahun terakhir menunjukkan trend yang positif tiap tahun. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dalam arti dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.10
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026

Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,86	8,95	8,84
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,99	12,99	13,02
Angka Harapan Hidup	67,16	64,52	68,02
Prevalensi Stunting	14	10,5	10
Persentase Penduduk Miskin	4,95	5,26	4,45
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,90	4,88	4,50
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,20	89,31	86,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan dan Dinas Kesehatan

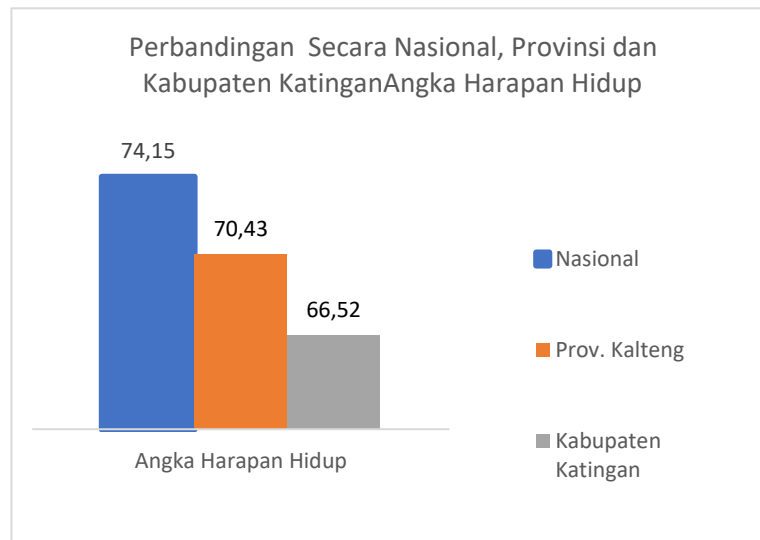
Tabel di atas menunjukkan perbandingan indikator Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting antara target Akhir RPD 2024-2026 di mana target angka harapan hidup tahun 2024 sebesar 67,16 tahun dengan realisasi sebesar 64,52 tahun. Sedangkan untuk target prevalensi Stunting tahun 2024 sebesar 14% dengan realisasi sebesar 10,5 berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM). Target tahun 2026 untuk Angka Harapan hidup sebesar



68,02 dan Prevalensi Stunting sebesar 10%. Persentase Penduduk Miskin dengan target akhir RPD 4,45 dengan realisasi 5,26 masih sangat mungkin untuk mencapai target tersebut. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang sudah mencapai target.

Bila dilihat dari perbandingan Indikator Angka Harapan Hidup dan Persentase Penduduk miskin Kabupaten Katingan di tahun 2024 masih di bawah Provinsi dan Nasional .

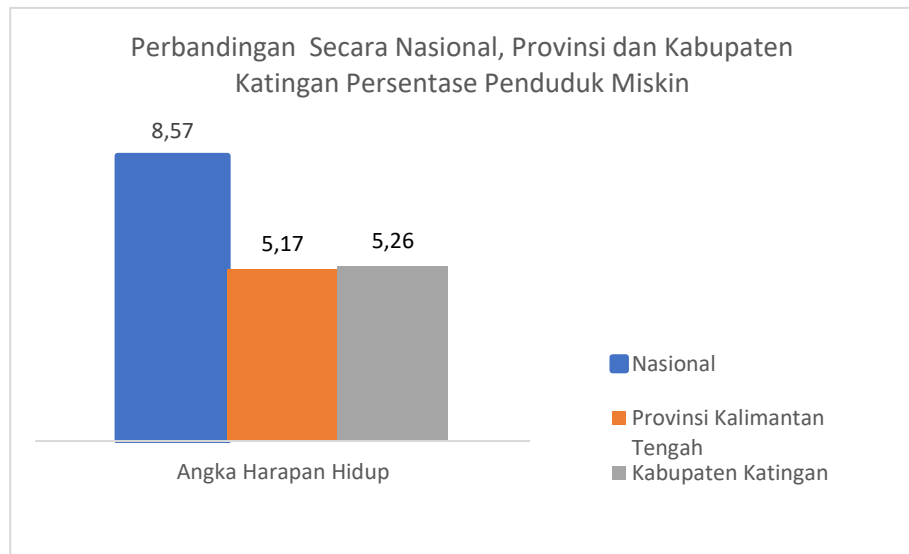
Grafik 2.1 Indikator Angka Harapan Hidup dan Persentase Penduduk miskin



Perbandingan secara nasional, provinsi dan kabupaten katingan persentase penduduk miskin tahun 2024



Grafik 2.2 persentase penduduk miskin



Untuk mencapai realisasi indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024, Dinas Pendidikan (Disdik) melakukan beberapa langkah untuk mencapai target. Berikut adalah beberapa tindakan yang dilakukan :

- a. Peningkatan Akses Pendidikan:
 - o Membangun dan merenovasi sekolah di daerah terpencil atau tertinggal untuk mengurangi angka putus sekolah.

Tabel 2.11

Pembangunan dan Renovasi Sekolah

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Pembangunan dan Renovasi	Jumlah Fasilitas Sekolah
1	PAUD	24 Ruang/Unit	20
2	SD	104 Ruang/Unit	2.637
3	SMP	97 Ruang/Unit	1.242
4	Kesetaraan	1 Unit	12

Sumber : Dinas Pendidikan

- b. Program Wajib Belajar 12 Tahun:



- o Memberikan insentif seperti beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk keluarga kurang mampu.

Tabel 2.12
Beasiswa Atau Bantuan Biaya Pendidikan

No	Satuan Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	179 Siswa
2	SD	397 Siswa
3	SMP	150 Siswa
4	Kesetaraan	0

Sumber : Dinas Pendidikan

c. Peningkatan Kualitas Guru :

Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pengembangan Konten Digital 100 Orang, pelatihan Guru Pengerak 29 Orang, bimtek Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 108 Orang, bimtek Pemanfaatan *Chromebook in Classroom* bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 60 Orang, Lomba Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi 45 Orang, Sosialisasi Pembelajaran PPG Guru Tahap 100 Orang, Bimtek Guru Pembimbing Khusus pada Satuan Pendidikan 62 Orang, Diklat Berjenjang Guru PAUD tingkat Dasar 48 Orang

d. Program Kejar Paket:

Menyediakan program pendidikan non-formal seperti Kejar Paket A, B, dan C untuk masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, mempermudah proses pendaftaran dan ujian bagi peserta program Kejar Paket, paket A: Setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD), program ini ditujukan bagi mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan ingin mendapatkan ijazah setara SD, Paket B: Setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program ini ditujukan bagi mereka yang telah menyelesaikan Paket A atau pendidikan dasar, tetapi tidak dapat melanjutkan ke SMP, Paket C Setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini ditujukan bagi mereka yang telah menyelesaikan Paket B atau pendidikan menengah pertama, tetapi tidak dapat melanjutkan ke SMA.

Program-program ini memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memiliki hak eligibilitas yang setara dengan



pemegang ijazah formal. Penurunan Angka Putus Sekolah dengan faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dan memberikan solusi yang tepat, penyebab adalah karena orang tua selalu berpindah-pindah tempat tinggal disesuaikan dengan keadaan usaha dan pekerjaan. Solusinya yang digunakan yaitu usia Sekolah PAUD, SD dan SMP harus masuk dapodik sekolah yang terdekat. Apabila siswa pindah sekolah harus cepat dimasukkan ke sekolah baru dan Dapodik sekolah lama dikeluarkan. Kemitraan dengan masyarakat dan swasta, melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program pendidikan. Sekolah pasti ada kerja sama dengan Pihak Swasta seperti dengan PT. Rimba Makmur Utama (RMU) dan PT. Bisma Dharma Kencana (BDK). Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program pendidikan yang telah dilaksanakan. Program atau kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Untuk Satuan Pendidikan Kelas Awal (Kelas 1-2) SD Transisi PAUD-SD;
- b. Tambah Ruang Kelas dan Rehabilitasi Ruang kelas, ruang guru, Lap Komputer dan ruang perpustakaan;
- c. Sarana dan Prasarana oleh Penyedia (Wajib Belajar 9 Tahun);
- d. Pelaksanaan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan literasi dan numerasi;
- e. Peningkatan raport pendidikan dan raport Dapodik jenjang SD;
- f. PIP (Program Indonesia Pintar);
- g. Monitoring pelaksanaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) Bagi sekolah Menengah Pertama;
- h. Monitoring Penggunaan Dana BOSP;
- i. Melakukan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, menggunakan media sosial dan media tradisional untuk menyebarkan informasi tentang program-program pendidikan. Apabila menyangkut data dan informasi yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah komunikasi lewat whatsapp grup satuan pendidikan. Adapun kendala yang sering sekolah alami adalah masih banyak daerah sekolah yang belum terkoneksi internet dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesadaran tanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan masih rendah. Salah satu solusi yang berpengaruh untuk kemajuan pendidikan adalah penguat sinyal yang normal sehingga penyaluran informasi dapat berjalan lancar.



Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang mengukur rata-rata lamanya (dalam tahun) seorang anak diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal. Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan dan renovasi sekolah di daerah terpencil atau tertinggal.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- c. Meningkatkan jumlah sekolah inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
- d. Program Beasiswa dan Bantuan Sosial yaitu memberikan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu.
- e. Menyediakan bantuan seragam, dan buku untuk mengurangi angka putus sekolah.

Pada Tahun 2024 ada beberapa kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan Bantuan Beasiswa seperti PIP (Program Indonesia Pintar), perlengkapan Peserta Didik PAUD yang kurang mampu dengan pemberian buku tulis sebanyak 197 Paket diserahkan di Gugus Pendidikan Anak Usia Dini (PKG), setelah itu bagian gugus yang akan menyampaikan kembali ke sekolah PAUD untuk memilah bantuan tersebut sejumlah sekolah yang mendapatkan bantuan.

Perlengkapan peserta didik yang kurang mampu diberi bantuan berupa buku tulis dengan rincian 20 Sekolah Dasar jumlah 8.333 Eksemplar, 150 Siswa Sekolah Menengah Pertama di 2 Kecamatan dengan Jumlah 397 Paket, peningkatan kualitas guru, meningkatkan kesejahteraan guru untuk mengurangi turnover dan meningkatkan motivasi mengajar. Tunjangan Khusus untuk Daerah yang sangat tertinggal, Insentif bagi guru PAUD, tamsil bagi Guru yang belum Sertifikasi. Kampanye Kesadaran Pendidikan dengan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya Pendidikan, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk mendorong partisipasi sekolah, beberapa masyarakat mungkin masih memprioritaskan pekerjaan daripada pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Kemiskinan dapat memaksa anak-anak untuk bekerja dan tidak melanjutkan sekolah, walaupun orang tua selalu berpindah-pindah tetapi pendidikan anak menjadi prioritas utama dalam memajukan pendidikan. Kualitas guru yang tidak merata menjadi sebab ketimpangan kualitas guru antara daerah perkotaan dan pedesaan. Guru merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Di daerah pedesaan, jumlah guru masih jauh dari cukup. Banyak guru yang enggan ditempatkan di pedesaan karena keterbatasan fasilitas dan akses



terhadap kehidupan yang layak. Banyak sekolah yang hanya memiliki 1 atau 2 guru untuk mengajar semua mata pelajaran, namun beban kerja yang berat membuat banyak guru yang akhirnya memilih untuk pindah ke kota, sehingga banyak guru di pedesaan tidak efektif untuk belajar membuat metode pengajaran mereka. Monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan program-program yang dijalankan mencapai target.

Angka harapan hidup dan stunting dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dan penurunan prevalensi stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, akan tetapi dibantu oleh perangkat daerah lain sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dalam perannya telah melaksanakan berbagai program-program dan inovasi kesehatan. Adapun upaya intervensi yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan yaitu :

- a. Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan (Ponek, AMP, Perbaikan Gizi, Rujukan, Jampersal, Pemberian Mikro nutrient, pemberian Vitamin bagi remaja putri, dll);
- b. Pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Katingan;
- c. Meningkatkan upaya pencegahan kematian bayi dan balita dengan Imunisasi, pencegahan Stunting/Wasting, pencegahan penyakit menular;
- d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- e. Perbaikan status gizi masyarakat;
- f. Melakukan Survei Kesehatan Keluarga (IKS);
- g. Perbaikan kesehatan lingkungan;
- h. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui berbagai pelatihan akan ilmu-ilmu baru di bidang kesehatan;
- i. Melakukan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
- j. Kegiatan peningkatan upaya kesehatan usia produktif dan usia lanjut bagi LP-LS, RS Rujukan, LSM (sasaran pengelola program lansia, Program PTM, RSUD Mas Amsyar, PPNI dan Persagi);
- k. Penguatan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut untuk petugas Puskesmas dan Pustu;



- l. Pengusulan tenaga Kesehatan yang akan ditempatkan di setiap fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Katingan;
- m. Tersedianya 159 Posyandu Lansia yang tersebar di 16 wilayah kerja Puskesmas.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi, kesehatan dan sosial, Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan berbagai program yang terkait dengan aspek pengurangan beban pengeluaran sekaligus peningkatan pendapatan. Untuk menekan beban pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Katingan mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yaitu

- a. Rehabilitasi sosial untuk anak terlantar sebanyak 854 orang;
- b. Penyandang disabilitas terlantar 114 orang;
- c. Gelandangan PMKS lainnya di luar HIV AIDS dan NAPZA (wanita tuna sosial) sebanyak 4 orang;
- d. Pelayanan sosial lainnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sebanyak 125 KPM;
- e. Pelayanan Sosial juga diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti swasta sebanyak 4 LKS;
- f. Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) yang mempunyai kegiatan kewirausahaan sebanyak 9 LKS untuk peningkatan modal usaha agar klien dalam LKS tersebut dapat mandiri;
- g. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kesejahteraan sosial dengan melakukan updating data DTKS secara berkala;
- h. Jumlah PPKS yang mendapat Bantuan Sosial Pangan dan juga Mendapat Program Keluarga Harapan sebanyak 14.342 KPM;
- i. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
- j. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 92 KK,
- k. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebanyak 111 Orang.

Peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dilakukan juga di sektor kesehatan. Pada sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Katingan membangun Rumah Sakit Pratama Katingan Kuala. Dengan adanya rumah sakit ini mendekatkan akses kesehatan bagi warga di daerah terpencil,



menyediakan pembiayaan biaya iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (BPU dan BP) dengan total kurang lebih 22.000 peserta, menyediakan sarana rujukan dan menyediakan Transport Rujukan Pelayanan Ibu hamil. Upaya penanggulangan kemiskinan lainnya dilakukan di bidang perumahan dan pemukiman dengan program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Katingan berupaya menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan kinerja UMKM. Penciptaan Iklim usaha, khususnya bagi UMKM agar memiliki peningkatan kinerja yaitu

- a. Melaksanakan pendamping bagi pelaku usaha mikro dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalteng;
- b. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital dasar, memberikan bantuan sarana usaha (gerobak dorong);
- c. Sosialisasi sertifikat halal dan fasilitasi sertifikat halal pelaku usaha mikro;
- d. Pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi;
- e. Memberdayakan perempuan dengan pembinaan kepada pelaku usaha.

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan pekerbunan masyarakat dengan penyediaan bibit kelapa sawit unggul dengan harga subsidi kepada masyarakat sebanyak 6.000 bibit sawit, memberikan bantuan alat mesin pertanian pada 4 kelompok tani. Di sektor perikanan, upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang dilakukan adalah memberikan bantuan hibah perahu beserta alat tangkap memberikan bantuan hibah perahu beserta alat tangkap kepada 24 kelompok nelayan. Upaya menurunkan kemiskinan di sektor ketenagakerjaan adalah Pemerintah Kabupaten Katingan menyelenggarakan Pelatihan bagi IKM (pelatihan anyaman rotan di desa Manduing Taheta, pelatihan pengolahan produk pangan hasil perikanan di kecamatan Kamipang, pelatihan pengolahan produk pangan hasil perikanan di kecamatan Katingan Kuala) kepada 30 pengrajin, melaksanakan Bursa Kerja/Job Fair, memberikan bantuan/hibah barang kepada badan/lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang memiliki surat keterangan terdaftar (bantuan alat kerja), menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di UPT BLK Kabupaten Katingan.

Dalam upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Katingan yang masih tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 mengupayakan peningkatan kesempatan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesempatan penempatan kerja antara lain dengan diselenggarakannya Job Fair yang diikuti oleh pencari kerja dan perusahaan-perusahaan di wilayah



Kabupaten Katingan. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap dari adanya Job Fair tersebut sejumlah 100 orang. Beberapa program lain yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah dengan meningkatkan kompetensi dan produktivitas pencari kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Katingan dengan jumlah lulusan sebesar 159 orang pada tahun 2024 dan 53 orang lulus ujian kompetensi. Upaya lain membangun hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. Pemerintah daerah meningkatkan perlindungan tenaga kerja agar terhindar dari pemutusan hubungan kerja. Untuk Perlindungan tenaga kerja ini antara lain dengan cara meningkatkan penegakkan norma kerja dan K3. Permasalahan tingginya pengangguran terbuka di Kabupaten Katingan adalah pada tingginya pengangguran pada usia muda dan *missmatch* antara lulusan pendidikan kejuruan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Upaya untuk menurunkan pengangguran di Kabupaten Katingan adalah dengan memberikan pendidikan gratis sampai dengan 12 tahun kepada anak-anak usia sekolah agar mereka tetap bersekolah sampai tingkat SLTA/SMK dengan esesuaian kesempatan kerja yang dicari maka lulusan atau SDM yang ada di Kabupaten Katingan dapat terserap dengan kompetensi yang dimiliki.

Target kinerja sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dapat dicapai karena dilakukan fokus kegiatan pada pembinaan pelaku usaha dan bimbingan manajemen usaha. Dengan program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota berupa Kegiatan Pembinaan Kepada Pelaku Usaha di 5 (lima) Kecamatan yaitu Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai, Katingan Kuala, dan Katingan Tengah dengan sasaran 15 (lima belas) pelaku usaha masing-masing di Kecamatan Tasik Payawan 3 (tiga) pelaku usaha, Kamipang 4 (empat) pelaku usaha, Mendawai 2 (dua) pelaku usaha, Katingan Kuala 2 (dua) pelaku usaha, dan Kecamatan Katingan Tengah 4 (empat) pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Katingan. Diharapkan pada tahun anggaran selanjutnya pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga target IPG dan IDG dapat kembali tercapai.

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yaitu program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan bahasa dan sastra, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program



peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program pembinaan keluarga berencana (KB), program pengendalian penduduk, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS), program pemberdayaan sosial, program rehabilitas sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program penanganan bencana, program pengelolaan taman makam pahlawan, program perencanaan tenaga kerja, program hubungan industrial, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pengelolaan sistem data gender dan anak, program pemenuhan hak anak (PHA), program perlindungan khusus anak, program pembinaan perpustakaan, program perencanaan kawasan transmigrasi, program pembangunan kawasan transmigrasi.

3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 2.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	43,33	37,88	87,42
2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Persen	75,33	61,76	81,97
3	Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	Persen	20	16	81
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Persen	62	61,62	99,38
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	75	76,66	102
6	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	Persen	43,17	43,17	100
7	Persentase permukiman kumuh yang ditangani	Persen	70	78,98	112,83
					94,94



(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan)

Indikator dengan sasaran meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar yaitu indikator pertama persentase jalan dalam kondisi mantap tidak mencapai target dari target 43,33 % realisasi 37,88 %. Indikator kedua tidak mencapai target persentase jembatan dalam kondisi mantap target 75,33% realisasi 61,76%. Kemudian indikator ketiga Persentase desa yang terlayani sektor transportasi taget 20 realisasi 16. Indikator yang keempat Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dengan target 62 dengan realisasi 61,62 tidak mencapaitarget. Kemudian Indikator yang ke lima persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dari target 75 dengan realisasi 76,66 mencapai target. Indikator yang keenam persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap mencapai target dari target 43,17 dengan realisasi 43,17. Indikator ketujuh persentase permukiman kumuh yang ditangani melampau target dengan target 70 dengan realisasi 78,98.

Tabel 2.14

Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar yang Merata untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dari tahun 2022-2024

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase jalan dalam kondisi mantap	40,07	41,47	43,33	40,07	41,47	43,33	36,60	37,54	37,88
Persentase jembatan dalam kondisi mantap	68,75	72,84	75,31	68,75	72,84	75,33	80,25	88,24	61,76
Persentase desa yang terlayani sektor transportasi			20			20			16
Persentase rumah tangga yang memiliki akses air	52,5	58,4	34,57	52,5	58,4	62	-	61,18	61,62



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
minum layak									
Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak			34,78			75			76,66
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	-	-	43,17	-	-	43,17	-	-	43.17
Persentase permukiman kumuh yang ditangani	-	-	70			70	-	-	112,83

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun ke tahun naik tetapi tidak signifikan naik bahkan terkesan jalan di tempat. Persentase jembatan dalam kondisi mantap tahun tahun 2024 berbeda target daengan RPD dikarenakan menyesuaikan perhitungan mandiri bidang pada saat evaluasi triwulan III bidang terkait dengan status jembatan menjadi *Box Culvert*. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2024 berbeda dengan RPD dan PK dikarenakan menyesuaikan dengan realisasi terakhir tahun 2023. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan persentase permukiman kumuh yang ditangani tidak dituangkan dalam tabel di atas dikarenakan indikator tersebut tidak ada di indikator sasaran RPJMD tahun 2018-2023.

Tabel 2.15
Perbandingan Kinerja Realisasi Indikator Indikator Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar yang Merata untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar terhadap Target Akhir RPD 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2026
		Target	Realisasi	Target
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	43,03	37,88	48,03



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	75,33	61,76	80,25
3	Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	75,33	16,24	31
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	62	61,62	34,82
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	75	76,66	37,26
6	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	43,17	43,17	49,37
7	Persentase Permukiman kumuh yang ditangani	70	78,98	85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanian

Jika melihat indikator sasaran tiga ini hanya indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang sudah melampaui target akhir RPD. Untuk indikator lainnya sangat memungkinkan untuk mencapai target akhir RPD tahun 2026 tinggal bagaimana komitmen pemerintah untuk mencapai target itu.

Realisasi kinerja tingkat kemantapan jalan kabupaten, persentase rumah tangga berakses air minum layak, Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sanitasi Baik Kabupaten Katingan tahun 2024 dengan standar nasional

Tabel 2.16
Perbandingan dengan Kabupaten Katingan dengan Nasional

No.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional
1	37,88 %	94,20 %
2	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Secara Nasional
	61,62 %	92,64 %
3	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sanitasi Baik Kabupaten Katingan	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Secara Nasional



No.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional
	76,66 %	83,60 %

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah

Persentase jalan dalam kondisi mantap terdapat penurunan capaian indikator persentase jalan dalam kondisi mantap dan persentase jembatan dalam kondisi mantap dengan rincian panjang jalan berkondisi Mantap (Baik + Sedang) yaitu 320,15 Km terhadap keseluruhan panjang jalan kabupaten yaitu 845,11 Km sehingga diperoleh persentase jalan mantap yaitu 37,88%, serta jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap berjumlah 42 unit jembatan terhadap total jembatan yang berjumlah 68 unit yang disebabkan laju kerusakan jalan akibat banjir dan ODOL secara langsung dan juga untuk jembatan ada perubahan data jembatan dimana status jembatan menjadi *box culvert* berakibat penurunan kinerja kedua indikator tersebut, salah satu solusi yaitu melakukan pengawasan penggunaan jalan oleh perangkat daerah terkait serta usulan peningkatan anggaran pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan untuk melapis kembali lapisan penutup jalan yang telah aus ataupun terbuka. Penurunan kondisi jalan sangat dipengaruhi oleh alam, lalu lintas dan anggaran. Tahun Anggaran 2024

- Kegiatan pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan, Kegiatan pembangunan jalan pembangunan jalan Kereng Pakahi – Karuing – Pagatan (panjang 1,589 km), pembangunan Jalan A. Dondang, Samba Indah, Suaka Insan dan Suka Ramai (Earmark) (0,82 km), pembangunan Jalan Katamso (Kegiatan Prioritas Daerah) (panjang 0,562 km), pembangunan Jalan Keluarga Desa Hampalit (Earmark) (0,218 km), pembangunan Jalan Menuju Taking Desa Talangkah (Earmark) (panjang 1,076 km), pembangunan Jalan Singam Raya Katingan I (panjang 0,663 km), pembangunan Jalan SMPN - 7 Komplek Manjau dan Jalan Manjau III (Earmark) (panjang 0,712 km), pembangunan Jalan Tewang Darayu (Antang Kalang II) (panjang 0,375 km), pembangunan Jalan Tumbang Banjarang - Manduing Lama (Panjang 2,158 km), normalisasi Drainase dan Bahu Jalan Pendahara-Buntut Bali (panjang 1,92 km).
- Kegiatan rekonstruksi jalan rekonstruksi Jalan Panglima Tampei (DBH Sawit) (panjang 1,629 km), penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (DAK Non Tematik) (Panjang 0,99 km), peningkatan Jalan Kahanjak (Silpa DAK Jalan) (panjang 0,167 km), peningkatan Jalan Kasongan - Talian Kereng (panjang 0,857 km), peningkatan Jalan Komplek Perumahan Haing Jaya I (0,264 km),



- peningkatan Jalan Kota Tumbang Manggu (Earmark) (panjang 0,381 km), peningkatan Jalan MT. Manunggal (DBH Sawit) (2,426 km), Peningkatan Jalan Syuhada di Tumbang Samba (Kegiatan Prioritas Daerah) (panjang 0,64 km), peningkatan Jalan Tatas (Earmark dan Reguler) (0,486 km).
- c. Pemeliharaan Berkala Jalan yaitu penanganan Long Segmen Jalan Katingan II (DAK Tematik) (panjang 3,411), rehabilitasi/Pemeliharaan berkala jalan Minun Dehen (panjang 0,216 km), rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Soekarno Hatta Simpang Tumbang Lahang Jalan Tamanggung Aweh (0,056 km).
- d. Pemeliharaan Berkala Drainase Jalan Buntut Bali - Tumbang Samba (Panjang 3,25 km).
- e. Pemeliharaan Rutin Jalan yaitu pemeliharaan Jalan Hampangen - Luwuk Kanan (Earmark) (panjang 0,078 km), panjang Jembatan yang dipelihara, rehabilitasi Jembatan Penghubung Desa Bakung Raya dan Desa Setia Mulya (Earmark) (Panjang 25 m), rehabilitasi Jembatan Desa Bakung Raya (Earmark) (Panjang 24 m). Ruas jalan dalam kota Kasongan , Jembatan sei sala tengah= 20 m, ruas jalan Soekarno-Hatta , jembatan Sampang = 50 m, ruas B.Bali - Tbg Lahang, Jemb. sei Mantian I =25 m, jembatan sei Tarusan = 40 m, ruas Tbg. Samba - Tbg. Kaman = 25 m, ruas Bt Bali - Tbg. Lahang Jemb.sei Lahang = 25 m. Panjang jalan baru yang terbangun di 2024 sepanjang 5,978 km.

Desa yang terlayani sektor transportasi di wilayah Kabupaten Katingan dapat ditempuh melalui jalur darat dan Sungai. Penurunan kinerja desa yang terlayani sektor transportasi yaitu Keterbatasan Infrastruktur di mana banyak desa di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur transportasi yang memadai, seperti jalan yang layak atau akses transportasi umum yang memadai. Jalan-jalan rusak yang membuat kendaraan sulit untuk melewati, terutama saat musim hujan. Biaya tinggi untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi di desa sering kali terbatas. Ini bisa disebabkan oleh alokasi dana yang belum berdampak. Keterbatasan akses ke sarana transportasi banyak desa, terutama yang terisolasi, akses terhadap sarana transportasi Solusi yang dilakukan yaitu dengan peningkatan infrastruktur untuk mendukung transformasi daerah desa dan meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana dan prasarana perhubungan yang berkelanjutan.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sementara berdasarkan data target indikator dan tingkat capaian diperoleh nilai yang memenuhi ekspektasi dengan gambaran 25.885 rumah tangga yang memiliki akses air minum layak terhadap jumlah rumah tangga yang di



targetkan yang berjumlah 42.005 rumah tangga atau setara 61,62%,. Diharapkan kerangka pendanaan khususnya mendukung pemenuhan SPM air minum dan air limbah dapat terus ditingkatkan sehingga pemenuhan target tersebut dapat dipertahankan. Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan air bersih yaitu penyediaan sumur bor untuk 7 Lokasi : penyediaan Air Bersih Lokasi SMPN 1 Tasik Payawan di Petak Bahandang, penyediaan Air Bersih Lokasi SMPN 3 Pulau Malan di Tumbang Tanjung, penyediaan air bersih Pos Damkar di Kereng Pangi, penyediaan Air Bersih Pos Damkar di Kasongan, penyediaan Air Bersih di Desa Galinggang, penyediaan Air Bersih di Puskesmas Tumbang Kaman, Penyediaan Air Bersih di Puskesmas Tumbang Lahang, pengadaan Tandon Air (penampung air hujan), pengadaan tandon Desa Galinggang Kecamatan Kamipang sebanyak 57 buah, pengadaan Tandon Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala sebanyak 58 buah pengadaan Tandon Desa Makmur Utama Kecamatan Katingan Kuala sebanyak 42 buah, pengadaan Tandon Desa Mendawai Kecamatan Mendawai sebanyak 58 buah.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sementara berdasarkan data target indikator dan tingkat capaian diperoleh nilai yang memenuhi ekspektasi dengan gambaran 49.810 rumah tangga berakses sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga yang ditargetkan berjumlah 64.979 rumah tangga atau setara 76,10%, diharapkan kerangka pendanaan khususnya mendukung pemenuhan SPM Air Minum dan Air Limbah dapat terus ditingkatkan sehingga pemenuhan target tersebut dapat dipertahankan. Tahun 2024 Pelaksanaan Kegiatan Air Limbah (Sanitasi) yaitu penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Tangki Septi) Individual desa Tumbang Banjang sebanyak 27 Unit, penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Tangki Septi) Individual desa Tewang Karangan sebanyak 20 Unit, penentuan Lokasi Berdasarkan Dokumen SSK dan Desa Lokus Stunting Tahun 2024.

Pada tahun 2024 ingin dilakukan pembaharuan terhadap SK Kawasan Kumuh, hanya saja sampai akhir tahun 2024 SK tersebut belum dapat diterbitkan karena terkendala Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPPW, Disperkimtan Provinsi dan Disperkimtan Kabupaten Katingan tentang penandatanganan kawasan kumuh. Upaya yang dilakukan dalam menangani pemukiman kumuh yaitu pendataan ulang pemukiman kumuh, update lokasi pemukiman kumuh dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati, adanya pemberian bantuan rumah layak huni, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, adanya penanganan terhadap beberapa indikator kumuh seperti jalan lingkungan, drainase dan lain-lain serta penetapan program terpadu untuk penanganan Kawasan



kumuh antar SOPD melalui peran POKJA PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) untuk dianggarakan dan dilaksanakan pada masing2 SOPD sesuai tupoksi masing-masing. Realisasi penganggaran penangan Kawasan kumuh sesuai hasil analisis faktor penyebab kekumuhan yang tertuang dalam dokumen RP2KPKPK. Permasalahan permukiman kumuh menjadi permasalahan lintas sektor (beberapa perangkat daerah) yang berkaitan, pada tahun 2024 direncanaka dilakukan pembaharuan terhadap SK Kawasan Kumuh, hanya saja sampai akhir tahun 2024 SK tersebut belum dapat diterbitkan karena terkendala Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPPW, Disperkimtan Provinsi dan Disperkimtan Kabupaten Katingan tentang penandatanganan Kawasan kumuh.

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, program pengelolaan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan permukiman, program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungannya, program penyelenggaraan jalan, program pengembangan jasa konstruksi, program penyelenggaraan penataan ruang, program kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), program penyelesaian sengketa tanah garapan, program penyelesaian ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, program redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, program penatagunaan tanah, program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

4. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal dengan analisa sebagai berikut:

Tabel 2.17
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Keempat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase penurunan kasus kriminal	Persen	50	73	68,49
2	Persentase penanganan kasus K3	Persen	100	100	100
3	Persentase konflik sosial	Persen	100	100	100



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
	yang ditangani				
4	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	60	46,67	77,78
Capaian Sasaran					86,56

Sumber : Polres Katingan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator sasaran dari meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal dengan indikator pertama persentase penurunan kasus kriminal dengan target 50 realisasi 73 dengan capaian 66% indikator negatif semakin tinggi realisasi maka merujuk pada parameter atau ukuran yang menunjukkan penurunan kinerja. Indikator yang kedua persentase penanganan kasus K3 memenuhi target dari 100 persen dan realisasi 100 persen. Indikator ketiga persentase konflik sosial yang ditangani target 100 persen dengan realisasi 100 persen mencapai target. Indikator yang keempat persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tidak mencapai target dari 60 realisasi 46,67.

Tabel 2.18

Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bermasyarakat Melalui Pendekatan Sosial Budaya Lokal 2024-2026

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase penurunan kasus kriminal	-	-	50	-	-	50	-	-	73
Persentase penanganan kasus K3	-	-	100	-	-	100	-	-	100
Persentase konflik sosial yang ditangani	-	-	100	-	-	100	-	-	100
Persentase benda,	100	100	60	100	100	60	100	100	46,67



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan									

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Indikator sasaran Persentase penurunan kasus kriminal, persentase penanganan kasus K3, Persentase konflik sosial yang ditangani tidak ada target dalam Sasaran daerah sebelumnya yaitu tahun 2018 sampai 2023 karena masih memakai dokumen perencanaan RPJMD. Indikator persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami penurunan dari dua tahun terakhir ini sehingga perlu komitmen pimpinan dalam pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Tabel 2.19
Perbandingan Indikator Sasaran Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman Bermasyarakat Melalui Pendekatan Sosial Budaya Lokal Target Akhir RPD 2024-2026

Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Persentase penurunan kasus kriminal	50	73	50
Persentase penanganan kasus K3	100	100	100
Persentase konflik sosial yang ditangani	100	100	100
Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	60	46,67	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan



Indikator persentase penurunan kasus kriminal tahun 2024 dengan realisasi 73 lumayan turun jauh dari akhir RPD yaitu 50 persen perlunya kalaborasi pemerintah daerah dengan instansi *vertical* untuk sama-sama mengatasi persoalan ini. Untuk indikator dua dan tiga sudah mencapai target sedangkan indikator keempat juga cukup jauh dari target RPD.

Indikator Kinerja Persentase Penurunan kasus kriminal, realisasi Kinerjanya tidak mencapai target dengan realisasi 73 dari target 50, hal ini dikarenakan kasus kriminal yang ditangani oleh Polres Katingan meningkat drastis bila dibandingkan dengan tahun 2023 khususnya tindak pidana narkoba, berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto, SIK pada tanggal 30 Desember 2024, dari data yang tercatat tindak pidana yang ditangani tahun 2024 yaitu tindak pidana narkoba sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) meningkat drastis dari tahun 2023 sebanyak 22 (dua puluh dua) tindak pidana, persetubuhan anak dibawah umur 13 (Tiga Belas) tindak pidana, Curat 9 (Sembilan) tidak pidana, judi 5 (Lima) tindak pidana, Anirat 4 (Empat) tindak pidana, dan pembunuhan 3 (Tiga) tindak pidana. Kegiatan yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar pada tahun 2024 yaitu, melaksanakan Patroli Gabungan Satpol PP, TNI dan Polri dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai bahaya narkoba dan judi online serta sosialisasi pencegahan kenakalan anak remaja. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja Persentase penanganan kasus K3 yaitu patroli pengamanan taman cerdas (KLA) dan fasilitas umum milik Pemerintah di Kabupaten Katingan, sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Katingan mengenai Kawasan tanpa rokok dan disiplin pelajar, patroli daerah pedagang kaki lima, penertiban baliho dan penertiban gepeng serta patroli pekat. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, partisipasi dalam penanggulangan bencana, meningkatnya partisipasi anggota linmas Kelurahan/Desa, meningkatnya kompetensi Satpol PP dan PPNS.

Indikator kinerja persentase penanganan kasus K3 tahun 2024 ini sesuai dengan RPD Kabupaten Katingan tahun 2024-2026, di mana indikator kinerjanya yaitu persentase konflik sosial yang ditangani yaitu dengan target 100%. Realiasi untuk indikator persentase konflik sosial yang ditangani ditahun 2024 ini 100%, perhitungan 100% berdasarkan jumlah konflik sosial yang terdiri dari beberapa jenis kasus diantaranya kasus konflik antaragama, kasus di bidang sosial, kasus di bidang pembauran/suku/etnis, dan kasus dibidang politik. Dari Jenis kasus diatas dibagi lagi menjadi 2 (dua) bentuk konflik di antaranya sebagai berikut :



a. Konflik Tertutup

Konflik tertutup merupakan konflik yang terjadi yang hanya diketahui / melibatkan oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang terlibat konflik. Di Kabupaten Katingan terdapat beberapa konflik tertutup diantaranya jenis konflik di bidang sosial yaitu konflik antara Masyarakat (beberapa orang) dengan perusahaan yang berdomisi di Kabupaten Katingan sebanyak 6 Kasus, Konflik antara kelompok masyarakat dengan Instansi Pemerintah ada 1 kasus, serta konflik antar masyarakat (personal/keluarga) yang harus melibatkan pemerintah daerah dalam penanganannya sebanyak 1 kasus. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu di antaranya memfasilitasi dalam penanganan konflik tersebut seperti upaya damai atau memberikan opsi /pertimbangan jalan penyelesaian sengketa yang terjadi.

b. Konflik Terbuka

Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh banyak orang / banyak pihak dan melibatkan banyak pihak dan mencakup wilayah yang luas dalam konflik tersebut. Di tahun 2024 Kabupaten Katingan tidak memiliki potensi konflik terbuka.

Kemudian indikator yang keempat pada tahun 2024 situs dan cagar budaya yang ditetapkan masih 7 situs cagar budaya, untuk target tahun 2024 yang berjumlah 15 situs cagar budaya tidak dapat direalisasikan hal ini akibat Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Katingan tidak dapat melaksanakan kegiatan Penetapan Penambahan Cagar Budaya di Kabupaten Katingan dan dari situs tersebut juga terdapat juru pelihara cagar budaya dan tidak mengalami perubahan. Perlu dijelaskan pula indikator ini dapat dilaksanakan dikarenakan data terkait cagar budaya adalah data yang sudah diusulkan pada tingkat kabupaten dimana anggaran yang tersedia masih terbatas untuk honor juru pelihara setempat dan masih belum dapat mengakomodir anggaran pemeliharaan kawasan cagar budaya itu sendiri, diharapkan adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana cagar budaya serta peningkatan SDM juru pelihara. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Katingan dengan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Hal ini dilakukan melalui upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahandengan cara penyelamatan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal yaitu program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, program penguatan ideologi pancasila dan



karakter kebangsaan, program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, program pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan, program pengembangan kebudayaan

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan dengan analisa sebagai berikut

Tabel 2.20
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Kelima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	52,50	50,74	96,65
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	89,00	95,20	106,97
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	86,00	87,54	101,79
Rata-rata capaian sasaran					101,80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Semester I telah dilaksanakan pada minggu ke dua Februari hingga minggu ke tiga Maret dan Semester II dilaksanakan pada minggu ke dua September hingga Minggu ketiga Oktober dengan mengambil sampel uji air Sungai Katingan sesuai dengan titik pantau yang ditetapkan dan telah disetujui KLHK sebanyak 27 titik pantau setiap 1 semester. Dari hasil pemantauan kualitas air yang dilaksanakan selama 2 semester dan hasil pengujian di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan diperoleh data dan dilakukan perhitungan sehingga diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Katingan tahun 2024 pada angka 50,74 poin. Berdasarkan nilai IKA tersebut menggambarkan kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Katingan umumnya berada dalam klasifikasi Cemar Sedang. Kegiatan pengambilan sampel udara ambien



dengan menggunakan *passive sampler* yang dikoordinir oleh KLHK sudah dilaksanakan selama 2 kali dalam setahun, kegiatan tersebut dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap I di bulan April - Juli 2024 serta tahap II di bulan Agustus - Oktober 2024. Hasil pengambilan sampel udara tersebut di analisis di PT. Mutu Agung Lestari Tbk Bogor. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Katingan tahun 2024 pada angka 95,20 poin. Ini menggambarkan kondisi kualitas udara di Kabupaten Katingan umumnya berada dalam klasifikasi Sangat Baik. Berdasarkan hasil perhitungan dan rekapitulasi yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada aplikasi IKLH KLHK nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Katingan tahun 2024 pada angka 87,54 poin. Ini menggambarkan kondisi tutupan lahan di wilayah Kabupaten Katingan umumnya berada dalam klasifikasi Baik.

Tabel Tabel 2.21

Target Dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Tahun 2022-2024

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	55	55	52.50	55	55	52.50	50,67	48,62	50,74
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,14	89,59	89	89,14	89,59	89	92,13	88,40	95,20
Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	87,04	87,48	86	87,04	87,48	86	87,10	87,36	87,54

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023 target indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) kurang dari realisasi sebelumnya karena melihat kondisi yang ada maka menurunkan target. terlihat dengan realisasi tahun 2023 target tidak tercapai.

Tabel 2.22

Perbandingan Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026

Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Indeks Kualitas Air (IKA)	52.50	50.74	53



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89	95,20	90
Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86.00	87,54	86,75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan

Dari ketiga indikator hanya Indeks Kualitas Udara (IKU) yang sudah melampaui target akhir RPD tahun 2026.

Tabel 2.23
Perbandingan Realisasi Indikator Kabupaten Dengan Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Kabupaten Katingan	Provinsi Kalimantan Tengah	Nasional
Indeks Kualitas Air (IKA)	50.74	52,33	54,76
Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,20	92,71	90,17
Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	87,54	75,38	62,25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2013 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu dengan metode Indeks Pencemaran (Pollution Index-PI). Perhitungan Indeks Kualitas air dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Setiap lokasi dan waktu pemantauan air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- Dihitung indeks pencemaran setiap sampel untuk parameter pH, DO, TSS, BOD, COD, Nitrat, T-Phospat dan Fecal Coli;
- Dihitung persentase jumlah sampel yang mempunyai nilai PIj > 1, terhadap total jumlah sampel pada tahun yang bersangkutan;



- d. Dilakukan normalisasi dari rentang nilai 0 % - 100 % (terbaik-terburuk) jumlah sampel dengan nilai $PI_j > 1$, menjadi nilai indeks dalam skala 0-100 (terburuk-terbaik).

Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Katingan umumnya berada di dalam klasifikasi Sedang, status mutu dalam kondisi Cemar Ringan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena peningkatan volume limbah padat dan cair ke badan air (sungai), baik berupa limbah dari kegiatan domestik, kegiatan penambangan di sungai dan DAS, masih adanya MCK di beberapa desa sehingga mengakibatkan peningkatan nilai parameter TSS dan Fecal Coliform. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO_2 dan NO_2 , Parameter $PM_{2.5}$ digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota :

- Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat);
- Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya);
- Pemukiman padat penduduk (*urban background*);
- Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi).

Data parameter kualitas udara pada perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Katingan menggunakan 2 parameter yaitu SO_2 dan NO_2 , diperoleh dari konsentrasi rata-rata pemantauan metode passive sampler pada 4 (empat) lokasi di wilayah Kecamatan Katingan hilir Kabupaten Katingan dengan periode 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu :

- Wilayah Perkantoran : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
- Wilayah Pemukiman : Depan Puskesmas Pembantu Jl. Bukit Raya Kasongan;
- Wilayah Industri : PT. Karya Sukses Sahabat Desa Hampangen;
- Wilayah Transportasi : Depan Jalan Kantor Bupati Katingan Kasongan.

Kondisi kualitas udara di Kabupaten Katingan umumnya berada dalam Klasifikasi Sangat Baik. Kualitas udara masih dapat dikendalikan melalui kegiatan pengelolaan lingkungan hidup seperti regulasi lingkungan yang ketat dan modifikasi cuaca. Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan Primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia, sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan dan pertanian menetap.



Indeks Tutupan hutan dihitung dengan prosentase luas tutupan hutan dengan luas wilayah Kabupaten Katingan. Selanjutnya dilakukan konversi persentase yang merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah kabupaten untuk menghitung Indeks Tutupan Hutan. Berdasarkan hasil perhitungan oleh KLHK dan dirilis pada aplikasi IKLH KLHK Nilai Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Katingan umumnya berada dalam Klasifikasi Baik. Hal ini menunjukkan bahwa luas tutupan hutan di wilayah Kabupaten Katingan harus dipertahankan serta dikelola secara bijaksana dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan yaitu program perencanaan lingkungan hidup program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHAYATI), program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH, program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup, program pengelolaan persampahan.

6. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah dengan analisis sebagai berikut

Tabel 2.24

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Kelima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Tahun 2024 (%)
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Persen	144,40	140,74	102,60

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan

Pada aspek realisasi, Indeks Risiko Bencana mencapai target dari 144,40 dengan realisasi 140,74. Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap acaman bencana, yang mencakup faktor-faktor seperti acaman, kerentanan dan kapasitas.



Tabel Tabel 2.25
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana Daerah
Tahun 2022-2024

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRB)	-	-	52,50	-	-	144,40	-	-	102,60

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Katingan tidak termuat dalam dokumen perencanaan daerah kabupaten katingan atau RPJMD tahun 2018-2023 tetapi baru muncul pada RPD tahun 2024-2026.

Tabel 2.26
Perbandingan Indeks Risiko Bencana (IRB) terhadap Target Akhir RPD 2024-2026

Indikator Kinerja	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Indeks Risiko Bencana (IRB)	144,40	140,74	142,2

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan

Membandingkan potensi ancaman, ketahanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, memberikan gambaran capaian penanggulangan bencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta membantu menentukan prioritas kebijakan.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan :

- Ancaman : Potensi terjadinya bencana alam (misalnya banjir, gempa, longsor, karhutla) ;
- Kerentanan : Tingkat kerentanan penduduk dan infrastruktur terhadap ancaman bencana;
- Kepastian : Kemampuan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana.

Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana terlepas dari upaya-upaya seperti tersusunnya regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah,



penyusunan dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah dan sosialisasi. Dilihat dari aspek ketahanan bencana lainnya, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu sudah baik. Pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah upaya untuk menghasilkan tingkat risiko bencana di suatu daerah melalui perhitungan tiga komponen utama, yaitu: bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameternya masing-masing. Komponen bahaya ditentukan melalui analisis probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian). Komponen kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter, yaitu: kerentanan sosial (penduduk terpapar), kerentanan ekonomi (kerugian lahan produktif), kerentanan fisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan kerentanan lingkungan (kerusakan lingkungan). Terakhir, komponen kapasitas ditentukan menggunakan dua parameter, yaitu: ketahanan daerah (sektor pemerintah) dan kesiapsiagaan masyarakat (sektor masyarakat). Hasil penggabungan ketiga komponen tersebut berupa risiko bencana yang memberikan informasi mengenai perbandingan antara kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Dalam kata lain, tingkat risiko bencana menunjukkan kemampuan daerah dalam mengurangi dampak dari kerugian yang timbul akibat bencana.

Hasil dari pengkajian risiko bencana berupa peta dan tabel kajian risiko bencana. Peta memberikan informasi mengenai sebaran wilayah yang terdampak. Adapun peta yang dihasilkan meliputi: peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta risiko bencana. Di sisi lain, tabel kajian menyajikan data berupa: luas, jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan kelas. Dari hasil tersebut bisa ditentukan tingkat bahaya, tingkat kerugian, tingkat kapasitas, dan tingkat risiko bencana masing-masing bahaya, yang diklasifikasikan ke dalam tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Secara umum tingkat bahaya menunjukkan bahwa tidak semua wilayah yang terdampak bahaya memiliki tingkat bahaya tinggi. Sebagai contoh, tanah longsor yang terjadi di bukit yang jauh dari pemukiman memiliki tingkat bahaya lebih rendah dibandingkan dengan tanah longsor yang terjadi di area pemukiman. Oleh karena itu, tingkat bahaya diperoleh dari perbandingan antara indeks bahaya dengan indeks penduduk terpapar. Setelah itu, tingkat kerugian yang diperoleh dari perbandingan antara tingkat bahaya dengan indeks kerugian. Tingkat kerugian menunjukkan wilayah yang memiliki indeks kerugian tinggi di wilayah dengan tingkat bahaya sedang dan tinggi. Di sisi lain, tingkat kapasitas diperoleh dari tingkat bahaya dan indeks kapasitas. Tingkat kapasitas tinggi menunjukkan daerah tersebut mampu menghadapi tingkat bahaya yang ada. Sebagai contoh,



meskipun sering dilanda Kekeringan Meteorologi tetapi warga dan pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam antisipasinya. Terakhir, tingkat risiko bencana yang diperoleh dari perbandingan tingkat kerugian dengan tingkat kapasitas. Tingkat risiko bencana tinggi menunjukkan kapasitas daerah dalam mengurangi kerugian yang ada masih rendah, sedangkan tingkat risiko rendah menunjukkan bahwa daerah telah memiliki kapasitas dalam mengurangi tingkat kerugian yang ada. Di dalam tabel kajian, rekapitulasi disajikan dari tingkat kelurahan, kemantren, dan kota. Berdasarkan kedua output tersebut, dapat ditentukan kelurahan-kelurahan mana saja yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, sehingga pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana menjadi lebih terarah.

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah yaitu program penanggulangan bencana, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 2.27
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Ketujuh

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP	Predkat	B	B	100
2	Nilai LPPD	Kriteria	Sedang	Masih Proses Penilaian	-
3	Opini BPK	Predikat	WTP	Masih proses penilaian	-
4	Nilai MCP	Indeks	84	87	103,57
Rata-rata capaian sasaran					101,75

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Inspektorat

Indikator sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP mendapat nilai atau predikat B. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan sudah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pelaksanaan Sistem



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kabupaten Katingan Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/394/AA.05/2024 tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan nilai 61,13 dengan predikat B mengalami penurunan nilai dari tahun 2023. Mengacu pada Lembar Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Kabupaten Katingan Tahun 2024 berikut adalah rincian nilai akuntabilitas berdasarkan komponen aspek penilaian :

Tabel 2.28
Realisasi Komponen Penilaian SAKIP dari Tahun 2022-2023

No	Aspek Penilaian	Bobot	Realisasi		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	21,71	21,80	21,37
2	Pengukuran Kinerja	30	17,96	18,12	17,94
3	Pelaporan Kinerja	15	8,19	8,11	8,18
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,30	13,42	13,64
5	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,16	61,45	61,13
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

Sumber : Kementerian PANRB

Berdasarkan tabel hasil evaluasi di atas menunjukkan mengalami penurunan realisasi dari tahun 2023. Untuk indikator nilai LPPD dan Opini BPK masih proses penilaian dari instansi pembina. Realisasi nilai MCP tahun 2024 melebihi target yang telah ditentukan dengan 84 sedangkan realisasi 87 dengan nilai capaian 103,57.

Tabel 2.29
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2022-2024

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	BB	A	CC	BB	BB	B	B	B	B
Nilai LPPD	-	-	Tinggi	-	-	Sedang	2.73	Proses	Proses



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses
Nilai MCP	-	-	84	-	-	84	83	78	87

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Inspektorat

Indikator nilai SAKIP jika melihat target pada RPJMD tahun 2022 dan 2023 serta target RPD tahun 2024 berbeda dengan perjanjian kinerja karena tidak memungkinkan untuk mencapai target tersebut sehingga dikondisikan dengan keadaan yang ada. Tahun 2022 dua indikator tidak masuk dalam indikator sasaran daerah yaitu nilai LPPD dan nilai MCP, baru masuk pada tahun 2024 saat Pemerintah Kabupaten Katingan memakai dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Sementara untuk nilai MCP memiliki tren positif naik tiap tahun.

Tabel 2.30

Perbandingan Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Akuntabel Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026

Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Nilai SAKIP	B	B	BB
Nilai LPPD	Sedang	Masih proses penilaian	Tinggi
Opini BPK	WTP	Masih proses penilaian	WTP
Nilai MCP	84	87	86

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Inspektorat

Jika melihat capaian tahun 2024 dengan target akhir RPD tidak terlalu jauh sehingga perlu komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah instansi pemerintah dalam mencapai target akhir capaian RPD. Dan Nilai MCP sudah melampaui target akhir RPD tahun 2026 ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menyikapi nilai ini.

Dilihat dari progres capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebagai berikut :

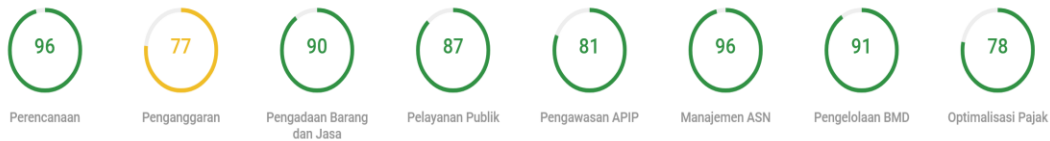


LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024

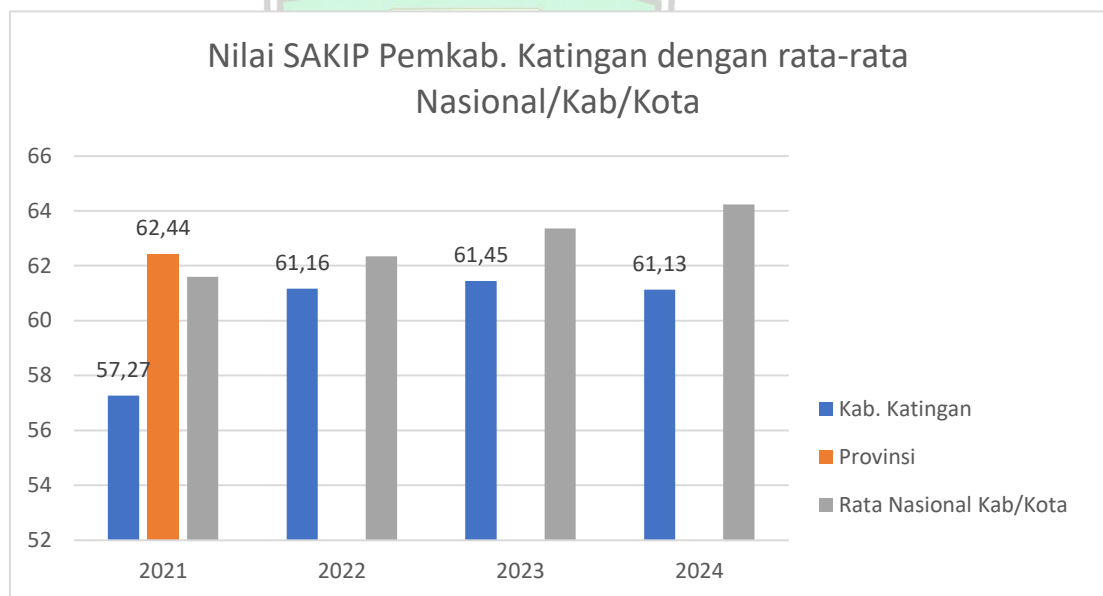
8 AREA TAHUN 2023



8 AREA TAHUN 2024



Grafik 2.3 Nilai SAKIP Kabupaten Katingan dan rata-rata nasional



Rata-rata nilai SAKIP seluruh pemkab/pemkot se Indonesia tahun 2024 sebesar 64,23. Ada beberapa komponen yang dinilai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Banyak hal lain yang masih menjadi catatan aspek penilaian yang akan menjadi bahan perbaikan tahun 2025. Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan adalah menindaklanjuti Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun sebelumnya serta mencermati kembali dan meningkatkan kualitas aspek penilaian



per komponen. Berikut ini tindaklanjut atas Lembar Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pada tahun 2024 melaksanakan rekomendasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.31
Reformasi Birokrasi tahun 2023

No	Rekomendasi LHE 2023	Status/Progres Penyelesaian
1	Dalam penyusunan atau dalam mereviu perencanaan kinerja agar tetap mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (<i>result oriented</i>), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (<i>integrated development plan</i>), mekanisme perjenjangan kinerja, serta kualitas pemantauan dan evaluasi kinerja.	Bappedalitbang telah melaksanakan Konsultasi Publik, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, dan membuat kamus usulan dalam Aplikasi SIPD untuk usulan aspirasi dari masyarakat dan usulan pokir dari DPRD dalam penyusunan atau dalam mereviu perencanaan kinerja agar tetap mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat untuk perencanaan RKPD Tahun 2024.
2	Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (<i>outcome</i>) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup, sehingga dapat menjawab isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Katingan. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berdampak langsung bagi masyarakat	Bappedalitbang telah melaksanakan sinkronisasi renja per OPD yang dilaksanakan oleh setiap Bidang Mitra Bappedalitbang sesuai dengan OPD yang di ampu dan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (<i>outcome</i>) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup, sehingga dapat menjawab isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Katingan. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berdampak langsung bagi masyarakat
3	Melakukan <i>reviu</i> dan perbaikan narasi kinerja pada dokumen perencanaan level pusat maupun unit kerja untuk memastikan kejelasan substansi kinerja dan/atau kondisi yang ingin dicapai:	Bappedalitbang sudah melakukan penyalarsan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten dalam Aplikasi SIPD dalam reviu dan perbaikan narasi kinerja pada dokumen perencanaan level pusat maupun unit kerja untuk memastikan kejelasan substansi kinerja dan/atau kondisi yang ingin dicapai
4	Menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara	Bappedalitbang telah mengarahkan kepada setiap OPD dalam penyusunan perencanaan dalam Aplikasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Rekomendasi LHE 2023	Status/Progres Penyelesaian
	memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja.	setiap Pegawai sesuai dengan Jabatan yang di ampu dalam menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021.
5	Memastikan reviu dan perbaikan untuk seluruh dokumen IKU utamanya pada PD dengan memastikan keberadaan definisi operasional yang jelas, rumus perhitungan dan sumber data yang sesuai dan relevan dengan substansi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan	Bappedalitbang telah melaksanakan sinkronisasi renja per OPD yang dilaksanakan oleh setiap Bidang Mitra Bappedalitbang sesuai dengan OPD yang di ampu dan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memastikan reviu dan perbaikan untuk seluruh dokumen IKU utamanya pada PD dengan memastikan keberadaan definisi operasional yang jelas, rumus perhitungan dan sumber data yang sesuai dan relevan dengan substansi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan
6	Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;	Bappedalitbang telah melaksanakan Rakordal per triwulan dalam memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan
7	Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan cara aktif dan <i>update</i> menyampaikan pengukuran capaian kinerja dan pimpinan memberikan <i>feedback</i> perbaikan sebagai bentuk pengawasan terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki	Membuat <i>WhatsApp Group</i> yang anggotanya terdiri dari pejabat eselon II dan pejabat yang menangani SAKIP dan admin sippekat di seluruh perangkat daerah, sehingga pimpinan dapat memantau langsung aktivitas dan mengetahui laporan yang <i>update</i>
8	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik.	<p>✓ Bappedalitbang telah mengarahkan kepada setiap OPD dalam penyusunan perencanaan dalam aplikasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab setiap Pegawai sesuai dengan Jabatan yang di ampu dalam mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik.</p> <p>✓ BKPSDM melaksanakan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Sosialisasi dan Pendampingan terkait Penerapan sistem Informasi e Kinerja BKN pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten</p>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Rekomendasi LHE 2023	Status/Progres Penyelesaian
		<p>Katingan;</p> <p>b. Pendampingan Mandiri masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;</p> <p>c. SKP 2023 sudah menggunakan cetak/<i>print out</i> dari Aplikasi e Kinerja BKN sebagai penilaian capaian kinerja ASN dan organisasi;</p> <p>d. Penilaian SKP ASN dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi dari hasil penilaian capaian Kinerja baik bulanan, triwulan, semester atau Tahunan sebagai dasar penilaian pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja;</p> <p>e. Menindaklanjuti setiap Progres input dan penilaian SKP di e Kinerja BKN dengan menginformasikan melalui <i>WhatsApp Group</i> khusus e Kinerja ASN Kabupaten Katingan;</p> <p>f. SKP ASN dalam e kinerja BKN dapat dimonitoring melalui fitur Monitoring dalam Manajemen SKP dari Akun e Kinerja Admin Instansi untuk mengecek status SKP, belum atau sudah dinilai.</p> <p>✓ Memaksimalkan pemanfaatan e-Kinerja untuk pemberian <i>reward and punishment</i></p>
9	Memperbaiki kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja level pusat dan unit kerja, diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja akhir periode Renstra. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya	<p>✓ Mengikuti bimtek penyusunan LPPD</p> <p>✓ Melakukan pendampingan pada Perangkat daerah terkait penyusunan Lakip Perangkat Daerah</p>
10	Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP OPD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam	Informasi yang ada dalam LPPD dipertimbangkan dalam penyusunan RKPd khususnya pada Bab II, Bab IV, Bab V, Bab VI dan LAKIP OPD menjadi pertimbangan masing-masing OPD dalam penyusunan Renja. Dalam penyusunan RKPd



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Rekomendasi LHE 2023	Status/Progres Penyelesaian
	dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;	tentunya mendasarkan pada Permendagri tentang penyusunan RKPD maupun hasil dari konsultasi Gubernur untuk penentuan masukan terhadap target yang dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan
11	Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD.	Didalam Naskah Hasil Evaluasi dan Laporan Hasil Evaluasi pada saat Evaluasi AKIP Telah dibuat uraian singkat terkait nilai dan predikat perolehan tahunan berdasarkan evaluasi beserta prosesnya apakah mengalami peningkatan, tetap atau penurunan terdapat perubahan pada sebagian, keseluruhan atau sedikit komponen dan sub komponennya Terdapat uraian perbaikan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal serta hal-hal yang mendapat perhatian
12	Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran Langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkat pencapaian seluruh target kinerja.	Didalam Naskah Hasil Evaluasi dan Laporan Hasil Evaluasi termuat uraian perbaikan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal serta hal-hal yang mendapat perhatian untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja

Sumber : Bagian Organisasi

Dalam pelaksanaan SAKIP tahun 2024 Kabupaten Katingan masih banyak kelemahan dari perencanaan, pengukuran, pelaporan yang akan menjadi bahan perbaikan tahun 2025, diantaranya :

a. Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Terjadi penurunan kualitas dalam perumusan kinerja dibandingkan dengan periode sebelumnya. Masih terdapat rumusan tujuan dan sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan PD yang belum spesifik serta berorientasi outcome/hasil berdasarkan tingkat jabatan yang mengampunya;
- 2) Berdasarkan rumusan kinerja yang ditetapkan, masih ditemukan indikator kinerja yang belum bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound) pada dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah maupun PD;



- 3) Rencana aksi kinerja yang disusun cenderung hanya menjabarkan rencana penyerapan anggaran tahun berjalan, belum menjabarkan target realisasi terhadap rencana aksi kinerja secara triwulanan;
- 4) Penyusunan pohon kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan PD untuk tahun 2024-2026 masih cenderung menghubungkan kinerja dengan komponen perencanaan dan hirarki struktur organisasi yang sudah ada, sehingga penjenjangan kinerja yang disusun belum dapat memenuhi prinsip logis penjenjangan kinerja dalam upaya mewujudkan kinerja utama organisasi.

b. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Belum semua informasi atas indikator kinerja utama telah disampaikan oleh PD dengan memadai pada dokumen IKU. Beberapa dokumen IKU milik PD masih belum menyajikan informasi terkait definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data dan penanggung jawab atas indikator kinerja yang diperjanjikan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas dalam melakukan pengumpulan dan pengukuran data kinerja setiap PD:
- 2) Pengukuran kinerja secara berkala masih dilakukan dengan dua metode yang berbeda, yaitu dilakukan melalui aplikasi Sippekat dan dilakukan secara manual oleh Bappedalitbang. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Sippekat masih belum sepenuhnya baik, ditandai dengan masih banyaknya isian yang masih kosong pada aplikasi. Hal ini menunjukkan pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

c. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Belum seluruh laporan kinerja yang disusun menyajikan informasi terkait analisis perbandingan kinerja dengan beberapa tahun terakhir, analisis perbandingan dengan standar nasional dan analisis program'/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang memadai:



- 2) Masih terdapat perhitungan capaian kinerja yang tidak logis atas realisasi kinerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja tingkat PD tahun 2023, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi kurang relevan dan akuntabel dalam melaporkan hasil kinerja. Selain itu, masih ditemukan laporan kinerja tingkat PD yang tidak menyajikan informasi analisis capaian kinerja, melainkan informasi yang disampaikan hanya sebatas data capaian kerjanya saja: Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja yang stagnan tidak mengalami kenaikan dan atau lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- 1) Inspektorat daerah telah melaksanakan evaluasi AKIP Internal atas implementasi SAKIP PD, namun masih cenderung berfokus pada aspek pemenuhan/keberadaan. Evaluasi internal belum berfokus memberikan catatan dan rekomendasi terhadap aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen akuntabilitas kinerja:
 - 2) Evaluasi Internal belum sepenuhnya berdampak pada perbaikan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi evaluasi yang diberikan belum.

Solusi untuk tahun 2025 yaitu menindaklanjuti rekomendasi atau permasalahan tersebut. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Katingan sudah berupaya melakukan beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan indeks MCP sebagai salah satu mendukung pencegahan korupsi :

- a) Pelaksanaan Pengawasan anggaran APBD atas Pokok-pokok Pikiran Legislatif;
- b) Menyusun peraturan kepala daerah atas SSH, ASB dan Integrasi kedalam SIPD ;
- c) Melakukan reuiu RKA dan KUA PPAS;
- d) Melaksanakan kepatuhan PBJ dan melaksanakan reuiu/ probity audit;
- e) Mendorong Proses RDTR/RTRW;
- f) Melakukan perbaikan atas tata kelola sektor perijinan, pendidikan, kependudukan, dan kesehatan dengan melakukan pengawasan kinerja atas keberlangsungan pelayanan publik;
- g) Mengoptimalkan pengelolaan aset serta pajak daerah.



Langkah-langkah ini diambil dari catatan kekurangan atas hasil MCP 2023, namun pada tahun 2024 masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan pada setiap area salah satunya pada area penganggaran serta Area Optimalisasi Pajak. Pada tahun 2024 ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya antara lain :

- a) Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi pada setiap area intervensi pada semua perangkat daerah terkait untuk meningkatkan progres capaian aksi;
- b) Mendorong Proses RDTR/RTRW yaitu pemenuhan laporan serta progres yang masih dalam tahapan sesuai target;
- c) Menyusun peraturan kepala daerah terkait SSH, ASB, HSPK baik Fisik maupun Non Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) Pengelolaan kewajiban pertanggungjawaban atas anggaran Hibah dan Bantuan Keuangan ;
- e) Pelaksanaan penandatanganan Fakta Integritas atas pembahasan KUA PPAS bersama dengan legislatif ;
- f) Pelaksanaan lelang dini atas PBJ;
- g) Peningkatan pelayanan publik pada 4 sektor;
- h) Peningkatan optimalisasi capaian pajak daerah serta optimalisasinya secara menyeluruh atas potensi pajak daerah;
- i) Mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat atas kinerja daerah maupun laporan pengaduan yang berkadar pengawasan maupun tidak berkadar pengawasan untuk ditindaklanjuti serta menyediakan sarana saluran pengaduan sistem elektronik maupun non elektronik;
- j) Melaksanakan penertiban, pengelolaan dan pengamanan BMD serta pengawasannya secara menyeluruh atas sertifikasi aset dan aset yang dikuasai pihak lain
- k) Menyusun Peraturan terkait Pola Karir ASN;
- l) Menindaklanjuti Hasil Survei Penilaian Integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi serta sosialisasinya.

Program yang mendukung pencapaian meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel yaitu program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program perekonomian dan pembangunan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan daerah, program



penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, program pengelolaan pendapatan daerah, program penyelenggaraan pengawasan, program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, program pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, program pengelolaan arsip, program perlindungan dan penyelamatan arsip, program kepegawaian daerah, program pengembangan sumber daya manusia.

8. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 2.32
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Kedelapan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	85	84,77	98,82
2	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,01	3,60	119
3	Indeks SPBE	Angka	3,03	3,25	107,26
4	Persentase desa berkembang	Persen	63	60,38	95,84
Capaian sasaran					105,14

Sumber: Kemen PAN RB, Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perhitungan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 target 85 dengan realisasi 84,77 dengan capaian rasio 98,82% ini menunjukkan penurunan nilai dari tahun sebelumnya dengan nilai 84,90 dengan capaian 92,82. Indeks Pelayanan Publik yang tidak tertuang pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) atau indikator sasaran daerah tetapi masuk dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Katingan Tahun dengan target 3,01. Berdasarkan Hasil Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 659 tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada lingkungan pemerintah daerah tahun 2024 dengan realisasi 3.60 melebihi dari target 3,01. Peningkatan



indeks SPBE yang cukup signifikan dari 2,25 (2022) kategori Cukup menjadi 3,25 pada tahun 2024 kategori Baik menunjukkan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam implementasi SPBE, baik itu pada peningkatan domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, maupun layanan SPBE. Tahun 2024 indikator Persentase desa berkembang tidak mencapai dari target yang sudah ditentukan dari 63 persen realisasi 60,38.

Tabel 2.33
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat Tahun 2022-2024

Indikator	Target RPJMD/RPD			Target Perjanjian Kinerja			Realisasi		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	85	B	88,31	85	B	85,06	84,77
Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	3,01	-	-	3,60
Indeks SPBE	2,25	3,02	3,03	2,25	3,02	3,03	2,25	3,02	3,25
Persentase desa berkembang	-	-	63	-	-	63	-	-	60,38

Sumber: Kemen PAN RB, Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun mengalami tren yang cukup baik namun pada tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan ada penambahan signifikan jumlah UPP yang menyelenggarakan IKM. Indeks Pelayanan Publik yang tidak tertuang pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 atau indikator Sasaran Daerah tetapi masuk dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Katingan Tahun. Indeks SPBE Kabupaten mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 dengan nilai 2,25 (kategori Cukup) meningkat menjadi 3,25 (kategori Baik). Tren ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dan perbaikan pada domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE.



Tabel 2.34
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat terhadap Target Akhir RPD 2024-2026

Indikator Kinerja Utama/Perjanjian Kinerja	2024		2026
	Target	Realisasi	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	84,77	86,00
Indeks Pelayanan Publik	3,01	3,60	-
Indeks SPBE	3,03	3,25	3,05
Persentase desa berkembang	63	60,38	76

Sumber : Kemen PAN RB, Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dikarenakan ada penambahan signifikan jumlah UPP yang menyelenggarakan SKM, dimana pada tahun 2023 ada 9 UPP, dan pada tahun 2024 ini jumlah UPP yang menyelenggarakan SKM adalah 27 UPP. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Katingan menargetkan seluruh UPP yang berjumlah 40 UPP dapat menyelenggarakan SKM.

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Katingan Tahun 2024 pada 27 (dua puluh tujuh) perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2024 adalah 86,37, mutu B dan kinerja Baik;
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk tahun 2024 adalah 93,44, mutu A dan kinerja Baik;
- 3) Dinas Kesehatan, untuk tahun 2024 adalah 82,24, mutu B dan kinerja Baik;
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2024 adalah 77,30 mutu B dan kinerja Baik
- 5) Dinas Sosial untuk tahun 2024 adalah 91,59, mutu A dan kinerja Sangat Baik;
- 6) Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2024 adalah 86,26 dan mutu B dan kinerja Baik
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2024 adalah 86,76, mutu B dan kinerja Baik;



- 8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2024 adalah 83,11, mutu B dan kinerja Baik
- 9) Sekretariat Dewan untuk tahun 2024 adalah 88,12, mutu B dan kinerja Baik;
- 10) Sekretariat Daerah untuk tahun 2024 adalah 85,83, mutu B dan kinerja Baik;
- 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2024 adalah 80,18, mutu B dan kinerja Baik;
- 12) Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata untuk tahun 2024 adalah 80,03, mutu B dan kinerja Baik;
- 13) Dinas Pendidikan untuk tahun 2024 adalah 80,19, mutu B dan kinerja Baik;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian untuk tahun 2024 adalah 84,92, mutu B dan kinerja Baik;
- 15) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk tahun 2024 adalah 80,94, mutu B dan kinerja Baik;
- 16) Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2024 adalah 85,75, mutu B dan kinerja Baik;
- 17) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2024 adalah 89,75, mutu A dan kinerja Sangat Baik;
- 18) Inspektorat untuk tahun 2024 adalah 80,60, mutu B dan kinerja Baik;
- 19) Kecamatan Katingan Hilir untuk tahun 2024 adalah 84,80, mutu B dan kinerja Baik;
- 20) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2024 adalah 88,73, mutu A dan kinerja Sangat Baik;
- 21) Kecamatan Mendawai untuk tahun 2024 adalah 83,57, mutu B dan kinerja Baik;
- 22) Kecamatan Pulau Malan untuk tahun 2024 adalah 83,70, mutu B dan kinerja Baik;
- 23) Kecamatan Tasik Payawan untuk tahun 2024 adalah 84,80, mutu B dan kinerja Baik;
- 24) Kecamatan Tewang Sangalang Garing untuk tahun 2024 adalah 86,75, mutu B dan kinerja Baik;
- 25) BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan untuk tahun 2024 adalah 80,85, mutu B dan kinerja Baik;
- 26) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk tahun 2024 adalah 87,44, mutu B dan kinerja Baik;
- 27) Kecamatan Katingan Kuala untuk tahun 2024 adalah 85,78, mutu B dan kinerja Baik;



Sehingga nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Katingan untuk Tahun 2024 adalah 84,77, mutu B dan kinerja Baik. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 sebagai pembina pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan Surat Edaran Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, yang isinya mewajibkan seluruh Unit Pelayanan Publik untuk menyelenggarakan SKM secara berkala. Dalam Surat Edaran tersebut juga memuat mekanisme dan prosedur penyelenggaraan SKM serta penyusunan Laporan SKM;
- 2) Melakukan sharing dan koordinasi langsung dengan pihak Kementerian PANRB terkait tingkat partisipasi UPP dalam penyelenggaraan SKM di Pemerintah Kabupaten Katingan yang masih sangat rendah;
- 3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan SKM dengan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB;
- 4) Memberikan pendampingan kepada UPP dalam menyelenggarakan SKM serta menyusun Laporan SKM dan Laporan Tindak Lanjut Hasil SKM tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 terdapat 27 UPP dari 40 UPP yang telah menyampaikan Laporan SKM kepada Bagian Organisasi. Sedangkan 13 UPP belum dapat menyampaikan laporannya. Dari seluruh perangkat daerah yang telah menyampaikan Laporan SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat. Upaya untuk meningkatkan skor IKM (untuk tahun 2025) yaitu:

- 1) Membuat kembali Surat Edaran Bupati Katingan tentang penyelenggaraan SKM dan mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk menyelenggarakan SKM;
- 2) Memacu 13 perangkat daerah yang belum dapat menyampaikan Laporan SKM pada tahun 2024;
- 3) Mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk membuat SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan kerja sama;
- 4) Mengevaluasi indikator IKM yang ada pada Renstra perangkat daerah masing-masing;



- 5) Memberikan pendampingan kepada UPP dalam menyelenggarakan SKM serta menyusun Laporan SKM dan Laporan Tindak Lanjut Hasil SKM tahun sebelumnya.

Indeks pelayanan publik mencapai target tidak lepas dari upaya kolaborasi antar lembaga atau instansi terkait untuk memastikan layanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien dan melaksanakan pendampingan pengisian F01 dan F03 kepada ULE serta mendorong ULE untuk melengkapi bukti dukung yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan RSUD Mas Amsyar.

Penyebab Keberhasilan yaitu komitmen pimpinan daerah dengan adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mempercepat implementasi kebijakan, pelatihan dan penguatan SDM dengan melakukan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi, infrastruktur yang memadai dengan tersedianya perangkat keras dan lunak yang memadai mendukung operasional SPBE dengan lebih efektif. Tantangan dalam dalam peningkatan SPBE yaitu Perbedaan infrastruktur dan pengelolaan antara daerah dapat menyebabkan perbedaan signifikan pada hasil akhir. Untuk mempertahankan keberhasilan serta mengatasi kekurangan yang ada, berikut adalah alternatif solusi:

1) Evaluasi Program Secara Berkala

Melakukan evaluasi rutin terhadap program-program SPBE untuk mengidentifikasi area-area perbaikan secara tepat waktu.

2) Penguatan Kolaborasi Antar Instansi

Membangun kerja sama dengan instansi lain dalam hal pertukaran informasi serta pengalaman terbaik (*best practices*) dalam implementasi *e-government*.

3) Investasi pada Infrastruktur TI

Mengalokasikan anggaran tambahan untuk peningkatan infrastruktur TI demi mendukung keandalan sistem serta keamanan data.

4) Program Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan

Meneruskan program pelatihan dan workshop bagi pegawai secara berkelanjutan agar mereka tetap update dengan perkembangan teknologi dan metodologi terbaru dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

5) Peningkatan Sosialisasi kepada Publik



Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai layanan yang ditawarkan melalui SPBE agar mereka lebih terdorong untuk memanfaatkan layanan tersebut, serta memberikan umpan balik terkait pengalaman mereka.

- 6) Monitoring dan Feedback dari Pengguna
- 7) Mengimplementasikan sistem feedback dari pengguna untuk mendapatkan masukan langsung tentang kendala atau masalah yang dihadapi dalam menggunakan SPBE, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

Target Kabupaten Katingan sebesar 15 desa pada tahun 2024 dan 30 desa mandiri hingga tahun 2026 dari 154 Desa yang ada, sehingga capaian Desa Mandiri Kabupaten Katingan di tahun 2024 sebanyak 8 Desa. Upaya yang dilakukan selama tahun 2024 dalam upaya pembinaan desa yaitu Pembinaan Perangkat Desa dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Katingan, peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia (KPM) di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Katingan, Pembinaan 10 program pokok PKK, memfasilitasi Pembinaan BUMDES, memfasilitasi penyelesaian masalah Aset BUMDES. Terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan yang menjadi kendala pencapaian target tersebut, yaitu

- 1) Belum meratanya tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara cepat dan tepat;
- 2) Adanya kesenjangan penguasaan mu pengetahuan teki logi dan pengembangan;
- 3) Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai, perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa.
- 5) Jumlah dan kapasitas aparatur masih belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja

Alternatif solusi yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2024 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas adalah sebagai berikut;

- 1) Terus berupaya meningkatkan wawasan dan kompetensi aparatur serta menyesuaikan kapasitas SDM yang ada dengan kebutuhan fasilitas penunjang pelayanan terkait aparatur yang



- mampu mengelolanya, dengan melakukan pembinaan teknis (bimtek) administrasi pemerintahan umum secara berkala kepada pegawai;
- 2) Melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh oleh pimpinan sebagai evaluasi kinerja pelayanan guna mengidentifikasi sumber penyebab permasalahan dan kekurangan pelayanan, sehingga ke depannya dapat dilakukan upaya-upaya pembenahan secara berkelanjutan seperti peningkatan kualitas aparatur dalam pelatihan pengelolaan aset daerah;
 - 3) Terus meningkatkan pembenahan kinerja perangkat aparatur melalui evaluasi kinerja aparatur secara berkala sehingga kualitas pelayanan publik dapat selalu terpantau dan terawasi dengan baik;
 - 4) Mengikutsertakan perwakilan pemerintah dari tiap desa dalam setiap Program Kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat di wilayah Kabupaten Katingan juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat yaitu program pelayanan penanaman modal, program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, program penataan desa, program peningkatan kerja sama desa, program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau biaya/anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja serta menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang ditetapkan telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi anggaran dalam tiap sasaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:



- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran mencapai 100% atau lebih, dan persentase realisasi anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran kurang dari 100%, dan/atau persentase realisasi anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran tersebut.

Analisis efiesiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada tahun 2023 terlampir sebagaimana tabel berikut:





**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tabel 2.35
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran		Indikator	Kinerja			Anggaran			Keterangan
			Target Perkin	Relisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realiasi	Capaian	
1.1	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,36	3,32	171	Rp 21.515.406.419,56	Rp 17.344.584.031,00	80,61	Efisien
		Persentase Kecamatan Rawan Pangan	7,7	23,08					
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,20	5,86					
		LPE Kategori Industri Pengolahan	3,12	0,78					
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	2,28	5,83					
		Persentase pertumbuhan nilai investasi	0,6	0,46					
2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,86	8,95	104,57	Rp 360.260.699.239,00	Rp 311.459.607.039,51	86,45	Efisien
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,99	12,99					



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

		Angka Harapan Hidup (AHH)	74	74,14					
		Prevalensi Stunting	14	10,5					
		Persentase penduduk miskin	4,95	5,26					
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,90	4,88					
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,20	89,31					
3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase jalan dalam kondisi mantap	40,33	37,88	94,94	Rp 150.373.018.573,00	Rp 143.575.948.745,11	95,48	Efisien
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap	75,33	61,75					
		Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	20	16,24					
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	62	61,62					
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	75	76,66					
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	43,17	43,17					



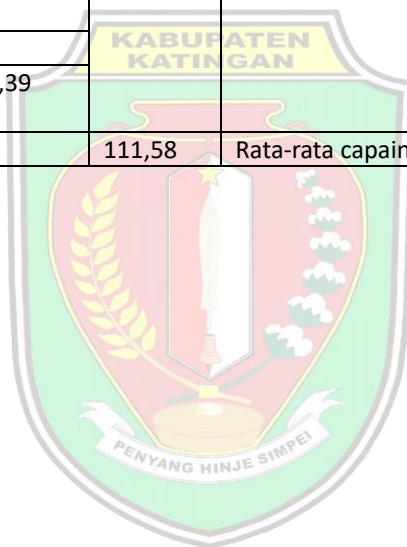
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

		Persentase permukiman kumuh yang ditangani	70	78,98					
4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal	Persentase penurunan kasus kriminal	50	73	86,56	Rp 44.134.226.678,00	Rp 43.251.238.872,00	97,99	Efisien
		Persentase penanganan kasus K3	100	100					
		Persentase konflik sosial yang ditangani	100	100					
		Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	60	46,67					
5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	52.50	50,74	101,80	Rp 12.540.768.500,00	Rp 11.953.911.048,00	95,32	Efisien
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.00	95,20					
		Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86.00	87,54					
5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	144,40	140,74		Rp 5.944.684.052	Rp 5.219.098.8320	87,79	Efisien
6.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang	Nilai SAKIP	B	B	101,75	Rp 1.093.402.219.008,05	Rp1.002.584.964.098,60	91,69	Efisien
		Nilai LPPD	Tinggi	Masih Prose					



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

	bersih dan akuntabel	Opini BPK	WTP	penilaian Masih Prose penilaian					
		Nilai MCP	84	87					
6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	84,77	105,14	Rp 16.442.024.656,20	Rp 5.330.285.350,47	93,23	Efisien
		Indeks Pelayanan Publik	3,01	3,60					
		Indeks SPBE	B	B					
		Persentase desa berkembang	63	60,39					
Rata-rata capaian					111,58	Rata-rata capain		91,07	





Berdasarkan informasi yang tertuang pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar 111,58% dengan realisasi anggaran sebesar 91,07%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Katingan sudah cukup efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja sasaran daerah. Kemudian secara umum capaian anggaran pada seluruh sasaran daerah juga sudah baik karena tidak ada capaian dengan capaian keuangan lebih dari capaian kinerja.





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Katingan tidak memperoleh anggaran melalui kegiatan yang bersumber Dana Tugas Pembantuan. Perangkat Daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan mendapatkan tambahan dari SILPA Dana Bagi Hasil Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pada Tahun Anggaran 2024, BPBD Kabupaten Katingan juga melaksanakan kegiatan yang berasal dari Dana Hibah pada tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 3.1
Laporan Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR)
Kabupaten Katingan

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi		Kendala	Langkah Penyelesaian
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	358,786,650.00	314,927,150.00	88	1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang di kehendaki Undang-undang Nomor 24 tahun 2007	1. Media komunikasi sosial yang ada secara efektif sebagai sarana informasi dan komunikasi yang terpadu dan terintegrasi.
2	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	676,685.00	0.00	0		2. Mengajukan proposal pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bekerja sama dengan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk penyediaan peralatan dan logistik bantuan untuk korban bencana.
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	48,800,000.00	28,276,800.00	58		3. Berkoordinasi
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	291,920,000.00	291,678,000.00	100		
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	95,148,916.00	94,540,000.00	99		
6	Belanja Jasa Pelaksanaan	428,349.00	0.00	0		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi		Kendala	Langkah Penyelesaian
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
	Transaksi Keuangan				<p>tentang penanggulangan bencana.</p> <p>2. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi</p> <p>3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.</p> <p>4. Adanya perubahan iklim yang mengakibatkan intensitas terjadinya bencana di daerah semakin tinggi.</p> <p>5. Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana.</p>	<p>secara intensif dengan stakeholder yang ada (instansi vertikal, SOPD terkait, pihak swasta dan masyarakat).</p> <p>4. Mengadakan Posko siaga dan rutin melaksanakan patroli dengan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang lebih besar lagi.</p>
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	300,000,000.00	0.00	0		
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	270,670,000.00	216,316,587.00	80		
9	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	210,640.00	0.00	0		
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	543,731,946.00	537,900,000.00	99		
11	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	89,135,814.00	84,010,000.00	94		
12	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	78,960,000.00	18,425,000.00	23		
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,926,338.00	1,152,000.00	59		
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,518,300.00	10,175,000.00	54		
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32,393,400.00	22,432,000.00	69		
16	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,308,000.00	4,150,000.00	27		
17	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72,000,000.00	51,500,000.00	71		
18	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3,962.00	0.00	0		
19	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,000,000.00	950,000.00	95		
20	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,890,000.00	68,764,635.00	86		
21	Belanja bahan bakar dan pelumas	70,621,250.00	70,584,200.00	100		
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	788,832.00	690,000.00	87		
23	belanja natura dan pakan natura	16,170,000.00	16,140,000.00	100		
24	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	213,825,000.00	213,750,000.00	100		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi		Kendala	Langkah Penyelesaian
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
25	Belanja jasa tenaga keamanan	337,500,000.00	337,500,000.00	100		
26	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	109,918,00	0,00	0		
27	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,985,000.00	52,826,900.00	86		
	Jumlah	2,999,509,000,00	2,436,688,272,00	81		

Sumber : BPBD Kabupaten Katingan Tahun 2024





BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari 6 (enam) Pelayanan Dasar. Di Kabupaten Katingan untuk Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Katingan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan dasar
- b. Pendidikan kesetaraan
- c. Pendidikan anak usia dini



4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.1

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Tahun 2024

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.2

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM 2024 (%)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	92,73
2	Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18	100 %	72,79



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM 2024 (%)
1	2	3	4	5
	Kesetaraan	Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	84,92

Sumber : Data Dapodikdasmen per Usia, Data Emis dan Data Kependudukan Semester II, Tahun 2024

4.1.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.3

Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	99.016.723.565	97.110.416.758	98,07
2	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	14.869.203.080	13.357.094.306	89,83
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.498.599.676	2.184.285.250	87,42

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Tahun 2024



4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Status kepegawaian

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 54 orang
- 2) Pegawai Harian Lepas : 26 orang

b. Latar belakang Pendidikan

- 1) S2 : 12 orang
- 2) S1 : 31 orang
- 3) Diploma : 5 orang
- 4) SMU : 6 orang
- 5) SMP : - orang
- 6) SD : - orang

Latar belakang Pendidikan (THL)

- 1) S2 : - orang
- 2) S1 : 11 orang
- 3) Diploma : 1 orang
- 4) SMU : 14 orang
- 5) SMP : - orang
- 6) SD : - orang

c. Pangkat dan Golongan

- 1) Golongan IV : 14 orang
- 2) Golongan III : 32 orang
- 3) Golongan II : 8 orang
- 4) Golongan I : - orang

d. Pejabat struktural dan fungsional

- 1) Eselon II : 1 orang
- 2) Eselon III : 5 orang
- 3) Eselon IV : 15 orang
- 4) Fungsional Tertentu : 9 orang
- 5) Fungsional Umum : 23 orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya sarana dan prasarana, penambahan tenaga pendidik walaupun tidak signifikan, serta



lembaga swasta khususnya jenjang PAUD yang mulai mengurus ijin pendirian dan ijin operasional. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicari alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2023 untuk Jenjang Pendidikan Dasar mengalami kenaikan menjadi 2,78 % dari 89,95 % tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadi 92,73 % penyebabnya adalah karena ada usia dibawah 7 tahun dan diatas 16 tahun yang masih terdata di jenjang TK/RA dan di Jenjang Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA, dan sebagian Siswa yang belajar keluar daerah
2. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 7,17 % untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 77,75 % tahun 2023 dan 84,92 % untuk tahun 2024, karena satuan pendidikan telah mulai aktif mensinkronisasikan Dapodik, tetapi masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu masih ada Desa yang satuan PAUD belum memiliki NPSN;
3. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,75 % untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2023 yaitu 72,25 % dan pada tahun 2024 menjadi 72,79 % Karena adanya penambahan satuan Pendidikan Kesetaraan sehingga data anak Putus Sekolah (Drof Out) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dapat terakomodir, dan untuk meningkatkan capaian SPM kami tetap dengan fokus ke PKBM dengan *Satu Kecamatan Satu PKBM*;

Solusi :

1. a. Akan dilakukan koordinasi kepada sekolah SD dan SMP serta setingkatnya, untuk selalu aktif dalam hal sinkronisasi data setiap 2 minggu sekali sesuai dengan edaran dari Kemendikbud maupun Kemenag, serta menjangkau anak usia sekolah untuk bersekolah dan membuat rekapitulasi bagi siswa yang tidak sekolah dengan keterangan yang disesuaikan untuk di teruskan ke masing-masing Bidang Pembinaan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan PNF/PPs untuk ditindaklanjuti oleh SKB, PKBM dan PPs setempat;



- b. Untuk meningkatkan SPM Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan masyarakat setempat dengan sekolah daerah khusus atau terpencil membuka sekolah terintegrasi SD Negeri Tumbang Tangoi di Dusun Jamparan Kecamatan Petak Malai. Anak – anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar bisa mengenyam pendidikan yang layak dengan ditugaskan 1 (satu) orang guru PNS bersama dengan Tenaga Pengajar yang secara sukarela mengabdikan sebagai guru tambahan dan bantuan buku-buku pelajaran atau buku pegangan guru yang dikirim oleh kemendikbutristek.
 - c. Untuk pendataan siswa disekolah dan dimasukkan di Dapodik harus menggunakan NIK perekaman, supaya bagi siswa yang tidak mampu layak mendapatkan PIP (Program Indonesia Pintar) untuk mendorong peningkatan SPM tahun berikutnya.
2. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF akan bekerja keras untuk bekerjasama dengan salah satu Lembaga Yayasan Pendidikan agar bisa memberikan pembinaan dan pendampingan bagi desa yang belum memiliki NPSN untuk tercapainya *Satu Desa Satu PAUD*, dengan cara mempermudah pengurusan dan penerbitan NPSN, untuk selanjutnya ditinjau lanjut ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu agar mempunyai NPSN dan terdata di Dapodikdasmen;
3. Akan dilakukan pembinaan bagi satuan pendidikan yang memiliki Akte Notaris PKBM untuk mengembangkan atau membuka layanan seperti Pendidikan Kesetaraan, dan akan selalu dibimbing baik dari pencarian siswa maupun mensinkronisasi di Dapodikdasmen serta membuka PKBM untuk Kecamatan yang belum memiliki Pendidikan Kesetaraan, sesuai data masih ada 7 (tujuh) Kecamatan yang belum memiliki PKBM;
4. Melakukan optimalisasi seluruh kegiatan baik itu Fisik maupun Nonfisik, serta aktif melakukan monitoring kegiatan di tiap tahap pencairan anggaran, dan menginventarisir kegiatan pada tahun 2024 dan akan diakomodir di tahun 2025.



4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. pelayanan kesehatan balita;
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.4

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Tahun 2024



4.2.3 Realisasi

Tabel 4.5

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM 2024 (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	79,46 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	67,72 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	78,84 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	80,44 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	89,48 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	80,43%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	92,69 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan	100 %	92,27 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM 2024 (%)
		kesehatan		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	97,51 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	93,66 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	87,40 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	86,89 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator bidang kesehatan, pada tahun 2024 belum ada indikator yang capainnya 100 % sesuai dengan ketentuan.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2024 terdiri dari beberapa sumber, diantaranya yaitu:

a. APBD

Anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber dari APBD terdiri dari:



1. Belanja Langsung sebesar Rp.88.377.265.086 dengan penyerapan sebesar Rp. 77.080.910.951 (87,2%)
2. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 88.270.720.077 dengan penyerapan sebesar Rp. 86.049.277.412 (97,48%)

b. APBN

Alokasi anggaran bersumber dari APBN yang diterima Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 145.076.295.000,- dengan penyerapan sebesar Rp. 144.277.517.963 (99,45%)
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 19.348.206.000,- dengan penyerapan sebesar Rp. 19.206.048.846 (99,27%). Hal ini disebabkan karena dana DAK turun secara bertahap sehingga penyerapan disesuaikan dengan dana yang tersedia.

4.2.5 Dukungan Personil

Pada Tahun 2024 per 31 Desember 2024, jumlah total pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan jaringannya adalah sebanyak 1.182 orang dan tenaga kesehatan berjumlah 1.111 orang. Penempatan tenaga tersebut tersebar di 16 UPTD Puskesmas, dan di Dinas Kesehatan dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 4.7
Data Tenaga Kesehatan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Dokter	54 Orang
2	Dokter Gigi	12 Orang
3	Perawat	427 Orang
4	Bidan	366 Orang
5	Apoteker	29 Orang
6	Asisten Apoteker	32 Orang
7	Promosi Kesehatan	37 Orang
8	Sanitarian	19 Orang
9	Nutrisiionist	37 Orang
10	Pranata Laboratorium	38 Orang



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Jabatan	Jumlah
11	Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan	1 Orang
12	Terapis Gigi Dan Mulut	20 Orang
13	Administrator Kesehatan	11 Orang
14	Fisioterapis	3 Orang
15	Radiografer	4 Orang
16	Elektromedis	2 Orang
17	Refraksionis Optisien	0 Orang
18	Dokter Spesialis	19 Orang
Jumlah		1.111 Orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Tahun 2024



Tabel 4.8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2024

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3 (S3)	0
2	Strata 2 (S2)	9
3	Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4)	399
4	Diploma 3 (D3)	710
5	Diploma 2 (D2)	0
6	Diploma 1 (D1)	1
7	SLTA	62
8	SLTP	1
9	SD	0
JUMLAH		1.182

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Tahun 2024



4.2.6 Permasalahan dan Solusi

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2024 sebesar 79,46%, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Jumlah Sasaran Ibu hamil pada tahun 2024 sebanyak 3379 dan yang dilayani sebanyak 2742, masih ada sekitar 637 Ibu hamil yang belum terlayani, hal ini disebabkan oleh :

Permasalahan :

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman ibu hamil, suami dan keluarganya tentang pentingnya ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan.
- b. Letak geografis juga mempengaruhi dalam pemberian layanan Kesehatan termasuk dalam pelayanan kesehatan pada ibu hamil.
- c. Waktu atau jadwal dalam pemberian layanan Kesehatan pada ibu hamil ini dilakukan hanya pada saat pelaksanaan posyandu balita saja untuk daerah- daerah yang tidak memiliki tenaga Kesehatan sehingga hal ini juga mempengaruhi dalam cakupan layanan Kesehatan pada ibu hamil
- d. Persebaran tenaga Kesehatan yang tidak merata yang lebih banyak menumpuk di wilayah perkotaan
- e. Sarana pemberian pelayanan Kesehatan di desa terutama untuk pelayanan kesehatan ibu hamil hanya dilakukan di posyandu
- f. Masih lemahnya pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga masih ada data-data hasil layanan yang tidak tercatat dengan baik dari tingkat FKTP dan jejaringnya

Solusi :

- a. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan
- b. Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri dalam pelayanan KIA



- c. Membuat format pelaporan SPM Kesehatan

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Permasalahan :

- a. Sistem pencatatan dan pelaporan belum terakomodir dengan baik.
- b. Kurangnya informasi mengenai pelayanan persalinan.
- c. Akses ke fasyankes di beberapa wilayah hulu katingan sulit karena letak geografis.
- d. Tidak semua persalinan yang di tolong oleh nakes di Pustu dan Polindes dan fasyankes swasta dilaporkan ke puskesmas.
- e. Masih ada ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bukan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak di fasilitas kesehatan (dirumah).
- f. Ibu bersalin yang menjadi sasaran program di wilayah kerja Puskesmas mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja.
- g. Tidak semua wilayah di setiap desa yang ada di Kabupaten Katingan ada petugas kesehatan.
- h. Ibu bersalin di luar wilayah kerja Kabupaten Katingan tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di kabupaten Katingan melainkan dilaporkan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut dan di sesuaikan dengan tata aturan yang berlaku.
- i. Teknik perhitungan pembiayaan tidak berbasis data.

Solusi :

- a. Pemenuhan media promosi kesehatan tentang pentingnya persalinan di fasyankes
- b. memaksimalnya koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
- c. Perlunya menerapkan kembali kemitraan bidan dan dukun bayi terutama bagi puskesmas yang belum maksimal menjalin kemitraan.



3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Permasalahan :

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2024 sebesar 78,84%, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah sasaran bayi baru lahir pada tahun 2024 sebanyak 3072 bayi dan yang dilayani sebanyak 2416, masih ada sekitar 656 bayi baru lahir yang tidak terlayani yang belum terlayani, hal ini disebabkan oleh :

- a. Tidak semua hasil layanan kesehatan pada bayi baru lahir tercatat dengan baik, seperti hasil layanan bayi baru lahir di PMB, klinik swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas dilaporkan secara berkesinambungan.
- b. Tidak semua desa yang tersebar di kabupaten katingan memiliki petugas kesehatan sehingga mempengaruhi layanan Kesehatan terhadap kelompok sasaran bayi baru lahir.

Solusi :

- a. Puskesmas mampu melakukan proses pengarahan, bantuan dan pelatihan yang mendorong peningkatan kinerja dalam pelayanan yang bermutu (supervisi fasilitatif) ke puskesmas, polindes, dan jaringannya
- b. Adanya pemetaan persebaran tenaga kesehatan agar terpenuhinya SDM yang diperlukan

4) Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Permasalahan :

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2024 sebesar 78,84%, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah sasaran bayi baru lahir pada tahun 2024 sebanyak 3072 bayi dan yang dilayani sebanyak 2416, masih ada sekitar 656 bayi baru lahir yang tidak terlayani yang belum terlayani, hal ini disebabkan oleh :

- a. Tidak semua hasil layanan kesehatan pada bayi baru lahir tercatat dengan baik, seperti hasil layanan bayi baru lahir di PMB, klinik swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas dilaporkan secara berkesinambungan.
- b. Tidak semua desa yang tersebar di kabupaten katingan memiliki petugas



kesehatan sehingga mempengaruhi layanan Kesehatan terhadap kelompok sasaran bayi baru lahir.

Solusi :

- a. Puskesmas mampu melakukan proses pengarahan, bantuan dan pelatihan yang mendorong peningkatan kinerja dalam pelayanan yang bermutu (supervisi fasilitatif) ke pustu, polindes, dan jaringannya
- b. Adanya pemetaan persebaran tenaga kesehatan agar terpenuhinya SDM yang diperlukan

5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Permasalahan :

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2024 sebesar 89,48 %, menurun jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, adapun jumlah sasaran jumlah pelayanan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2024 sebanyak 27308 dan yang dilayani sebanyak 26378, masih ada sekitar 930 usia dasar yang belum terlayani, hal ini disebabkan oleh :

- a. Belum adanya data sasaran yang tetap setiap tahunnya
- b. Untuk beberapa puskesmas lainnya, masih kurang dari 100% karena beberapa orang siswa tidak hadir karena ijin, tanpa keterangan atau sakit saat dilaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan dasar tersebut.
- c. Untuk beberapa puskesmas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan hanya kelas 1 SD serta kelas 7 yang mana seharusnya dilaksanakan pada siswa kelas 1 sampai dengan kelas 9.
- d. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pemegang program.

Solusi :

- a. Data sasaran riil di lapangan dapat diperoleh di koorwil Pendidikan maupun di masing-masing sekolah (lintas sektor) saat penerimaan siswa baru (tahun ajaran baru), Melakukan pelayanan kesehatan anak usia Pendidikan dasar pada awal tahun sampai dengan tahun ajaran baru
- b. Untuk beberapa siswa yang tidak hadir karena sakit atau lainnya dapat dilakukan dengan melibatkan jejaring (petugas pustu) yang bertugas



diwilayah tersebut untuk mengisi form pelayanan kesehatan tersebut

- c. Melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pemegang program lain saat melakukan kegiatan pelayanan Kesehatan seperti petugas gizi, perawat, dokter, promkes atau pemegang program PKPR dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pada anak usia sekolah.

6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Permasalahan :

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif, usia 15-59 tahun. Dengan capaian tahun 2024 sebesar 80,43%, meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah sasaran jumlah pelayanan pada usia produktif pada tahun 2024 sebanyak 125.246 orang dan yang dilayani sebanyak 100.305 orang dan masih ada sekitar 24.941 orang usia produktif yang belum terlayani, hal ini disebabkan oleh :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya skrining kesehatan dalam kondisi sehat. Karena mereka beranggapan pergi ke posbindu atau puskesmas hanya ketika sakit saja.
- b. Belum terlaksanannya program kunjungan rumah dalam pemantauan wilayah setempat oleh kader posyandu dan petugas kesehatan di wilayah setempat.
- c. Data sasaran menggunakan data pusdatin sehingga terjadi perbedaan data riil di wilayah setempat.

Solusi :

- a. Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam wilayah kerja masing-masing. Mensosialisasikan tentang kebijakan pelayanan masyarakat era transformasi layanan primer di posyandu.
- b. Edukasi penduduk dengan penguatan peran kader, kampanye dan membangun gerakan melalui platform digital dan tokoh masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dengan revitalisasi jejaring dan standarisasi layanan Puskesmas, posyandu, labkesmas dan kunjungan rumah.



7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Permasalahan :

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2024 sebesar 92,69%, meningkat jika dibandingkan dari tahun sebelumnya tetapi masih belum mencapai target. Adapun jumlah sasaran jumlah pelayanan pada usia lanjut pada tahun 2024 sebanyak 24.670 orang dan yang dilayani sebanyak 23.355 oarang, masih ada sekitar 1.315 orang usia lanjut yang belum terlayani, hal ini disebabkan oleh :

- a. Masih rendahnya kesadaran lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya, baik di puskesmas maupun di posyandu (terkait promkes)
- b. Lansia yang berkunjung ke posyandu cenderung lansia yang sama setiap bulannya (lansia aktif)
- c. Tidak adanya kegiatan kunjungan rutin bagi lansia yang tidak pernah hadir di posyandu maupun berkunjung di puskesmas
- d. Sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas belum tercatat dengan baik
- e. Terkait sistem pencatatan, kunjungan yang dilaporkan hanya dari kunjungan posyandu, sedangkan yang seharusnya capaian pelayanan kesehatan lansia didapatkan dari pelayanan di dalam gedung (puskesmas, pustu, polindes) maupun pelayanan luar gedung (posyandu, kunjungan rumah, kunjungan ke panti jompo, dll)
- f. Tidak semua desa ada petugas kesehatannya, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan lansia hanya dilakukan pada saat ada kegiatan dari puskesmas, sedangkan waktu pelayanan terbatas

Solusi :

- a. Pelayanan promosi kesehatan terkait pelayanan Kesehatan lansia lebih ditingkatkan lagi baik dari tingkat puskesmas sampai ke pustu polindes maupun posyandu
- b. Untuk tahun 2024, laporan pelayanan kesehatan lansia yang dilaporkan adalah berdasarkan pelayanan yang diberikan baik di dalam



gedung (pukesmas, pustu, polindes) maupun pelayanan di luar gedung (posyandu, kunjungan rumah, kunjungan ke panto jompo dll)

- c. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan rumah untuk lansia yang tidak pernah datang ke faskes maupun posyandu
- d. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan bagi lansia terutama sebagai perpanjangan tangan dari nakes dalam mempromosikan tentang kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan lansia Kegiatan wajib terstruktur dan berjenjang dari tingkat desa (pustu dan polindes) sampai ke puskesmas
- e. Penguatan monev terpadu supervisi fasilitatif dari puskesmas
- f. Membuat SK Tim pelayanan Kesehatan lansia
- g. Membuat alur pelayanan Kesehatan lansia di puskesmas, pustu dan polindes.

8) Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi

Permasalahan :

Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Katingan tahun 2024 ditetapkan menggunakan data Pusdatin, capaian pelayanan kesehatan hipertensi 92,27%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah sasaran penderita hipertensi sebesar 36.177 orang, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 33.457 orang, dan masih ada 2720 orang yang belum terlayani karena :

- a. Pengetahuan masyarakat masih rendah tentang bahaya penyakit hipertensi.
- b. Hipertensi sering tidak menunjukkan gejala, sehingga baru disadari bila telah menyebabkan gangguan organ seperti gangguan fungsi jantung atau stroke.
- c. Masih ada masyarakat yang belum peduli akan pentingnya skrining kesehatan sejak dini, sehingga masih ada kasus yang belum terlayani. Dan masih ada masyarakat yang menganut pemahaman jika tekanan darah sudah normal maka.



Solusi :

- a. Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam wilayah kerja masing-masing.
- b. Meningkatkan penerapan pola hidup sehat. Mensosialisasikan tentang bahaya hipertensi dan pencegahannya. (Promotif dan preventif)
- c. Mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini hipertensi secara aktif (skrining).
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan deteksi dini melalui kegiatan Posbindu PTM.
- e. Edukasi penduduk dengan penguatan peran kader, kampanye dan membangun gerakan melalui platform digital dan tokoh masyarakat.
- f. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dengan revitalisasi jejaring dan standarisasi layanan Puskesmas, posyandu dan kunjungan rumah.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita DM pada tahun 2024 sebesar 97,51%, jumlah sasaran penderita DM di Kabupaten Katingan tahun 2024 sebanyak 1706 orang, sedangkan jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 1699 orang dan jumlah penderita DM yang belum terlayani sebanyak 7 orang. Capaian pelayanan kesehatan penderita DM sudah cukup baik walaupun masih belum mencapai 100%.

10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada tahun 2024 sebesar 93,66%. Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Katingan tahun 2024 sebanyak 274 jiwa dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Dukungan peran serta masyarakat dan petugas kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pada penyandang gangguan jiwa berat khususnya Kabupaten Katingan dan meningkatkan kegiatan skrining kesehatan jiwa di sekolah, kantor-kantor dan masyarakat.

11) Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)



Permasalahan :

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB) tahun 2024 sebesar 87,40% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah sasaran pelayanan kesehatan pada tahun 2024 sebanyak 2.279 orang dan yang dilayani sebanyak 2.023 orang, masih ada sekitar 258 penderita TB yang belum terlayani, hal ini disebabkan oleh :

- a. Masih ada 2 puskesmas yang belum memiliki tenaga laboratorium sehingga mengalami kendala dalam melakukan penegakkan diagnose TB melalui pemeriksaan bakteriologis TB.
- b. Kurangnya logistic pemeriksaan TB dipusesmas (Reagen Zn, Kaca slide, mikroskop rusak oleh jamur, dll).

Solusi :

- a. Koordinasi lintas sector dalam pengusulan tenaga laboratorium (analisis) baik berupa tenaga PHL (Pegawai Harian Lepas) maupun NS (Nusantara Sehat).
- b. Pemenuhan logistic TB di puskesmas.

12) Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV

Permasalahan :

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang sudah mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Kab. Katingan tahun 2024 sebesar 86,89%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah sasaran jumlah pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV pada tahun 2024 sebanyak 3.379 orang dan yang dilayani sebanyak 2.942 orang serta masih ada sekitar 437 orang yang belum terlayani, hal ini disebabkan oleh :

- a. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antara puskesmas dengan klinik bidan swasta maupun klinik perusahaan dalam pelaksanaan skrining HIV ibu
- b. hamil.
- c. Masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan tes HIV



- d. Kurangnya media KIE HIV di fasyankes.
- e. Kesulitan dalam mendapatkan/menjaring sasaran populasi kunci.

Solusi :

- a. Membuat MOU antara puskesmas dan klinik bidan swasta maupun klinik perusahaan dalam pelaksanaan skrining HIV ibu hamil.
- b. Peningkatan Edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya melakukan tes HIV.
- c. Pemenuhan media KIE HIV di fasyankes.
- d. Melakukan Kerjasama dengan penjangkau dan pihak terkait (Kelurahan atau kepala desa) dalam melakukan penjangkaran populasi kunci.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari
- b. Penyediaan pengolahan air limbah domestik

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.9

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan, Tahun 2024



4.3.3 Realisasi

Tabel 4.10

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan, Tahun 2024

4.3.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.11

Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2,820,000,000.00	2,351,853,099.00	83.40
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	800,000,000.00	771,312,488.00	96.41

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan, Tahun 2024

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam rangka mendukung pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- Status kepegawaian



- 1) Pegawai Negeri Sipil : 49 orang
- 2) Pegawai Harian Lepas : 49 orang
- b. Latar belakang Pendidikan
 - 1) S3 : 1 orang
 - 2) S2 : 4 orang
 - 3) S1 : 56 orang
 - 4) Diploma : 1 orang
 - 5) SMU : 36 orang
- c. Pangkat dan Golongan
 - 1) Golongan IV : 3 orang
 - 2) Golongan III : 42 orang
 - 3) Golongan II : 4 orang
 - 4) Golongan I : - orang
- d. Pejabat struktural dan fungsional
 - 1) Eselon II : 1 orang
 - 2) Eselon III : 5 orang
 - 3) Eselon IV : 15 orang
 - 4) Fungsional : - orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum selama tahun 2023 mengalami berbagai macam permasalahan diantaranya :

- a) Terjadinya perbedaan antara rencana dari beberapa program/kegiatan dengan kondisi di lapangan, khususnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.

Terhadap permasalahan di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan telah mengambil kebijakan sebagai berikut

- a) Melakukan prioritas penganggaran terutama pada pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.
- b) Melakukan review desain dengan tetap mengacu berdasarkan anggaran yang tersedia.
- c) Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis terutama kegiatan yang menyangkut pencapaian SPM.
- d) Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis dalam pencapaian SPM.



4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Katingan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan. Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4.12

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	3 Tahun (2022-2024)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	80 %	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan, Tahun 2024



4.4.3 Realisasi

Tabel 4.13

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	80 %	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan, Tahun 2024

4.4.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.14

Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	-	0 0	0,00 0,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	-	-	0,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan, Tahun 2024



4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil Dinas Sosial Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- a. Status kepegawaian
 - 1) Pegawai Negeri Sipil : 28 orang
 - 2) Pegawai Harian Lepas : 38 orang
- b. Latar belakang
 - 1) S2 : 5 orang
 - 2) S1 : 23 orang
 - 3) Diploma : 3 orang
 - 4) SMU : 34 orang
 - 5) SMP : 1 orang
 - 6) SD : - orang
- c. Pangkat dan Golongan
 - 1) Golongan IV : 4 orang
 - 2) Golongan III : 19 orang
 - 3) Golongan II : 5 orang
 - 4) Golongan I : - orang
- d. Pejabat struktural dan fungsional
 - 1) Eselon II : 1 orang
 - 2) Eselon III : 4 orang
 - 3) Eselon IV : 9 orang
 - 4) Fungsional : 1 orang



4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2024 kegiatan SPM bidang Perumahan Rakyat tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan, hal ini disebabkan tidak tersedianya pagu anggaran pada program khusus SPM yaitu program pembangunan perumahan. Namun, pada tahun 2025 telah dianggarkan kembali untuk rencana aksi tercapainya rehabilitasi dan Pembangunan Kembali rumah layak huni bagi korban bencana banjir tahun sebelumnya yang belum tertangani.



4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.15
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, Tahun 2024



4.5.3 Realisasi

Tabel 4.16

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024

NO	NAMA INDIKATOR	TARGET/SASARAN SETAHUN (A)	HASIL/REALISASI (B)	(A)/(B) (%)	SUMBER DATA
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86 Orang	86 Orang	100	BIDANG TIBUM, PERDA DAN LINMAS
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	11 Orang	11 Orang	100	BIDANG DAMKAR

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari 2 (dua) indikator bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 berdasarkan data yang diperoleh dari bidang penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya telah terjadi pelanggaran perda dan/atau perkara yang diselesaikan sebanyak 151 orang dan jumlah pelanggaran perda dan/atau perkara yang dilaporkan/dipantau sebanyak 151 orang. Sedangkan pelayanan penyelamatan kebakaran mencapai 100% dikarenakan dari jumlah kejadian kebakaran, secara keseluruhan telah mendapatkan layanan penyelamatan kebakaran.

Capaian SPM tidak hanya melihat dari target yang telah dicapai, tetapi juga hendaknya sesuai dengan mutu pelayanan dasar minimal yang menyangkut mutu pelayanan secara kualitas dan mutu secara kuantitas. Disadari sepenuhnya bahwa pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sudah dicapai pada tahun 2024 belum seluruhnya sesuai dengan definisi operasional yang berkaitan dengan mutu pelayanan secara kualitas maupun kuantitas.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

4.5.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.17

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024

NO	NAMA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI FISIK (%)
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.029.985.184,-	3.014.118.149,-	100
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.299.994.477,-	2.289.103.031,-	100
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	649.993.798,-	648.698.118,-	100
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	79.996.909,-	76.317.000,-	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	2.006.868.605,-	1.999.140.633,-	100
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.898.966.471,-	1.894.890.017,-	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, Tahun 2024



4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- e. Status kepegawaian
 - 3) Pegawai Negeri Sipil : 48 orang
 - 4) PPPK : 5 orang
 - 5) Pegawai Harian Lepas : 302 orang
- f. Latar belakang
 - 7) S2 : 3 orang
 - 8) S1 : 35 orang
 - 9) Diploma : 1 orang
 - 10) SMU : 315 orang
 - 11) SMP : 1 orang
 - 12) SD : 1 orang
- g. Pangkat dan Golongan
 - 5) Golongan IV : 4 orang
 - 6) Golongan III : 43 orang
 - 7) Golongan II : 11 orang
 - 8) Golongan I : - orang
 - 9) Golongan V (PPPK) : 5 orang
- h. Pejabat struktural dan fungsional
 - 5) Eselon II : 1 orang
 - 6) Eselon III : 5 orang
 - 7) Eselon IV : 11 orang
 - 8) Fungsional Tertentu : 3 orang
 - 9) Fungsional Umum : 33 orang



4.5.6 Permasalahan dan Solusi

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mendeteksi secara dini faktor resiko gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di lingkungan Masyarakat yaitu dengan cara melakukan Deteksi Dini, memetakan daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta melakukan kerjasama lintas sektoral dengan stakeholder yang terkait.

a. Kendala

Kendala yang dihadapi terkait indikator ini adalah kurangnya personil Satuan



Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan baik secara kualitas dan kuantitas, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan Perda/Perkada dan minimnya anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dengan luas Kabupaten Katingan adalah 20.382,26 kilometer persegi, terdiri dari 13 kecamatan 154 Desa dan 7 Kelurahan dalam mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan sangat diperlukan melalui kegiatan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di 154 Desa dan 7 Kelurahan di Kabupaten Katingan.

b. Tindak lanjut

Dalam memenuhi target perlu meningkatkan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum, penambahan/rekrutmen personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan yang memenuhi standar kualifikasi, penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan Perda/Perkada, penyiapan anggaran yang cukup untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di daerah melalui Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran dikawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdiksi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.



a. Kendala

Pelayanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat sasaran dari indikator ini cakupannya sangat luas, mengingat luas wilayah Kabupaten Katingan yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan hanya 6 Kecamatan yang ada Pos dan Personil Pemadam Kebakarannya yaitu Pos Pemadam Kecamatan Katingan Hilir yaitu Pos Pemadam Kebakaran Katunen, Pos Pemadam Kebakaran Kereng Humbang, dan Pos Pemadam Kebakaran Kereng Pangi, Pos Pemadam Kebakaran Pendahara di Tewang Sanggalang Garing, Pos Pemadam Kebakaran Samba Danum dan Pos Pemadam Kebakaran Samba Bakumpai di Kecamatan Katingan Tengah, Pos Pemadam Kebakaran Tumbang Sanamang di Kecamatan Katingan Hulu, Pos Pemadam Kebakaran Baun Bango di Kecamatan Kamipang dan Pos Pemadam Kebakaran Pegatan di Kecamatan Katingan Kuala. Kendala yang dihadapi terkait indikator ini yaitu kurangnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran baik permukiman maupun lahan, kualitas aparatur pemadam kebakaran belum memadai baik secara kualitas dan kuantitas, terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta minimnya anggaran sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b. Tindak lanjut

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam memenuhi target Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mengingat luas Kabupaten Katingan adalah 20.382,26 kilometer persegi yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 154 Desa dan 7 Kelurahan sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membantu anggota pemadam kebakaran melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi dalam memberdayakan masyarakat oleh Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan yang bekerjasama dengan *stakeholder* terkait,



meningkatkan kualitas aparatur pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai di Pos Pemadam Kebakaran, penambahan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan yang belum ada Pos Pemadam Kebakaran serta membentuk dan membina Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di 154 Desa dan 7 Kelurahan.

4.6 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan

Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.18

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan, Tahun 2024



4.6.3 Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	177,106 Orang (100%)
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1000 Orang (0,56%)
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1066 Orang (166%)

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan, Tahun 2024

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Untuk Tahun 2024 pelayanan informasi rawan bencana disampaikan melalui penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat. Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaksanakan di 13 (tiga belas) kecamatan Kabupaten Katingan, dengan jumlah peserta seluruhnya 177,106 orang. Selain itu pelayanan informasi berbagai jenis kebencanaan di Kabupaten Katingan disampaikan melalui penyebaran papan informasi, dalam hal ini melalui penyebaran spanduk himbauan kepada masyarakat



desa-desa di 13 (tiga belas) kecamatan lokasi kegiatan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi. Sehingga total jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Katingan seluruhnya adalah 177,106 orang (100%). Melalui berbagai media informasi inilah kemudian disebarkan lebih lanjut kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Katingan.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota bahwa kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sekurang-kurangnya memuat:

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
2. Pembuatan Rencana Kontinjensi;
3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi;
4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap bencana; dan
6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota bahwa kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sekurang-kurangnya memuat :

1. Respon Cepat Darurat Bencana;
2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;



3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.

Untuk Tahun 2024 tercatat adanya bencana banjir dan bencana kebakaran yang melanda hutan dan lahan di wilayah kabupaten katingan, dikarenakan tidak ada hujan selama beberapa pekan, hal ini mengakibatkan daerah atau tanah gambut yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun daerah yang terdampak banjir sebanyak 11 kecamatan dan kebakaran hutan dan lahan tersebut antara lain : Jumlah kecamatan yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 8 (delapan) kecamatan dan telah terjadi sebanyak 32 titik hotspot api yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami kabut asap.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 adalah Belanja Operasional sebesar Rp. 9,021,409,647,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 747,157,760,00 dengan total anggaran sebesar Rp. 9,768,567,407,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.200,853,033,00. Adapun alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan standar pelayanan minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	666.247.265,00	310.856.587,00	46%



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
		Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	984.176.000,00	878.277.400,00	89%
		Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	70.773.500,00	54.705.458,00	72%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	633.078.400,00	621.910.000,00	99%
		Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000,00	177.548.635,00	59 %
		Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	127.940.144,00	124.038.160,00	96%
		Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	30.550.000,00	24.258.100,00	79%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan, Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, BPBD juga mendapatkan alokasi dari SiLPA Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) Tahun Anggaran 2023 untuk operasional pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp. 2.999.509.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.436.688.272,00

Selain dari dana belanja rutin yang dialokasikan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pada Tahun Anggaran 2024, BPBD mendapatkan dana



operasional yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Tanggap Darurat Bencana Karhutla Tahun Anggaran 2024 dan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan seluruhnya berjumlah 73 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Status kepegawaian
 1. Pegawai Negeri Sipil : 22 orang
 2. PPPK : 2 orang
 3. Pegawai Harian Lepas : 40 orang
- b. Latar belakang Pendidikan
 - 1) S2 : 3 orang
 - 2) S1 : 16 orang
 - 3) Diploma : 4 orang
 - 4) SMU : 40 orang
 - 5) SMP : 0 orang
 - 6) SD : 0 orang
- c. Pangkat dan Golongan
 - 1) Golongan IV : 5 orang
 - 2) Golongan III : 16 orang
 - 3) Golongan II : 0 orang
 - 4) Golongan 1 : 0 orang
- d. Pejabat struktural dan fungsional
 - 1) Eselon II : 1 orang
 - 2) Eselon III : 3 orang
 - 3) Eselon IV : 2 orang
 - 4) Fungsional : 7 orang



4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Belum termuatnya pemenuhan urusan wajib sub urusan bencana dalam program prioritas.



2. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana.
3. Terbatasnya kapasitas kemampuan sumberdaya manusia penanggulangan bencana.
4. Luasnya wilayah rawan bencana dan terbatasnya sarana prasarana dan teknologi untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.

b. Solusi

1. Menyampaikan melalui surat agar pelayanan urusan wajib sub urusan bencana dapat dimuat dalam Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.
2. Meminta penambahan anggaran dalam rangka pemenuhan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana.
3. Mengusulkan upaya peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
4. Mengusulkan penyediaan sarana prasarana yang memadai dan teknologi yang maju untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.

4.7 Urusan Sosial

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis – jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.



4.7.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 4.21

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	20 %	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Tahun 2024

4.7.3 Realisasi

Tabel 4.22

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	93.08 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	96.67 %
4	Rehabilitasi sosial dasar	Jumlah tuna sosial khususnya		



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM (%)
	tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100 %	96,67%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	20 %	16%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Tahun 2024

4.7.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.23

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial	661.600.435	488,373,130	73.82
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	2. Program Penanganan Bencana	396.810.000	379,736,327	95.70

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Tahun 2024

4.7.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam rangka mendukung pelaksanaan SPM urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :



- a. Status kepegawaian
 - Pegawai Negeri Sipil : 17 orang
 - PPPK : 2 orang
- b. Latar belakang Pendidikan
 - 1) S2 : 2 orang
 - 2) S1 : 15 orang
 - 3) Diploma : 1 orang
 - 4) SMU : 1 orang
 - 5) SMP : - orang
 - 6) SD : - orang
- c. Pangkat dan Golongan
 - 1) Golongan IV : 2 orang
 - 2) Golongan III : 14 orang
 - 3) Golongan II : 1 orang
 - 4) Golongan I : - orang
 - 5) PPPK : 2 orang
- d. Pejabat struktural dan fungsional
 - 1) Eselon II : 1 orang
 - 2) Eselon III : 4 orang
 - 3) Eselon IV : 2 orang
 - 4) Fungsional (PNS) : 7 orang
 - 5) Fungsional (PPPK) : 2 orang

4.7.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan urusan sosial sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana mobilitas kendaraan kedaruratan untuk penjangkauan.
- 2) Tidak dapat diprediksinya penanganan calon penerima manfaat untuk mutu layanan penelusuran keluarga.
- 3) Calon penerima manfaat yang sudah dilayani khususnya Penyandang Disabilitas yang kembali ke layanan awal.
- 4) Kurang koordinasi lintas sektor pengampu layana dasar sehingga kadang kala tidak sinkron dalam penanganan.

Solusi :

1. Penyusunan dan penargetan sarana dan prasarana mobilitas kendaraan untuk tahun berikutnya agar dapat melakukan penjangkauan calon penerima manfaat dengan minimal.



2. Kerjasama dan koordinasi dengan Pekerja Sosial dan SDM Kesejahteraan Sosial lainnya khusus penanganan Luar Panti
3. Penanganan yang berulang-ulang yang biasanya terjadi pada 1-5 orang untuk beberapa kali layanan dasar.
4. Diperlukan koordinasi secara berkala.





BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 ini disusun sebagai dasar evaluasi pemerintah pusat untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 ini diharapkan dapat laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan Tahun 2024, karena di dalamnya juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP). Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 ini disampaikan. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip semangat, komitmen, koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektifitas dan efisiensi yang baik dengan Perangkat Daerah diharapkan dapat **“TERWUJUDNYA KATINGAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA”**. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana semestinya.

Kasongan, Maret 2025

BUPATI KATINGAN



SAIFUL



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

INSPEKTORAT

Jalan M.T. Haryono Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Kode Pos 74413
Telepon (0536) 4043576 Faksimile (0536) 4043576 Laman www.inspektorat.katingankab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Katingan untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (quality assurance) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pemerintah daerah dan memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



INSPEKTUR
KABUPATEN KATINGAN,

DR. DEDDY FERRAS, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197010041990031005